

ANALISIS KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI KAWASAN PESISIR WISATA

**Mami Hajaroh
Rukiyati
L Andriani Purwastuti
Bambang Saptono**

Penerbit ANDI Yogyakarta

ANALISIS KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI KAWASAN PESISIR WISATA

Oleh: Mami Hajaroh, Rukiyati, L. Andriani Purwastuti & Bambang Saptono

Hak Cipta © 2017 pada Penulis

Editor : Maya
Setting : Vindya Puspasari R.
Desain Cover : Andang S.
Korektor : A. Ria P.U

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

Penerbit: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI)

Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 55281

Percetakan: ANDI OFFSET

Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 55281

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Hajaroh, Mami

ANALISIS KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI KAWASAN
PESISIR WISATA/Mami Hajaroh, Rukiyati, L. Andriani Purwastuti &
Bambang Saptono;

– Ed. 1 . – Yogyakarta: ANDI,

21 20 19 18 17

vi + 154 hlm.; 16 x 23 Cm.

5 4 3 2 1

ISBN: 978 – 979 – 29 – 6750 – 0

I. Judul

1. Educational Policy

DDC'23 : 379.1



PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulisan buku ini dapat selesai. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita yang membacanya.

Buku ini berjudul *Analisis Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kawasan Pesisir Wisata* yang membahas tentang pentingnya Sekolah Ramah Anak di kawasan pesisir wisata, mengingat kawasan pesisir wisata termasuk kawasan yang berisiko bagi perkembangan dan pendidikan anak. Konsep dasar Sekolah Ramah Anak merupakan kebijakan global yang dikeluarkan oleh UNICEF dan diratifikasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke dalam Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sekolah Ramah Anak menjadi salah satu bagian pembahasan buku ini. Untuk mengimplementasikan kebijakan ini, sekolah semestinya melakukan interpretasi untuk mengembangkan kebijakan dan program sesuai dengan konteks lingkungan tempat sekolah berada. Kawasan pesisir merupakan kawasan Indonesia yang khas, oleh karena itu memerlukan kebijakan dan program spesifik dalam mengimplementasikan Sekolah Ramah Anak.

Buku ini memberikan acuan kepada *stakeholder* Sekolah Dasar dalam merancang kebijakan dan program agar kebijakan yang bersifat nasional dapat diimplementasikan dalam skala lokal di sekolah. Tri pusat pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk terwujudnya sekolah ramah anak dibahas peran dan partisipasinya dalam tulisan ini. Manajemen berbasis masyarakat menjadi hal yang pokok dalam menyinergikan tri pusat pendidikan dalam kerangka implementasi kebijakan sekolah ramah anak.

Tulisan dalam buku ini merupakan serangkaian hasil penelitian strategis nasional yang dilaksanakan di kawasan wisata pesisir Gunungkidul dengan didanai oleh Kemenristek Dikti tahun 2015-2017 yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, Unit Pengelola Teknis Pendidikan Kecamatan Tanjungsari, dan Sekolah Dasar-Sekolah Dasar di Kecamatan Tanjungsari.

Namun demikian, kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam buku ini. Kami mohon kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat. Terima kasih.

Yogyakarta, 20 Oktober 2017

Penulis





DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 URGENSI SEKOLAH RAMAH ANAK	9
SEKOLAH RAMAH ANAK DAN HAK ANAK	9
SEKOLAH RAMAH ANAK DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL	14
BAB 3 KONSEP DASAR DAN KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK	19
KONSEP DASAR SEKOLAH RAMAH ANAK	19
KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK	20
KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI INDONESIA ...	26
KONSEP MODEL SEKOLAH RAMAH ANAK DI DAERAH PESISIR	34
KONSEP SEKOLAH RAMAH ANAK DI WILAYAH PESISIR DIY	35
PENDIDIKAN RAMAH ANAK DI KAWASAN PESISIR	38
BAB 4 PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK BERBASIS KAWASAN	41
PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI BERBAGAI NEGARA	41

	URGENSI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK BERBASIS KAWASAN	46
	PENGEMBANGAN VARIABEL DAN INDIKATOR SEKOLAH RAMAH ANAK DI KAWASAN PESISIR	49
BAB 5	ANALISIS KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK	77
	ANALISIS KEBIJAKAN UNTUK MENGEMBANGKAN SEKOLAH RAMAH ANAK	77
	ANALISIS UNTUK KEBIJAKAN (ANALYSIS FOR POLICY)	79
	PROSES KEBIJAKAN	82
BAB 6	INTERPRETASI KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN	93
	TAHAP 1: ANALISIS KEBIJAKAN	98
	TAHAP 2. PERUMUSAN KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK	103
BAB 7	ORGANISASI IMPLEMENTASI SEKOLAH RAMAH ANAK MELALUI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH	123
	LATAR BELAKANG MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH ..	125
	KONSEP DASAR MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH	127
	ORGANISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK	130
BAB 8	MONITORING DAN EVALUASI SEKOLAH RAMAH ANAK	135
	EVALUASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK	136
	METODE EVALUASI	145
	DAFTAR PUSTAKA	147
	TENTANG PENULIS	153





1 PENDAHULUAN

Menciptakan lingkungan sekolah sebagai tempat belajar siswa yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman menjadi suatu keniscayaan. Dengan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan sehat akan membuat anak *kerasan* sekolah dan belajar dengan tenang. Selain itu, anak juga akan tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam pendidikan secara wajar tanpa intimidasi kekerasan.

Kebijakan Sekolah Ramah Anak (*Child Friendly School*) yang digagas oleh UNICEF pada tahun 2006 dengan menerbitkan buku manual untuk pengembangan Sekolah Ramah Anak menunjukkan adanya perhatian yang serius terhadap kenyamanan sekolah yang mutlak diperlukan oleh anak. Dengan sekolah yang nyaman, anak akan lebih suka berada di sekolah dengan aktivitas yang dapat mendorong meningkatkan prestasi belajar mereka.

Sekolah Ramah Anak (SRA) yang digagas oleh UNICEF bersifat terbuka. Variabel-variabel Sekolah Ramah Anak dapat dikembangkan ke dalam indikator sesuai dengan konteks budaya untuk negara yang akan menerapkannya. Nigeria, Thailand, Cina, dan Filipina termasuk

negara-negara yang telah mengembangkan dan menerapkan Sekolah Ramah Anak, bahkan telah menjadi salah satu kebijakan pendidikan di negara tersebut.

Sebagaimana dimuat dalam Radar Lampung pada bulan Desember 2012, bahwa pada Hari Anak Nasional 2012, Pemerintah Daerah Lampung bekerja sama dengan *Western Child Fund Indonesia*; Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-Pamas) meluncurkan program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SDN 1 Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu Lampung. Sekolah Ramah Anak menjamin tidak ada kekerasan antara guru dengan siswa di dalam sekolah.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama di Kabupaten Bantul sebagaimana diberitakan dalam *trulyjogja.com*, program Sekolah Ramah Anak diselenggarakan oleh *Plan Indonesia* pada tahun 2005 pascagempa 2005 di 10 sekolah. Kesepuluh sekolah tersebut berada di Kecamatan Banguntapan yaitu SD Banyuurip dan SD Pelem; di Kecamatan Imogiri yaitu SD Kebonagung dan SD Siluk; di Kecamatan Piyungan yaitu SD I Cepokojajar dan SD Payak; serta di Kecamatan Pleret yaitu SD Brajan, SD I Putren, SD Muhammadiyah Pandes, dan MIN Jejeran. *Plan Indonesia* merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang pengembangan anak telah banyak melakukan kerja sama dalam menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak di Indonesia, termasuk di Yogyakarta.

Daerah Pesisir di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang masih kurang mendapatkan perhatian dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak. Terlihat dalam program yang diselenggarakan oleh *Plan Indonesia* tidak satu pun berada di daerah pesisir. Padahal masalah kenyamanan, keamanan, dan lingkungan yang sehat di sekolah merupakan hak setiap anak di mana pun berada, tak terkecuali anak-anak di daerah pesisir.

Beberapa argumentasi dapat dijelaskan terkait dengan tempat penelitian di kawasan pesisir sebagai berikut:

1. Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang sepertiga wilayahnya terdiri dari lautan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke memiliki corak dan sifat tersendiri. Sifat dan corak ini tentunya memerlukan perhatian dan penanganan khusus dalam upaya pembangunan wilayah pada umumnya dan pendidikan pada khususnya.
2. Pembangunan wilayah strategis pada saat ini difokuskan pada konsep negara maritim. Membangun negara maritim yang kuat perlu sumber daya manusia, khususnya keterlibatan masyarakat pesisir untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Penyiapan sumber daya manusia pesisir melalui pendidikan menjadi hal yang mendesak untuk segera dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan pendidikan ramah anak di kawasan pesisir.
3. Selama ini beberapa sekolah dasar di kawasan pesisir kurang memperoleh akses dalam upaya peningkatan atau perbaikan mutu. Hal ini disebabkan sekolah-sekolah ini jauh letaknya dari Dinas Pendidikan yang berlokasi di pusat pemerintahan daerah. Selain itu, sekolah-sekolah kawasan pesisir kurang mendapat perhatian dan dilibatkan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi.
4. Budaya kawasan pesisir memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang dapat digali dan dikembangkan menjadi acuan dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak yang sesuai dengan konteks wilayah dan budaya. Menggali kembali nilai-nilai tradisional menjadi urgen ketika pembangunan pendidikan yang selama ini terjadi berkecenderungan bersifat teknokratis yang justru merusak lingkungan hidup.

5. Peserta didik sekolah dasar kawasan pesisir merupakan bagian dari masyarakat yang sangat rentan terhadap bencana alam, khususnya gempa besar di lautan yang menimbulkan tsunami. Penelitian Sekolah Ramah Anak di kawasan pesisir ini merupakan penelitian awal dari serangkaian penelitian yang nantinya dapat dikaitkan dengan pendidikan mitigasi bencana tsunami. Bencana tsunami yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan tidak dapat diprediksi secara tepat oleh ilmu pengetahuan modern dapat dieliminasi dampak negatifnya secara dini dengan cara pandang dan edukasi yang sesuai dengan kultur dan kondisi geografis kawasan pesisir.

Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan Sekolah Ramah Anak di daerah pesisir. Beberapa persoalan yang penting untuk dijawab adalah bagaimana konsep Sekolah Ramah Anak yang sesuai dengan konteks budaya daerah pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta? Pengembangan Sekolah Ramah Anak tidak terlepas dari kebijakan dan program yang dimiliki oleh sekolah. Hanya saja sekolah dalam mengembangkan sekolah belum melakukan analisis perumusan kebijakan dan program yang kontekstual dengan kebutuhan sekolah. Beberapa hal memungkinkan sekolah belum melakukan analisis kebijakan karena belum memahami proses merumuskan kebijakan di tingkat satuan pendidikan dengan mendasarkan pada kebijakan di tingkat atas, baik tingkat nasional, wilayah, maupun daerah sekaligus sesuai dengan konteks sekolah. Demikian juga tidak terbiasa melakukan analisis perumusan kebijakan sekolah yang independen sebagai keputusan kebijakan dan program sekolah yang mendasarkan pada evaluasi diri sekolah ataupun analisis kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang dimiliki oleh sekolah. Optimalisasi keterlibatan dan sinergitas tri pusat pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) belum dilakukan, padahal ketiga aspek ini menjadi pilar utama dalam pendidikan dasar. Hal tersebut berdampak pada ketidaksiharasan kebijakan sekolah dengan kebijakan orang tua masih sering terjadi.

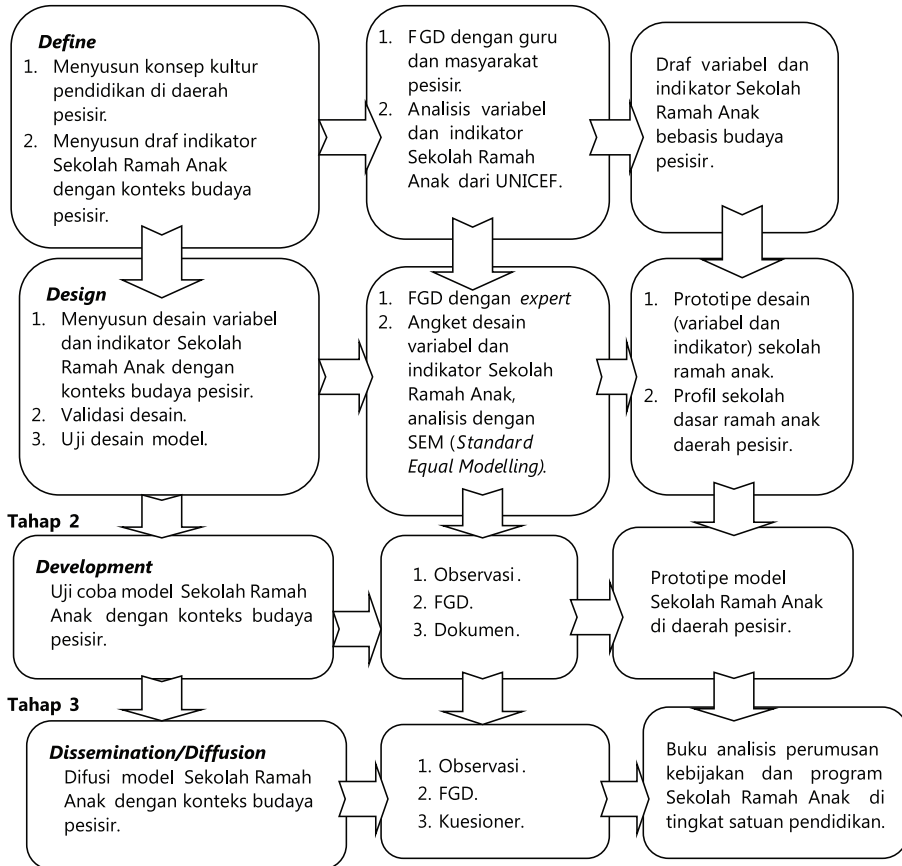


Buku ini memberikan wawasan kepada pembaca tentang pentingnya mengembangkan Sekolah Ramah Anak di berbagai kawasan. Dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak dimulai dengan merumuskan kebijakan dan program melalui aktivitas perumusan yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai tri pusat pendidikan yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak. Perumusan kebijakan dan program diawali dengan mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan dalam konteks sekolah, masyarakat, dan keluarga tempat satuan pendidikan berada. Dari hasil identifikasi masalah dirumuskan masalah kebijakan yang mendesak untuk diberikan solusi penyelesaian masalah melalui kebijakan sekolah. Dengan demikian, kebijakan dan program sekolah disusun berbasis masalah.

Dengan membaca buku ini, pembaca akan mendapat jawaban bagaimana melakukan pengembangan kebijakan dan program Sekolah Ramah Anak di tingkat satuan pendidikan. Tulisan ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan termasuk sekolah dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak di tingkat satuan pendidikan karena disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji coba secara akademis dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian dan pengembangan (*research and development*). Penelitian dilakukan dalam tiga tahap. **Tahap pertama** adalah tahap *research* untuk mengembangkan konsep Sekolah Ramah Anak sesuai dalam konteks budaya kawasan pesisir dan mengenalkan konsep Sekolah Ramah Anak pada guru dan *stakeholder* sekolah dasar di kawasan pesisir. **Tahap kedua** dengan mengembangkan model analisis perumusan kebijakan Sekolah Ramah Anak di kawasan pesisir dan implementasinya. **Tahap ketiga** dengan melakukan pendampingan sekolah dalam melakukan analisis kebijakan dan program Sekolah Ramah Anak berbasis konteks pesisir wisata dan melakukan evaluasi.

Tahap penelitian dapat dilihat dalam skema berikut:

Tahap 1



Gambar 1.1 Bagan penelitian

Pada penelitian tahap pertama, teknik pengumpulan data menggunakan *Focus Group Discussion* untuk mengeksplorasi indikator Sekolah Ramah Anak dari guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan. Hasil eksplorasi tersebut disusun menjadi variabel-variabel dan indikator-indikator, lalu disusun ke dalam kuesioner untuk dilakukan validasi kepada peserta FGD. Data dari kuesioner dianalisis secara eksploratory dengan menggunakan SPSS confirmatory. Data dari

kuesioner ini juga dianalisis secara confirmatory dengan SEM (*Standard Equation Modelling*) untuk menemukan model variabel dan indikator. Tahap kedua data dikumpulkan melalui observasi, FGD, dokumentasi, dan angket evaluasi. Analisis data dilakukan dengan analisis Ethno-Fenomenologi terhadap Sekolah Ramah Anak dan analisis kuantitatif untuk mengetahui hasil evaluasi Sekolah Ramah Anak. Penelitian tahap ketiga data dikumpulkan melalui *interview*, observasi, kuesioner, dan dokumen. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan langkah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut disusunlah buku ini dengan judul *Analisis Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kawasan Pesisir*.





2

URGENSI SEKOLAH RAMAH ANAK

SEKOLAH RAMAH ANAK DAN HAK ANAK

Sekolah Ramah Anak merupakan sekolah yang menjadi dambaan semua warga sekolah. Sekolah Ramah Anak pada hakikatnya sekolah yang aman dan nyaman bagi anak. Dengan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan sehat akan membuat anak *kerasan* sekolah dan belajar dengan tenang. Selain itu, anak juga akan tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam pendidikan secara wajar tanpa intimidasi kekerasan. Konsep Sekolah Ramah Anak memiliki keterkaitan dengan pemenuhan hak anak. Upaya membentuk lingkungan tersebut merupakan upaya untuk memenuhi hak anak. Pasal 3 UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Undang-Undang No. 23/2002, Pasal 1 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini secara esensial berisi jaminan dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi dalam kehidupan di lingkungan keluarga dan masyarakat secara optimal. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak secara substantif mengatur hak anak di hadapan hukum, eksploitasi ekonomi, dan seksual terhadap anak, perdagangan anak, perlindungan anak terhadap kerusuhan, hak anak di pengungsian dan daerah konflik. Prinsip-prinsip yang dipakai, yaitu anak perlu dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta dipenuhi hak-haknya karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Hal-hal tersebut perlu diperhatikan agar bangsa Indonesia jangan sampai terjadi *lost generasi*.

Untuk hak anak terkait dengan dengan UU 1945 Pasal 28 C menyebutkan: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Selanjutnya, ketentuan konstitusi ini secara operasional diatur secara tegas pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya." Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pasal 13 dan 14 yang memuat ketentuan tentang Pengakuan Hak Anak atas Pendidikan dan Hak untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Budaya. Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar 1945 me-

nyebutkan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan ini secara operasional diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan: "Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya." Pasal 70 Ayat (2) menyebutkan; "Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat (Asisten Deputi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Deputi Bidang Tumbuh Kembang, 2014).

Implementasi UU Perlindungan Anak menemukan relevansinya ketika di Indonesia pada saat ini terjadi banyak kekerasan. Fenomena tentang *bullying*, kekerasan dan kejahatan seksual, perdagangan anak dan kejahatan terhadap anak yang lainnya sudah dalam kondisi yang memprihatinkan, bahkan menjadi ancaman terhadap anak.

Sebuah riset LSM Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) yang dirilis awal Maret 2015 menunjukkan data yang mencengangkan. Dari survei yang diambil di Jakarta dan Kabupaten Serang, Banten, 84% anak Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Melihat kondisi yang semakin memprihatinkan ini, pengamat pendidikan sekaligus Dewan Pertimbangan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Doni Koesoema mengatakan, pihaknya ingin mengembalikan sekolah ke fungsi utama sebagai tempat belajar yang aman bagi anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagaimana dimuat dalam *Radioaustralia.net.au* mencatat bahwa tahun 2012 telah terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak hingga lebih dari 10% di sekolah. Kekerasan yang dilaporkan ini terjadi di sekolah. Kekerasan

terhadap anak di lingkungan sekolah dapat dilakukan oleh guru maupun antarsiswa dalam berbagai bentuk dan jenis. Kasus kekerasan ini terjadi merata hampir di seluruh wilayah di Indonesia. KPAI melakukan survei di 9 provinsi terhadap lebih dari 1000 orang siswa dan siswi, baik di tingkat SD, SMP/Mts, maupun SMA/MA. Hasil survei menunjukkan bahwa 87,6% siswa mengaku pernah mengalami tindak kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, seperti dijewer, dipukul, dibentak, dihina, serta diberi stigma negatif hingga dilukai dengan benda tajam. Sebaliknya juga cukup mengejutkan, sebanyak 78,3% anak mengaku pernah melakukan tindak kekerasan dari bentuk yang ringan sampai yang berat.

Bullying atau kekerasan yang terjadi di kalangan sekolah merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat ditoleransi, mengingat tugas utama sekolah adalah memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi anak untuk belajar bagi masa depan. Fenomena kekerasan seperti ini harus dieliminasi, dicegah untuk tidak terjadi dan bilamana mungkin dihentikan sama sekali karena hal ini berdampak negatif terhadap masa depan anak, baik anak sebagai korban kekerasan maupun anak sebagai pelaku kekerasan.

Dominasi tindak kekerasan yang ada di sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Dominasi Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah Tahun 2013

No	Dilakukan oleh	Jumlah	
		Frekuensi	Persen
1.	Guru	2039	29.9
2.	Teman Sekelas	2871	42.1
3.	Teman Lain Kelas	1902	27.9

Sumber: KPAI, 2013

Pelaku kekerasan di sekolah dilakukan oleh guru, teman kelas, dan teman lain (lihat Tabel 2.1). Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 11 yang menyebutkan bahwa Indikator KLA untuk Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya meliputi:

- ❁ Angka partisipasi pendidikan anak usia dini.
- ❁ Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun.
- ❁ Persentase sekolah Ramah Anak.
- ❁ Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah.
- ❁ Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah yang dapat diakses oleh semua anak.

Bagaimana untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak? Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merasa perlu untuk menerbitkan “Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA).”

Hak anak yang terkait dengan Sekolah Ramah Anak yaitu setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Konsep sekolah ramah juga terkait dengan hak anak berkebutuhan khusus. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk belajar masih belum memenuhi kebutuhan tersebut. Sekolah dengan sarana prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan

anak sering menjadikan anak tidak aman dan nyaman di sekolah. Guru sebagai pendidik yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak sering malah menjadi pelaku kekerasan kepada anak-anak. Penelitian Ariefa (2010), menemukan masih terjadi berbagai bentuk *bullying* di Sekolah Dasar, baik *bullying* dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikologis.

SEKOLAH RAMAH ANAK DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

Sekolah Ramah Anak merupakan implementasi dari tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003. Pasal 1 UU ini menyatakan bahwa "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada usia anak secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara." Secara esensial UU ini menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Sebuah pendidikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan sebuah pembelajaran yang akan menciptakan peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan Nasional Indonesia memiliki kaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Nasional diabdikan bagi kejayaan bangsa dan negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Keterkaitan ini dapat dijelaskan melalui pernyataan bahwa Sekolah

Ramah Anak merupakan wahana atau sarana untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, mempunyai kekuatan spiritual, cerdas, terampil, serta berguna bagi sumber daya pembangunan bangsa.

Tujuan pendidikan ini diwujudkan melalui visi, misi, kurikulum, kebijakan, dan program Sekolah Ramah Anak. Seluruh praktik penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak secara hakiki merupakan usaha untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional ini. Tujuan pendidikan nasional ini sejalan dengan UUD 45 Pasal 31 yang mengatakan bahwa Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran.

Pasal 50 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

- ❁ Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
- ❁ Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
- ❁ Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.
- ❁ Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.
- ❁ Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal ini pada hakikatnya berisi bahwa setiap anak mempunyai hak memperoleh pendidikan yang komprehensif menyangkut hakikat kodratnya sebagai manusia. Mengacu pada pandangan Notonagoro,

yaitu manusia yang monopluralis, maknanya manusia yang berdimensi plural, tetapi merupakan satu kesatuan utuh sebagai manusia. Susunan kodrat manusia: jiwa (akal, rasa, karsa); raga (fisik, tumbuhan, binatang). Sifat kodrat: makhluk individu dan sosial. Kedudukan kodrat: makhluk otonom dan makhluk Tuhan. Hakikat kodrat manusia ini semestinya dapat dikembangkan secara optimal melalui pendidikan. Driyarkara (2006: 369), mengatakan pendidikan pada hakikatnya adalah proses hominisasi dan humanisasi. *Hominisasi* diambil dari perbuatan manusia yang *actus hominis*, yaitu perilaku manusia yang juga dilakukan oleh binatang, misalnya makan, minum, bergerak, bermain, dan lain-lain. Pendidikan juga mempersiapkan dan mengembangkan potensi-potensi manusia secara optimal, sehingga anak juga dapat melakukan tindakan-tindakan sebagaimana tindakan dilakukan oleh binatang. Akan tetapi pendidikan tidak hanya berhenti pada hominisasi, tetapi sampai pada proses humanisasi, yaitu memanusiaikan manusia. Tindakan-tindakan hominis harus diangkat ke tataran lebih tinggi, yaitu ke arah harkat kemanusiaannya. Harkat kemanusiaannya terkait dengan pengembangan aspek akal, rasa, karsa, kemandirian dan kepada dimensi ketuhanan. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pembudayaan manusia. Pembudayaan yang terkait dengan Tuhan, sesama, dan alamnya. Hominisasi merupakan tingkat minimum, sedangkan humanisasi adalah tingkat yang lebih tinggi. Akan tetapi batas keduanya tidak ada karena sesungguhnya tidak ada hominisasi tanpa humanisasi, demikian pula sebaliknya, humanisasi tidak dapat dilakukan tanpa hominisasi.

Dalam konteks agama Islam dikenal istilah Tarbiyah yang artinya pendidikan. Rasyidin (2014: 23-24), mengatakan tujuan umum pendidikan dalam beradab/pengadaban perspektif Islam, yaitu tercapainya wujud kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan tiada akhir, kecuali sampai akhir hayat. Untuk pendidikan sepanjang hayat diperlukan konsepsi pendidikan dalam arti luas, meliputi tarbiyah yang terdiri dari tiga hal, yaitu:

1. *Ta'lim* (terkait dengan suatu majelis). Pendidikan yang dilakukan, baik secara individual maupun melalui pendidikan formal dan non formal. Oleh karena itu, diperlukan pelajaran, misalnya secara formal di sekitar masjid/sekolah-sekolah/madrasah/pesantren/sekolah tinggi berjenjang yang didirikan masyarakat/perorangan/tokoh yang bertanggung jawab dan secara non formal di lembaga-lembaga kursus/latihan non formal dan luar sekolah di masyarakat luas.
2. *Tahdzib* upaya memurnikan, yaitu agar tiap orang tetap dalam fitrahnya menjadi terdidik, terus merawat dan membina akhlak termasuk koreksi diri. Oleh karena itu, pendidikan pada akhirnya dan sewaktu melakukan pendidikan setiap orang dituntut mendidik diri sendiri
3. *Ta'dib* artinya beradab/pengadaban. Pengadaban adalah proses dan bantuan kemudahan sepanjang hayat ke arah adab akhlak mulia, nilai, dan peradaban maju untuk menuju masyarakat baru madani yang diharapkan.

Pendidikan SRA jika dicermati dari indikator-indikatornya merupakan bagian dari *tarbiyah*. Rasyidin (2014: 23), mengatakan bahwa konsep *tarbiyah* cocok untuk mengantarkan manusia mencapai tahap esensial orang muda yang matang fisik dan mental *akil-baligh asyuddun* dalam masyarakatnya yang kontekstual.

Indikator SRA sebagaimana disampaikan di atas terkait dengan teori perkembangan kepribadian anak sebagai individu seperti disampaikan Phenix (1958) dalam Rasyidin (2014: 26) sebagai berikut:

1. Melatih atau mendidik anak secara kaku dan keras berlebihan akan cenderung menghasilkan pribadi manusia muda yang gugup dan tak stabil.

2. Sikap menolak oleh orang dewasa di sekitar secara dini tanpa rasa aman akan menghasilkan reaksi anak yang asosial dan bermusuhan.
3. Tindak-tanduk dan sikap yang konsisten terhadap anak yang sedang tumbuh fisik dan mentalnya akan bersifat positif bagi perkembangan kepribadian yang terpadu dengan baik.
4. Sikap menghargai dan kasih sayang akan mendasari tumbuhnya kepribadian orang muda yang percaya diri dan bersikap penyayang.

Keempat hal di atas menjadi nilai esensial yang ada pada konsep SRA. Dengan demikian, jika implementasi kebijakan ini berhasil, maka asumsi adalah SRA akan mengembangkan kepribadian anak secara individual, sekaligus sebuah pelaksanaan *tarbiyah* yang sesuai dengan konteks tumbuh kembang anak secara optimal yang berbasis pada kemartabatan anak sebagai manusia muda yang masih terus belajar. Pendidikan pada hakikatnya adalah belajar sepanjang hayat.



3

KONSEP DASAR DAN KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK

KONSEP DASAR SEKOLAH RAMAH ANAK

Pendidikan ramah anak dapat dipraktikkan salah satunya dengan Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Pendidikan Ramah Anak dapat dimaknai sebagai suatu lembaga pendidikan yang dapat memfasilitasi dan memberdayakan potensi anak. Hal ini dapat dilakukan dengan memprogramkan sebuah rancangan pembelajaran yang menumbuhkembangkan seluruh potensi anak serta dapat melibatkan anak berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan

budaya, keluarga dan masyarakat tanpa menjadi pelaku dan korban tindak kekerasan serta diskriminasi. Oleh karena itu, sekolah harus menciptakan lingkungan yang kondusif dan edukatif.

Tujuan Sekolah Ramah Anak untuk mewujudkan satuan lembaga pendidikan yang dapat menjamin dan memenuhi hak-hak serta perlindungan anak Indonesia. Sekolah menjadi lembaga yang aman dan nyaman bagi anak. Kondisi lingkungan yang aman dan nyaman ini akan mengembangkan semua potensi anak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Sekolah Ramah Anak (SRA) diperkenalkan pada tahun 1999 oleh Bagian Pendidikan Kantor Program UNICEF di New York. Kerangka kerja Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan kerangka kerja yang didasarkan pada prinsip hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak (1990) dan instrumen hak asasi manusia internasional dan deklarasi internasional, termasuk Deklarasi Pendidikan untuk semua (1990). Kerangka SRA dimaksudkan untuk meningkatkan *child seeking, child centred, gender sensitive, inclusive, community involved, protective and healthy approaches to schooling and out of school education*. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, efisiensi dan jangkauan sistem pendidikan serta untuk memungkinkan semua anak menyadari hak mereka untuk belajar. Saat ini kerangka SRA sedang digunakan oleh banyak program negara UNICEF di semua wilayah geografis dan oleh banyak pemerintah nasional dan LSM, yang semuanya bebas menyesuaikan SRA dengan banyak konteks lokal yang berbeda (UNICEF, 2006: 3). SRA untuk mengusahakan kualitas dalam bidang berikut:

- *An inclusive school.*
- *An effective school.*

- ⚙ *A safe and protected school.*
- ⚙ *An equity and equality promoting school.*
- ⚙ *A health promoting school.*
- ⚙ *School-community linkages and partnership.*

Kerangka kerja sekolah ramah anak menurut Miske (2010: 3), memenuhi hak-hak dasar yang tercantum dalam Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), yang ditandatangani pada tahun 1989 di Turki. Kerangka tersebut meliputi:

- ⚙ *Child Friendly Schools are child centered.*
- ⚙ *They are inclusive.*
- ⚙ *They are gender equitable and celebrate all cultural backgrounds and languages.*
- ⚙ *They are effective – that is, in Child Friendly Schools children are learning and being educated.*
- ⚙ *Child Friendly Schools are protective, safe, healthy environments.*
- ⚙ *They are characterized by democratic participation.*

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tujuan dari sekolah Ramah Anak adalah mewujudkan lingkungan sekolah yang memberikan hak-hak anak sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak. Agar anak dapat sepenuhnya mendapatkan hak-haknya, maka menjadi kewajiban orang dewasa, orang tua, dan guru untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak.

UNICEF dalam *Child Friendly School Manual chapter 3* (2006: 1-2), memuat tentang tujuan utama rencana Sekolah Ramah Anak adalah:

- ⚙ *Attract students increase acces.*
- ⚙ *Improve attedance rates.*

- ⚙ *Improve retention and completion rates.*
- ⚙ *Improve learning environment.*
- ⚙ *Provide safe, inclusive, welcoming environments for all students.*
- ⚙ *Provide enabling learning environment, including accommodating children with physical and mental/learning disabilities.*
- ⚙ *Build a sense of community within the school (institutional ethos).*
- ⚙ *Involve parents and the community support and participation.*
- ⚙ *Cultivate harmony between the school and the community.*
- ⚙ *Harmonize buildings, school grounds and environment as children interact with them.*

Hakikat dari sepuluh tujuan Sekolah Ramah Anak tersebut berkaitan dengan:

1. Pengembangan kesempatan sekolah bagi setiap anak, mengurangi angka bolos sekolah, dan meningkatkan daya tahan anak untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya.
2. Pengembangan lingkungan sekolah yang nyaman untuk belajar, aman, tidak diskriminatif, dan *wellcoming* pada semua anak serta mendukung pembelajaran.
3. Membangun rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah, meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat, orang tua terhadap sekolah, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat.
4. Adanya keselarasan lingkungan, bangunan dan halaman dengan kebutuhan anak.

Kerangka Sekolah Ramah Anak ini digunakan untuk merencanakan transformasi sistem pendidikan secara keseluruhan di satu sekolah pada suatu waktu, dengan partisipasi dari semua orang untuk kepentingan

setiap anak. Kerangka kerja ini memungkinkan setiap anak perempuan, laki-laki, anak muda, dan orang dewasa mengklaim haknya untuk pendidikan dalam sebuah komunitas belajar yang berpusat pada anak, inklusif, dan berdasarkan partisipasi demokratis (Miske, 2010: 3).

Menurut Chabbot (2004) dalam UNICEF (2009: 1), prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak ini menekankan pada hak semua anak untuk mendapat pendidikan gratis dan wajib dalam *setting* yang mendorong partisipasi dan kehadiran; disiplin lembaga yang manusiawi dan adil; mengembangkan kepribadian, mengembangkan bakat dan kemampuan siswa untuk potensi mereka sepenuhnya; hak asasi manusia menghormati anak-anak dan kebebasan dasar; menghormati dan mendorong identitas budaya anak, bahasa dan nilai-nilai, serta budaya nasional dan nilai-nilai dari negara tempat anak tinggal; dan menyiapkan anak untuk hidup sebagai individu, bebas yang bertanggung jawab yang menghormati orang lain dan lingkungan alam.

Menurut UNICEF (2009: 1), tiga input lain yang membentuk perkembangan SRA adalah **pertama**, penelitian sekolah yang efektif menekankan pentingnya faktor sekolah bagi siswa yang kurang beruntung. **Kedua**, inisiatif Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk meningkatkan kesehatan yang fokus pada pentingnya *connectedness, caring and access* untuk dukungan. **Ketiga**, kepentingan UNICEF dalam pendekatan yang berpusat pada anak, keluarga, dan masyarakat untuk mengembangkan kualitas sekolah. UNICEF mengembangkan model SRA bukan sebagai konsep abstrak atau *blue print* yang kaku, melainkan sebagai (arah menuju kualitas) dalam pendidikan yang mencerminkan tiga kunci, yaitu saling terkait prinsip-prinsip yang berasal dari Konvensi Hak Anak (UNICEF, in press). Prinsip-prinsip kunci yang menggambarkan SRA antara lain:

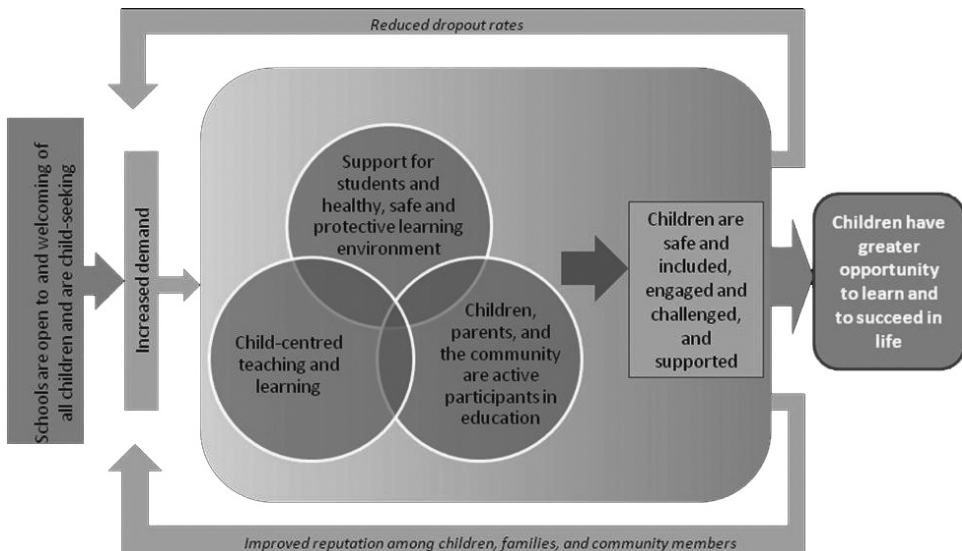
- ⚙ *inclusiveness;*
- ⚙ *child-centredness in terms of providing healthy, safe and protective learning environments; child-centredness in terms of pedagogy;*
- ⚙ *and democratic participation.*

Tabel di bawah memberikan gambaran prinsip-prinsip SRA dan fitur-fiturnya.

Tabel 3.1 *Child-Friendly School Principles and Feature*

Principle	Features of a child friendly school derived from principle
Child Centredness	<ul style="list-style-type: none"> • Child centredness paedagogy in which children are active participant, provided by reflective practitioners. • Healthy, safe and protective learning environment provide through appropriate architecture, services, policies and action.
Democratic Participation	<ul style="list-style-type: none"> • Children, families, and communities are active participants in school decision making. • Strong link among home, school and community. • Policies and services support fairness, non-discrimination and participation.
Inclusiveness	<ul style="list-style-type: none"> • Child seeking. • Inclusive and welcoming for all students. • Gender sensitive and girl friendly. • Policies and services encourage attendance and retention.

Berikut ini gambar yang menyajikan kerangka konseptual model SRA.



Gambar 3.1 SRA models as a pathway to quality education through the application of principles: child-centredness, democratic participation and inclusiveness (adopted from UNICEF, 2009: 3)

Kerangka kerja dalam gambar ini dikembangkan untuk memandu evaluasi. Gambar ini juga menunjukkan bagaimana penerapan tiga prinsip harus mengarah pada pendidikan yang berkualitas dan *outcomes* siswa yang positif. Gambar merefleksikan prinsip inklusifitas sekolah dapat diakses dan *welcoming* terhadap semua anak-anak serta mencari anak-anak. Di dalam sekolah, menerapkan pendekatan pedagogis yang berpusat pada anak dalam kesehatan, lingkungan belajar yang aman, dan protektif (melindungi) yang mendorong partisipasi demokratis anak, orang tua, dan masyarakat. Dengan ini akan anak menjadi aman dan diterima, dilibatkan dan tertantang, serta didukung, yang semuanya merupakan *outcome* penting karena anak-anak akan cenderung lebih belajar dan tetap bersekolah. Dinamika ini menyebabkan siswa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk belajar dan sukses dalam hidup. Hal ini juga menyebabkan tingkat

putus sekolah berkurang karena siswa dan keluarga mereka melihat nilai dari sekolah. Selain itu, sekolah yang sukses dipandang secara positif oleh masyarakat dan ini reputasi yang baik.

Prinsip Sekolah Ramah Anak di Indonesia seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 8 Tahun 2014 adalah:

1. Non diskriminasi, menjamin kesempatan setiap anak menikmati hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua.
2. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik.
3. Hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin perkembangan holistic serta terintegrasi setiap anak.
4. Penghormatan terhadap pandangan anak mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang memengaruhi anak di lingkungan sekolah.
5. Pengelolaan yang baik dengan menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI INDONESIA

Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Indonesia dikeluarkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 yang dimaksudkan

sebagai acuan bagi pemangku kepentingan termasuk anak dalam mengembangkan SRA sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator Kota Layak Anak (KLA). Tujuan kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah:

- Memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak melalui lingkungan sekolah.
- Menjadi panduan kabupaten/kota dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak.
- Memenuhi salah satu indikator kabupaten/kota layak anak (2014: 5).

Dalam kebijakan ini, memuat 6 komponen yang dikembangkan dalam Sekolah Ramah Anak. Keenam komponen tersebut adalah:

Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

- Pelaksanaan kurikulum.
- Pendidikan dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak.
- Sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak.
- Partisipasi anak.
- Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni.

Enam komponen tersebut memiliki indikator sebagai berikut:

1. Variabel Kebijakan Sekolah Ramah Anak
 - a. Memenuhi standar pelayanan minimal di satuan pendidikan.
 - b. Memiliki kebijakan antikekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya).
 - c. Kode etik penyelenggaraan satuan pendidikan.
 - d. Penegakkan disiplin dengan non kekerasan.

2. Indikator Pelaksanaan Kurikulum
 - a. Tersedia dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis hak anak.
 - b. Perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak.
 - c. Proses pembelajaran.
 - d. Penilaian hasil belajar yang berbasis hak anak.
3. Indikator Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak

Kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan sampai tukang kebun, komite sekolah, orang tua, pendamping ekstrakurikuler memiliki pemahaman dan keterampilan untuk mempraktikkan hak-hak anak dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
4. Sarana dan Prasarana Sekolah Ramah Anak
 - a. Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
 - b. Memiliki toilet dan kamar mandi siswa yang memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan, kemudahan termasuk kelayakan bagi disabilitas, kenyamanan dan keamanan, serta terpisah antara peserta didik laki-laki dengan perempuan (terdapat kotak sampah) pembuangan pembalut, tersedia pembalut wanita) dengan air bersih dan cukup.
 - c. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).
 - d. Sekolah adiwiyata.
 - e. Kantin sehat.
5. Partisipasi Anak
6. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pengangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan dalam kebijakan Sekolah Ramah Anak. Tim Pelaksana SRA melakukan pemantauan minimal setiap pekan. Laporan pemantauan digunakan sebagai bahan rapat evaluasi. Evaluasi SRA dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan oleh lembaga evaluasi mandiri. Hasil evaluasi menjadi masukan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, penyelenggara pendidikan, dan para pihak yang terlibat perbaikan pengembangan SRA.

Pelaksana SRA memberikan laporan pemantauan dan evaluasi kepada Subgugus Tugas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak untuk dimasukkan sebagai salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Laporan Evaluasi Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak. Pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Non diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua.
2. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik.
3. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik serta terintegrasi setiap anak.
4. Penghormatan terhadap pandangan anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang memengaruhi anak di lingkungan sekolah.

5. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

Kadarmanta Baskara Aji (2017), memandang pentingnya menciptakan ruang belajar yang ramah terhadap anak. Implementasi Sekolah Ramah Anak diwujudkan tidak hanya melibatkan lingkungan sekolah saja, melainkan keluarga dan masyarakat. Implementasi Sekolah Ramah Anak tentunya melibatkan tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Walaupun fokus kebijakan Sekolah Ramah Anak di sekolah, tetapi peran keluarga dan masyarakat sangat penting. Kekerasan atau *bullying* yang dilakukan di sekolah bisa terjadi karena pengalaman kekerasan yang dialami anak di dalam pendidikan keluarga. Anak yang memperoleh nilai jelek di sekolah biasanya dimarahi dengan kata-kata kasar atau *labelling* oleh orang tuanya. Pengalaman ini menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan bagi anak, selanjutnya anak SD kelas bawah yang masih dalam perkembangan kognitif meniru melakukan hal ini kepada teman di sekolah. Jadilah sebuah tindakan *bullying* yang estafet dari rumah ke sekolah atau dapat pula sebaliknya.

Masyarakat juga menjadi asal atau tempat yang paling rentan untuk terjadinya kekerasan. Anak-anak melihat dan mengalami anggota masyarakat melakukan tindakan buruk atau kata-kata kasar yang tidak secara positif mendukung Sekolah Ramah Anak. Oleh karena itu, kerja sama sinergis antara tri pusat pendidikan sebagaimana dinyatakan oleh Ki Hadjar Dewantara harus menjadi prioritas. Implementasi kebijakan SRA membutuhkan dukungan tri pusat pendidikan.

Konsep SRA pada hakikatnya merupakan konsep yang dapat dipakai mengeliminasi berbagai persoalan kekerasan seksual pada anak. Sebagaimana dinyatakan oleh Heryawan (2015), Kepala Daerah Jawa Barat yang mengatakan bahwa sekolah semestinya dapat dirasakan anak sebagai rumah kedua. Di rumah keduanya ini anak juga

dapat memperoleh kasih sayang dan hubungan emosional yang baik di antara warga sekolah. Saling peduli, menghargai, terbuka antarwarga sekolah akan mengeliminasi aktivitas yang membahayakan bagi anak. Akibatnya anak akan fokus pada aktivitas positif yang ada di sekolah, tidak pada aktivitas penggunaan media sosial dan *game online* yang merusak perkembangan seksual dan psikologi anak. Pengalaman ketidaknyamanan, kekerasan seksual, *bullying* akan disampaikan kepada guru sebagai pengganti orang tua di sekolah.

Penelitian terkait dengan implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak telah banyak dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan sekolah Ramah Anak merupakan kebijakan strategis untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dari tindakan diskriminasi dan kekerasan pada anak, sehingga perkembangan anak dapat berkembang dengan optimal sekaligus hak kemartabatannya sebagai manusia. Implementasi kebijakan SRA menjadi penting sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.

Implementasi kebijakan SRA tidaklah mudah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik dan non fisik yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kusuma (2017), mengatakan diperlukan 7 strategi atau langkah untuk menciptakan SRA. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Sekolah harus terbuka dan mengakui kalau ada kekerasan di sana. Selama ini pihak sekolah cenderung menutupi kekerasan di lembaganya dari dunia luar. Jika sekolah tidak mau terbuka soal kekerasan yang terjadi, maka selamanya akan menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Bagi pihak sekolah, pengakuan secara terbuka akan mengakibatkan aib bagi sekolah dan selanjutnya akan memengaruhi animo masyarakat atau orang tua memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Hal ini akan memberi citra negatif sekolah.

2. Memutus mata rantai kekerasan di sekolah. Kekerasan yang terjadi di sekolah biasanya terjadi secara turun-temurun. Sekolah secara sendiri tidak mampu untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, diperlukan peran dan komitmen pemimpinya. Dukungan kepemimpinan juga sangat diperlukan. Harus ada komitmen dari kepala sekolah, kepala dinas, bupati, dan seterusnya hingga tingkat kementerian untuk memberantas kekerasan anak. SRA menjadi PR semua pihak, terutama lembaga-lembaga pendidikan di pemerintah.
3. Pengembangan kapasitas. Artinya sekolah harus tahu bentuk kekerasan, ciri-cirinya, dan penyelesaiannya. Guru tidak boleh membiarkan siswa melakukan kekerasan maupun tindakan *bullying*. Kalau ada 1 anak nakal tidak diberi sanksi, maka besok akan ditiru banyak temannya. Diperlukan kesamaan tindakan dalam penanganan tindak kekerasan di sekolah. Sekolah harus konsisten dan tegas dalam hal penindakan.
4. Sekolah juga harus mempunyai tim kerja inklusif. Kekerasan di sekolah ini harus ditangani banyak orang. Tim kerja inklusif SRA melibatkan banyak pihak, termasuk pihak-pihak yang secara tidak langsung terkait dengan pembelajaran dan sekolah, misalnya, Puskesmas, kepolisian yang secara khusus terkait dengan penanganan kekerasan untuk anak dan perempuan;
5. Persoalan kekerasan anak di sekolah juga harus dianalisis secara kontekstual. Kita tidak hanya memberikan sanksi dan *punishment* terhadap pelaku. Pengkajian faktor lain yang menyebabkan anak melakukan tindak kekerasan, misalnya ketika siswa tawuran apakah ada provokasi dari pihak tertentu yang ingin menjatuhkan nama baik lembaga atau kepala sekolah yang menjabat saat itu? Apakah ada muatan politis di baliknya? Oleh karena tidak ada satu tindakan kekerasan yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan faktor-faktor yang lain, sebagaimana dijelaskan bahwa

kekerasan tidak mungkin dilakukan hanya dipengaruhi faktor tunggal dari pelaku.

6. Pendekatan rasional-ekologis. Harus ada pendekatan secara individu terhadap anak. Membuat siswa yang menjadi korban terbuka dan jujur terhadap apa yang dialaminya. Selain itu, juga membuat pelaku memahami jika yang dilakukan salah dan merugikan orang lain serta tidak akan mengulangnya. Upaya penyadaran dari pelaku kekerasan menjadi bagian penting dari langkah ini. Kesadaran diri bukan sekadar hukuman-hukuman fisik. Hukuman fisik justru akan melanggengkan kekerasan pada pelaku, sedangkan korban juga perlu ditangani sesuai dengan kebutuhannya. Jika perlu dilakukan pendampingan psikologis dari ahlinya.
7. Evaluasi berkelanjutan. Jangan menunggu lama sampai pertengahan semester atau akhir semester. Harus segera dievaluasi agar tidak menimbulkan korban (kekerasan anak) lagi. Evaluasi dilakukan saat terjadi kekerasan, tidak perlu menunggu waktu. Penundaan evaluasi tindak *bullying* justru akan menimbulkan dampak yang lebih negatif. Korban mendapat perlakuan kekerasan berulang dan pelaku dapat melakukan kekerasan terhadap korban lain. Evaluasi juga dilakukan secara komprehensif.

Keberhasilan implementasi SRA terkait dengan pendidikan anak dalam tiga lingkungan (tri pusat pendidikan), yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Rasyidin (2014: 176-177) mengatakan pentingnya pendidikan keluarga tidak berkurang dengan adanya institusi sekolah dan lembaga prasekolah. Terdapat 5 aspek kehidupan keluarga yang memengaruhi pembentukan ciri-ciri karakteristik pokok dari kepribadian anak dan individu, yaitu: (1) Biologis; (2) Psikologis; (3) Ekonomi; (4) Sosio-kultural; (5) Spiritual-

keagamaan. Fungsi orang tua, yaitu: (1) Melindungi kepentingan anak, termasuk kebutuhan primernya berdasarkan emosi kasih sayang yang sifatnya timbal balik; (2) Mengembangkan mental yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan fisik; (3) Mengajarkan tentang hak milik.

KONSEP MODEL SEKOLAH RAMAH ANAK DI DAERAH PESISIR

Kebijakan Sekolah Ramah Anak tingkat daerah tentunya masih perlu dijabarkan atau diinterpretasikan di tingkat satuan pendidikan. Indonesia sebagai negara maritim sudah semestinya menginterpretasi kebijakan SRA yang disesuaikan dengan konteks wilayah geografinya sebagai negara maritim. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki panjang pantai yang kemudian disebut dengan pesisir. Kebijakan SRA di daerah pesisir mendesak untuk dilakukan karena beberapa argumentasi yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai karakter respek, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.
2. Nilai-nilai yang baik perlu dikenalkan dan dibiasakan pada anak melalui lingkungan sekolah yang aman, nyaman, berkesetaraan, dan sehat bagi anak-anak.
3. Peran guru sangat penting mengingat guru sebagai teladan dan pengganti orang tua anak di sekolah.
4. Sekolah Ramah Anak dan penanaman nilai-nilai saling respek dapat mencegah kekerasan dan *bullying* yang terjadi di sekolah.
5. Budaya pesisir mempunyai kekhasan tersendiri, sehingga perlu digali dan dikembangkan untuk memperkuat pembelajaran dan kepribadian peserta didik.
6. Dampak negatif dari lingkungan pesisir sebagai tempat pariwisata perlu diantisipasi melalui pendidikan yang ramah anak.

7. Kemitraan sekolah dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan sekolah yang ramah anak.
8. Inklusifitas dalam pendidikan di sekolah menjadi salah satu dasar sekolah ramah anak.

KONSEP SEKOLAH RAMAH ANAK DI WILAYAH PESISIR DIY

Konsep Sekolah Ramah Anak di wilayah pesisir ini merupakan hasil eksplorasi persepsi guru dan kepala sekolah dasar yang telah lama mengajar di kawasan pesisir DIY. Konsep ini penting mengingat daerah pesisir di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang masih kurang mendapatkan perhatian dalam pengembangan sekolah ramah anak, padahal masalah kenyamanan, keamanan, dan lingkungan yang sehat di sekolah merupakan hak setiap anak di mana pun berada, tak terkecuali anak-anak di daerah pesisir.

Konsep Sekolah Ramah Anak di wilayah pesisir DIY merupakan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak dengan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Mengenalkan dan membiasakan anak dengan nilai-nilai yang baik melalui lingkungan sekolah yang aman, nyaman, berkesetaraan, dan sehat bagi anak-anak.
2. Guru berperan sebagai teladan dan pengganti orang tua anak di sekolah.
3. Menanamkan nilai-nilai saling respek untuk mencegah kekerasan dan *bullying* yang terjadi di sekolah.
4. Menggali dan mengembangkan budaya pesisir yang mempunyai kekhasan tersendiri dengan memperkuat pembelajaran dan kepribadian peserta didik.

5. Mengantisipasi dampak negatif dari lingkungan pesisir sebagai tempat pariwisata melalui pendidikan yang ramah anak.
6. Menggunakan kemitraan sekolah dan masyarakat untuk menciptakan sekolah yang ramah anak.
7. Inklusifitas dalam pendidikan di sekolah menjadi salah satu dasar Sekolah Ramah Anak.

Sekolah Ramah Anak di masyarakat pesisir Gunungkidul bersifat spesifik. Konsep Sekolah Ramah Anak pada awalnya mengacu pada berbagai kajian UNICEF, akan tetapi konsep yang dikembangkan bersifat spesifik untuk masyarakat pesisir di Indonesia dengan indikator-indikator spesifik di samping indikator yang bersifat umum. Pengembangan indikator Sekolah Ramah Anak didasarkan pada konteks masyarakat pesisir DIY yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Lingkungan Alam

Kawasan pesisir sebagaimana wilayah DIY lainnya merupakan kawasan rawan gempa. Terlebih lagi jika terjadi gempa dengan kekuatan besar, maka daerah pesisir menjadi kawasan rawan tsunami seiring dengan perubahan pengelolaan kawasan pesisir menjadi kawasan wisata seperti di Gunungkidul. Perubahan sosial ekonomi ini dapat membawa implikasi positif maupun negatif. Perubahan yang terjadi karena alih fungsi lahan penting untuk diantisipasi oleh dunia pendidikan dengan konsep dan praktik Sekolah Ramah Anak yang memperhatikan:

- a. Pendidikan kesiapan, mitigasi, dan resiliensi bencana alam: gempa/tsunami, longsor.
- b. Pendidikan alih fungsi lahan agar berdampak positif pada anak.
- c. Pendidikan pelestarian alam termasuk *geopark*.

- d. Pendidikan sadar wisata untuk menjadi tuan rumah di wilayah negeri sendiri (ingat pernah ada “sapta pesona” wisata); tidak menjadi korban atau penonton aktivitas budaya/ekonomi wisata yang cenderung menimbulkan kecemburuan sosial.
- e. Pendidikan dengan kompetensi dan komitmen untuk berinteraksi dengan alam yang bersifat positif: aman (menghadapi ombak dan palung), pembudidayaan potensi laut dan pantai, pelestarian keseimbangan ekologi.

2. Kondisi Budaya Ekonomi dan Kesempatan Kerja Serta Ketenagakerjaan

Alih fungsi lahan memunculkan lapangan kerja baru yang berdampak pada pelibatan anak menjadi pekerja, seperti tukang parkir kawasan wisata, perajin, berjualan souvenir dan makanan, penunggu tambak. Munculnya lapangan pekerjaan baru dan susutnya beberapa lapangan pekerjaan tertentu sebagai dampak kepariwisataan, industri kelautan, dan alih fungsi lahan perlu diantisipasi dengan Sekolah Ramah Anak yang memperhatikan hak-hak anak.

3. Kondisi Budaya Sosial Kemasyarakatan

Kedatangan wisatawan domestik maupun asing dengan budayanya memberikan dampak pada perubahan nilai-nilai, cara berpikir, pola-pola perilaku, dan gaya hidup yang positif maupun negatif. Pengaruh negatif pada budaya lokal dan dampak buruk pada anak perlu diantisipasi dengan Sekolah Ramah Anak yang memperhatikan:

- a. Kearifan lokal dalam berbagai bidang.
- b. Adat istiadat.
- c. Kelompok kekerabatan.

4. Kondisi Budaya Politik dan Kekuasaan

Dengan mempertimbangkan kawasan pesisir yang tengah mengalami perubahan, untuk mengantisipasi dampak negatif perubahan tersebut pada pendidikan anak diperlukan kebijakan dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi politik. Komponen-komponen pemilik kekuasaan dan politik perlu dilibatkan dalam pengembangan sekolah dan pendidikan ramah anak. Dengan pelibatan berbagai komponen ini akan tercipta budaya demokratis dalam masyarakat, khususnya sekolah. Membentuk paguyuban di lingkungan masyarakat kawasan pesisir mendesak dilakukan sebagai organisasi yang akan mengimplementasikan kebijakan di tingkat satuan pendidikan.

5. Kondisi Lingkungan, Komunikasi, dan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dialami pula oleh anak-anak di kawasan pesisir. Hal ini memberikan peluang anak-anak untuk mengakses informasi. Hanya saja informasi yang diakses oleh anak-anak sering kali informasi negatif yang merugikan, bahkan merusak mental dan moral anak. Oleh karena itu, Sekolah Ramah Anak mengembangkan pendidikan pada anak agar anak dapat mengakses informasi dengan etika teknologi, sehingga dapat memilih dan mengambil manfaat dari perkembangan teknologi informasi tersebut. Informasi yang diakses menjadi sumber belajar anak.

PENDIDIKAN RAMAH ANAK DI KAWASAN PESISIR

Untuk mewujudkan sekolah ramah anak di daerah pesisir tidak terlepas dari pendidikan yang ramah anak, baik di rumah maupun di sekolah. Pendidikan ramah anak berfungsi memfasilitasi (menginspirasi,

mendukung, mendorong) sehingga anak memiliki kemampuan (pengetahuan, sikap, keterampilan), dan komitmen untuk melakukan aktivitas diri dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan alam sekitar, yaitu:

- ✿ Konservasi atas hal-hal positif.
- ✿ Transformasi atas hal-hal yang negatif.

Sehubungan dengan fungsi tersebut, indikator Sekolah Ramah Anak mencakup berbagai hal berikut:

1. Perubahan yang diharapkan terjadi. Sekolah memiliki wawasan bahwa generasi anak kelak dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pesisir, dan menjaga kelestarian lingkungan alam-sosial-budaya. Anak tidak hanya *act locally & think globally*, tetapi *act & think both locally & globally*. Pelaku bisnis wisata itu menjual lokalitas autentik dalam konteks industri pariwisata global.
2. Komitmen untuk menghasilkan luaran yang mampu menghasilkan perubahan tersebut dengan cara:
 - a. Mengembangkan kurikulum berbasis kebutuhan anak dan kondisi lingkungan masyarakatnya.
 - b. Membangun sinergi antara sekolah, guru, masyarakat, komite sekolah, dan dinas pendidikan untuk mewujudkan luaran tersebut.
3. Komitmen untuk menghidupkan dan melaksanakan proses-proses pendidikan yang memungkinkan terjadinya luaran yang diharapkan tersebut dengan cara:
 - a. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik, guru sebagai *role model*, berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat sekitar.

- b. Menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang berbasis lingkungan budaya.
 - c. Mengadvokasi kebijakan pendidikan yang mendukung sekolah dan pendidikan ramah anak.
4. Komitmen untuk menyediakan berbagai komponen yang dibutuhkan untuk dapat terjadinya proses-proses yang diharapkan tersebut dengan:
- a. Prinsip *inclusiveness* terhadap anak dengan berbagai kondisi (anak berkebutuhan khusus), latar belakang dan kondisi sosial, ekonomi, etnis, agama, budaya, dan gender.
 - b. Prinsip pendidikan yang berpusat dan prinsip pendidikan yang demokratis.
 - c. Prinsip pengasuhan orang tua yang sejalan dengan pendidikan di sekolah dan sebaliknya.
 - d. Prinsip partisipatif dari orang tua, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya dalam pendidikan ramah anak.
 - e. Prinsip lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak.



4

PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK BERBASIS KAWASAN

PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI BERBAGAI NEGARA

Berbagai penelitian pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) telah dilakukan di berbagai negara, antara lain Thailand, Filipina, Nigeria, Cina, dan Chambodia. Dalam pengembangan SRA, mereka mendasarkan pada prinsip kunci yang dapat ditafsirkan dan diterapkan dalam berbagai konteks. Identifikasi fitur disesuaikan dengan karakteristik SRA. Setelah fitur ini ditentukan, mereka dapat menggunakan untuk mengembangkan standar SRA di provinsi, kabupaten, atau negara. Selain menjadi model yang lebih koheren, *predicable*, dan logis, pendekatan ini meningkatkan proses demokrasi dari dialog dan konsultasi dalam menafsirkan prinsip utama dan pengaturan standar (UNICEF, 2009, 2.2, p.3).

Pengembangan Sekolah Ramah Anak berdasarkan pada prinsip kunci yang tertuang dalam (UNICEF, 2009, 2.2, p.3) adalah:

"...key principles with clear origins that can be interpreted and applied in a variety of contexts to identify appropriate features or characteristics of SRA. Once these features have been determined, they can be used to develop SRA standards in a given district, province or country. In addition to being a more coherent, predicable and logical model, this approach promotes a democratic process of dialogue and consultation in the interpretation of leading principles and the setting of standards. It discourages mechanical application of a given set of fixed characteristics."

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh UNICEF dalam Irvine and Harvey (2010: 5), menunjukkan bahwa di Cina standar SRA ditemukan dalam empat dimensi, yaitu: 1) *Inclusiveness and Equality*; 2) *Effective Teaching and Learning*; 3) *Safe, Healthy, and Protective*; and 4) *Participation and Harmonization*. Thailand memiliki pengalaman yang cukup dengan SRA di tingkat lokal yang mendasarkan pada pengintegrasian perspektif yang berbeda dari anak, orang tua, guru, manajer, dan tokoh masyarakat. Anak-anak mungkin berpikir SRA menarik dalam hal relevan dengan kurikulum, pembelajaran partisipatif, disiplin, dan lain-lain. Tokoh masyarakat dan orang tua cenderung lebih fokus pada fasilitas sekolah, peralatan, komunikasi, kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan tantangan inklusifitas. Thailand juga telah memperluas cakupan SRA ke sekolah menengah, sehingga partisipasi menjadi lebih signifikan. Thailand dengan dukungan universitas dan UNICEF juga memiliki *Student Management Information System* (SMIS). SRA dilihat sebagai *local consensus-building* yang didukung oleh sumber daya, kebijakan, peraturan, dan kerangka kerja hukum nasional.

Perencanaan lokal juga berkembang baik di Filipina, SRA telah memengaruhi hukum nasional dan kebijakan tentang hak-hak anak

serta kewajiban dari berbagai pengemban tugas, selain itu *link* SRA ke EFA, MDGs dan rencana desentralisasi serta kebijakan. Pemerintah Filipina juga telah berevolusi dengan “*student tracking system*.” Thailand dengan dukungan universitas dan UNICEF juga memiliki *Student Management Information System (SMIS)*. Kedua negara melihat SRA sebagai konsensus pembangunan (*local consensus-building*) yang didukung oleh sumber daya, kebijakan, peraturan, dan kerangka kerja hukum nasional.

Filipina dan Thailand adalah negara-negara yang telah menerapkan SRA sejak akhir 1990-an dan SRA diimplementasikan sebagai strategi nasional untuk reformasi sekolah, dan telah memiliki banyak sekolah yang menyadari tujuan SRA. Survei dan data observasi menunjukkan keberhasilan sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada anak, guru, dan orang tua telah membuktikan perubahan hasil. Departemen Pendidikan kedua negara telah menerapkan kerangka SRA sebagai strategi pendidikan. Di sisi lain, UNICEF baru saja mulai mendukung inisiatif SRA di Afrika Selatan, meskipun evaluasi menunjukkan bahwa inisiatif SRA di Afrika Selatan memiliki banyak tantangan untuk mengatasi tujuan SRA diintegrasikan ke dalam strategi Kementerian Pendidikan.

Hasil penelitian evaluatif yang dilakukan oleh UNICEF (2009) dalam evaluasi program *child friendly school* di Nigeria menggunakan 12 indikator untuk memberikan penilaian pada sekolah. Kedua belas indikator tersebut adalah

- ⚙ *An environment that reflects and realises the right of every child.*
- ⚙ *An environment that sees and understands the whole child.*
- ⚙ *An environment that is child centred.*
- ⚙ *An environment that is gender sensitive and girls friendly.*
- ⚙ *An environment that promote quality learning outcomes.*

- ⚙️ *An environment that provides education based on the reality of children lives.*
- ⚙️ *An environment that responds it diversity and that acts to ensure inclusion, respect and equality of opportunities for all children.*
- ⚙️ *An environment that promote mental and physical health.*
- ⚙️ *An environment that provides and affordable and accesible education.*
- ⚙️ *An environment that enhance teacher capacity,morale, commitment and status.*
- ⚙️ *An environment that is family focused.*
- ⚙️ *A school that is community based.*

Dalam laporan evaluasi yang dilakukan UNICEF (2009: 14-16), keenam negara (Thailand, Filipina, Nigeria, Guyana, Cambodia, dan Nicaragua) yang menerapkan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk melakukan peninjauan kembali dari penelitian UNICEF sebelumnya, dan literatur tentang SRA menemukan bahwa SRA dalam konteks yang berbeda-beda berhasil menerapkan tiga prinsip utama SRA, yaitu *inclusiveness, child-centredness and democratic participation*. Sekolah beroperasi dalam konteks nasional yang sangat berbeda dengan berbagai tingkat sumber daya dan melayani populasi dengan kebutuhan yang berbeda. Sekolah yang memiliki tingkat partisipasi tinggi dari keluarga dan masyarakat serta menggunakan pendekatan pedagogi berpusat pada anak (*child centred pedagogical approaches*) memiliki kondisi lebih kuat untuk belajar, yaitu siswa merasa lebih aman, didukung dan terlibat, dan percaya bahwa orang dewasa di sekolah mendukung inklusi dan keberhasilan setiap siswa. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa model SRA fleksibel, dapat disesuaikan dengan konteks yang berbeda, heuristik, dan secara luas tepat. SRA bukan sebuah *blue print* dan dapat diimplementasikan dengan cara yang berbeda dengan berbagai tingkat dukungan, tergantung pada kebutuhan lokal.

Inisiatif SRA efektif dalam melibatkan para *stakeholder* di semua tingkat sistem pendidikan dalam menciptakan sekolah-sekolah dengan kondisi yang merefleksikan keefektifan, pengajaran dan pembelajaran yang berfokus pada anak, dan mendorong pendidik untuk berpikir tentang bagaimana melayani seluruh anak. Kepala sekolah dan guru di semua negara yang dikunjungi “berbicara dengan bahasa” dari SRA. Konseptualisasi SRA tampaknya melekat pada para pemangku kepentingan yang membantu memahami kebutuhan dalam mengatasi seluruh anak dengan cara mewujudkan prinsip-prinsip *inclusiveness, child centredness, and democratic participation*. Dalam wawancara dengan guru petugas UNICEF mendengar (kecuali pada satu sekolah) secara umum mendukung prinsip-prinsip SRA. Mereka antusias dalam dukungan mereka terhadap cita-cita SRA dan berkomitmen untuk berjuang mewujudkan SRA, bahkan dalam keadaan yang menantang. Hal ini menyatakan bahwa SRA harus secara efektif melibatkan para pemangku kepentingan merupakan elemen penting dalam pelaksanaan model SRA. Sering kali ketika ditanya guru, kepala sekolah, dan keluarga yang memiliki beberapa perspektif komparatif menyatakan bahwa SRA mengubah cara mereka dan orang lain dalam berpikir tentang pendidikan.

Inisiatif SRA telah memberikan kerangka kerja pada Kementerian Pendidikan yang bermanfaat dan kerangka kerja yang relevan untuk meningkatkan pendidikan yang memperbaiki perkembangan anak karena inklusif, partisipatif, dan responsif. Kementerian mendukung dan menerapkan prinsip-prinsip model SRA untuk berbagai tingkat. Lebih dari separuh (54%) pegawai dari UNICEF Pendidikan melaporkan bahwa negara-negara telah mengintegrasikan inisiatif SRA ke dalam strategi pendidikan.

Pada negara-negara yang SRA lebih mapan dan lebih berhasil dibandingkan dengan negara-negara yang baru memulai membuat SRA atau belum mengintegrasikan inisiasi SRA ke dalam strategi

kementerian. Petugas UNICEF Pendidikan menunjukkan bahwa UNICEF mengumpulkan dan menggunakan data SRA. Namun, mereka tidak dapat memperoleh data tingkat sekolah yang terkait dengan tujuan kunci SRA (misalnya kehadiran dan tingkat putus sekolah) untuk dievaluasi dari kantor negara UNICEF. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak dikumpulkan secara teratur atau dapat diakses oleh kantor UNICEF. Dalam beberapa kasus sistem informasi manajemen pendidikan nasional mungkin tidak operasional secara penuh atau tidak dikelola secara sistematis.

URGENSI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK BERBASIS KAWASAN

Pendidikan tidak dapat berlangsung di ruang hampa. Pendidikan berlangsung dalam suatu lingkungan masyarakat yang mempunyai karakteristik tertentu. Ruang dan waktu dalam konteks sosio-budaya masyarakat merupakan ruang hidup yang bergerak dinamis, seiring perkembangan pemikiran manusia dan peningkatan peradaban. Oleh karena itu, pengembangan sekolah berbasis kawasan merupakan keniscayaan.

Ada lima isu pendidikan di Indonesia yang sampai sekarang masih menjadi masalah yang harus terus dipecahkan dengan berbagai pendekatan dan metode, baik pada skala makro, meso, maupun mikro. Lima isu tersebut adalah pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, relevansi pendidikan, efisiensi pendidikan, dan efektivitas pendidikan. Berbagai kebijakan terus digulirkan oleh pemerintah terkait isu-isu tersebut. Hanya saja keluasan wilayah dan kompleksitas masalah terkadang membuat berbagai kebijakan hanya diimplementasikan secara parsial, sehingga terasa kurang maknanya dalam upaya pengembangan pendidikan, terutama di sekolah.

Pengembangan sekolah merupakan bagian penting dari upaya terus-menerus untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengembangan sekolah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa pengembangan sekolah hendaknya dilakukan secara bersama-sama oleh segenap pemangku kepentingan, baik yang bersifat *“top down policy”* maupun *“bottom up policy.”*

Sekolah Ramah Anak semula adalah konsep dari UNICEF yang diadopsi di Indonesia mengingat pendidikan formal (sekolah) di Indonesia juga sering mengabaikan hak-hak anak. Sejatinya, hak-hak anak dapat dimiliki anak sesuai kodratnya sebagai anak. Namun dalam kenyataannya, banyak hak anak yang tidak teraktualisasi dalam kehidupannya yang disebabkan orang dewasa. Banyak guru maupun orang tua kurang memberikan hak-hak tersebut, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya untuk menjadi manusia dewasa susila mengalami hambatan, baik fisik maupun mental spiritual.

Pengembangan Sekolah Ramah Anak digagas sebagai upaya untuk meningkatkan perhatian, kepedulian, perlakuan terhadap anak-anak Indonesia terutama di daerah yang mengalami anomali, sehingga diharapkan anak-anak Indonesia akan memperoleh haknya secara proporsional yang pada gilirannya akan berdampak pada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup anak-anak tersebut sebagai bagian penting dari generasi muda Indonesia emas.

Sebagaimana telah dinyatakan pada awal tulisan ini bahwa pendidikan selalu dalam konteks suatu sistem budaya dan lingkungan hidup tertentu. Demikian pula pengembangan sekolah ramah anak hendaknya disesuaikan pula dengan lingkungan hidup tempat tinggal anak-anak dan sekolahnya. Dalam lingkungan yang menjadi ruang hidupnya itulah diharapkan sebagian besar anak akan menjalani kehidupannya ketika dewasa kelak dengan kehidupan yang lebih baik dibanding masa sekarang.

Lingkungan kawasan menjadi ruang hidup masyarakat yang anak-anak juga menjadi bagiannya, perlu diupayakan agar menjadi lingkungan yang baik, yang positif bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan rohani anak itu sendiri. Oleh sebab itu, pengembangan Sekolah Ramah Anak yang berbasis kawasan menjadi penting untuk dilaksanakan agar hasilnya menjadi optimal dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kepribadian anak dan kawasan itu sendiri.

Pengalaman di berbagai daerah Indonesia menunjukkan bahwa pengembangan kawasan sering tidak memperhatikan pentingnya menjaga dan mengembangkan hak-hak anak, terutama pengembangan wilayah menjadi kawasan industri seperti industri barang maupun jasa (pariwisata). Demikian pula sebaliknya, implementasi kebijakan sekolah terkadang tidak sejalan dengan lingkungan dan kawasan tempat anak itu hidup. Sebagai contoh, pengembangan kawasan pantai sebagai destinasi baru pariwisata telah mendatangkan "kesuksesan" dari sisi ekonomi, tetapi tidak demikian halnya dengan pendidikan anak-anak. Jika tidak dipikirkan dengan saksama, perkembangan di satu aspek tampak menguntungkan dan membahagiakan, tetapi sebenarnya banyak kerugian dari sisi yang lain. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan berbagai kebijakan yang terkait dengan aspek-aspek yang dinamis berkembang, termasuk di dalamnya pengembangan kebijakan pendidikan berbasis kawasan.

Suatu kebijakan mempunyai makna intensional, sehingga pengembangan kebijakan pendidikan dilakukan dengan berangkat dari kehendak baik sebagai suatu proses pemberdayaan peserta didik. Kebijakan pendidikan terletak dalam tatanan normatif dan tatanan deskriptif (Tilaar & Riant Nugroho, 2016: 140). Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan deliberasi mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Proses pendidikan sebagai proses pemanusiaan terjadi

dalam lingkungan alam serta lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi dan misi pendidikan dalam masyarakat tertentu. Demikian pula kebijakan pendidikan mengenai Sekolah Ramah Anak.

Satu poin penting dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak berbasis kawasan adalah pelibatan berbagai pihak, sehingga diperoleh upaya terpadu pengembangan kawasan secara berkelanjutan. Dalam kaitan ini, berbagai pemangku kepentingan hendaknya duduk bersama untuk merumuskan kebijakan Sekolah Ramah Anak. Dengan demikian, kebijakan sekolah ramah anak menjadi kebijakan bersama.

PENGEMBANGAN VARIABEL DAN INDIKATOR SEKOLAH RAMAH ANAK DI KAWASAN PESISIR

Daerah pesisir di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang masih kurang mendapatkan perhatian dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak. Terlihat dalam program yang diselenggarakan oleh Plan Indonesia tidak satu pun berada di daerah pesisir, padahal masalah kenyamanan, keamanan, dan lingkungan yang sehat di sekolah merupakan hak setiap anak di mana pun berada tak terkecuali anak-anak di daerah pesisir.

Beberapa argumentasi dapat dijelaskan terkait dengan kawasan pesisir sebagai berikut:

1. Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang duapertiga wilayah terdiri dari lautan terbentang dari Sabang sampai Merauke memiliki corak dan sifat tersendiri. Sifat dan corak ini tentunya memerlukan perhatian dan penanganan khusus dalam upaya pembangunan wilayah pada umumnya dan pendidikan pada khususnya.

2. Pembangunan wilayah strategis pada saat ini difokuskan pada konsep negara maritim. Membangun negara maritim yang kuat perlu sumber daya manusia, khususnya keterlibatan masyarakat pesisir untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Penyiapan sumber daya manusia pesisir melalui pendidikan menjadi hal yang mendesak untuk segera dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan pendidikan ramah anak di kawasan pesisir.
3. Selama ini sekolah-sekolah dasar di kawasan pesisir kurang memperoleh akses dalam upaya peningkatan atau perbaikan mutu. Hal ini disebabkan sekolah-sekolah ini jauh letaknya dari Dinas Pendidikan yang berlokasi di pusat pemerintahan daerah. Selain itu, sekolah-sekolah kawasan pesisir kurang mendapat perhatian dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi.
4. Budaya kawasan pesisir memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang dapat digali dan dikembangkan menjadi acuan dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak yang sesuai dengan konteks wilayah dan budaya. Menggali kembali nilai-nilai tradisional menjadi urgen ketika pembangunan pendidikan yang selama ini terjadi kecenderungan bersifat teknokratis yang justru merusak lingkungan hidup.
5. Peserta didik sekolah dasar kawasan pesisir merupakan bagian dari masyarakat yang sangat rentan terhadap bencana alam, khususnya gempa besar di lautan yang menimbulkan tsunami. Penelitian Sekolah Ramah Anak di kawasan pesisir ini merupakan penelitian awal dari serangkaian penelitian yang nantinya dapat dikaitkan dengan pendidikan mitigasi bencana tsunami. Bencana tsunami yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan tidak dapat diprediksi secara tepat oleh ilmu pengetahuan modern dapat

dieliminasi dampak negatifnya secara dini dengan cara pandang dan edukasi yang sesuai dengan kultur dan kondisi geografis kawasan pesisir.

Daerah pesisir DIY meliputi wilayah Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul. Ketiga kabupaten ini memiliki area pesisir dengan karakteristik masing-masing. Pesisir di kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan wisata alam yang sedang berkembang pada lima tahun terakhir. Perkembangan daerah wisata baru dengan kunjungan wisatawan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun memberikan perubahan pada kondisi sosial, ekonomi, maupun pendidikan masyarakat terdampak wisatawan. Perubahan dari masyarakat petani kepada masyarakat pariwisata menimbulkan keterkejutan budaya bagi masyarakat yang belum siap menghadapi atau tidak dipersiapkan sebelumnya.

Pesisir Kabupaten Bantul dengan kawasan Parangtritis, Parangkusumo, dan Kwaru merupakan kawasan wisata lama dengan kekhasan sebagai tempat dengan mitos-mitos tertentu yang berhubungan dengan nilai-nilai religius tradisional. Juga sarat dengan kehidupan remang-remang di daerah pesisir. Lain halnya dengan pesisir pantai di Kabupaten Kulonprogo dengan karakteristik pesisir dengan tambak udang yang sedang berkembang dan kawasan wisata yang telah lama, namun tak cukup signifikan perkembangannya.

Karakteristik setiap kawasan pesisir ini berdampak pada kekhasan tata nilai, sosial, budaya, ekonomi, dan politik/kebijakan, teknologi dan informasi serta pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar pantai secara umum. Secara khusus berdampak pula pada pendidikan anak-anak sekolah dasar. *Focus Group Discussion* yang dilakukan dengan para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dasar di ketiga kawasan tentang Sekolah Ramah Anak (SRA) bagi anak di kawasan pesisir menunjukkan bahwa sekolah di kawasan pesisir belum

menjadi Sekolah Ramah Anak. Banyak hal yang menjadi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia perkembangannya terganggu oleh situasi yang tidak menguntungkan anak.

Dengan adanya perkembangan wisata alam di kawasan Kabupaten Gunungkidul, kawasan wisata religius tradisional di Kabupaten Bantul dan kawasan pertambakan di Kabupaten Kulonprogo, anak-anak perlu mendapatkan perhatian lebih serius dalam dunia mereka di sekolah dan di rumah agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan keharusannya. Oleh karena itu, mengembangkan konsep Sekolah Ramah Anak di kawasan pesisir menjadi penting dan menarik.

Pengembangan indikator Sekolah Ramah Anak di kawasan pesisir dilakukan pada guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dasar terdapat 5 prinsip dasar Sekolah Ramah Anak di kawasan pesisir, yaitu:

- ❁ Pembelajaran yang berpusat pada anak.
- ❁ Lingkungan yang ramah anak.
- ❁ Pengasuhan (*parenting*).
- ❁ Partisipasi demokratis.
- ❁ Inklusifitas.

Lima prinsip hipotetik tersebut merupakan hasil analisis penelitian terhadap data yang dikumpulkan dengan FGD bersama guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dasar di kawasan pesisir. Dari kelima prinsip dikembangkan ke dalam variabel dan setiap variabel dikembangkan indikator. Hasil analisis variabel dan indikator sebagai berikut:

1. Prinsip Pembelajaran yang Berpusat pada Anak

Pembelajaran berpusat pada anak berarti pembelajaran dan semua aspek yang menyertainya sesuai dengan anak. Sesuai

dengan anak berarti pembelajaran cocok dengan kebutuhan, kemampuan, kondisi mental, psikologis, dan sosial anak serta sesuai pula dengan gaya belajar anak. Oleh karena itu, guru harus benar-benar mengenali dan memahami kondisi setiap peserta didik. Dengan memahami kondisi peserta didik, guru menyusun skenario pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan sama kepada setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan latar yang dimilikinya.

Dalam pembelajaran berpusat kepada anak, anak sebagai subjek belajar dan guru sebagai subjek mengajar. Interaksi antarsubjek dengan nilai-nilai baik yang mendasarinya ini menghasilkan pembelajaran yang berpusat pada anak. Sebagai subjek belajar anak membangun pengetahuan, sikap, dan perilakunya melalui interaksinya dengan guru sebagai subjek mengajar. Anak sebagai subjek, banyak alternatif pilihan yang dilakukan dan guru memberikan layanan atas kebutuhan anak. Sebaliknya dominasi guru dalam pembelajaran akan berdampak pada berkurangnya hak-hak anak untuk menjadi pembelajar.

Pembelajaran yang berpusat pada anak merupakan proses belajar mengajar yang diharapkan dilakukan di sekolah oleh guru dan siswa pada sekolah-sekolah di kawasan pesisir. Pembelajaran yang berpusat pada anak dikembangkan ke dalam lima variabel, yaitu:

- ❁ Pembelajaran kontekstual.
- ❁ Pendekatan, metode dan media yang berpusat pada anak.
- ❁ Memperhatikan individual.
- ❁ Keteladanan guru.
- ❁ Peraturan Sekolah Ramah Anak.

Dari kelima variabel tersebut dikembangkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diamati dan diukur di Sekolah Ramah Anak. Adapun indikator setiap variabel sebagai berikut:

a. Indikator Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual menurut Johnson, (2002: vii) merupakan sistem instruksional yang mendasarkan pada filsafat bahwa anak belajar ketika mereka melihat makna (*meaning*) di dalam materi akademis dan ketika mereka melihat dalam tugas sekolah mereka mampu menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan utamanya dan pengalaman yang mereka miliki. Dari variabel pembelajaran kontekstual meliputi 10 indikator sebagai berikut:

- 1) Materi kebencanaan (gempa, longsor, dan tsunami) menjadi tema pembelajaran yang terintegrasi pada mata pelajaran.
- 2) Di sekolah diberikan praktik penyelamatan diri dari kebencanaan (gempa, tsunami, longsor).
- 3) Anak diberikan pembelajaran kewirausahaan sederhana dengan memanfaatkan potensi di daerah pantai.
- 4) Sekolah memberikan pelajaran kepariwisataan pantai manfaat dan dampaknya terintegrasi dengan pelajaran yang lain.
- 5) Anak diperkenalkan dengan bahasa daerah, nasional, dan internasional yang berkaitan dengan budaya pantai.

- 6) Pembelajaran di sekolah berbasis budaya menggunakan lagu dan dolanan tradisional anak daerah pantai untuk pendidikan budi pekerti.
- 7) Di sekolah anak dibiasakan untuk melakukan tugas-tugas sekolah yang sama tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan.
- 8) Di sekolah diberikan pendidikan untuk mengenal identitas diri sebagai anak laki-laki dan sebagai anak perempuan secara biologis.
- 9) Anak di sekolah diajarkan cara-cara menggunakan *handphone* dan internet.
- 10) Di sekolah anak diajarkan etika penggunaan telepon seluler dan internet.

b. Indikator Pendekatan, Metode, dan Media yang Berpusat pada Anak

Pendekatan, metode, dan media berpusat pada siswa maksudnya adalah pembelajaran yang berpusat pada anak (*student centered*). Suatu model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar. Dalam pembelajaran ini pendekatan, metode, ataupun media sesuai dengan kebutuhan, minat, kemampuan, dan gaya belajar anak di kawasan wisata pesisir.

Agar pembelajaran berpusat kepada anak-anak di kawasan pesisir maka dalam Sekolah Ramah Anak menggunakan pendekatan, metode, dan media yang ramah dengan anak-anak pesisir, yaitu:

- 1) Peristiwa bencana alam (gempa, tsunami, longsor) menjadi sumber belajar bagi anak-anak sekitar.

- 2) Penggunaan metode bermain peran untuk pembelajaran mitigasi bencana.
- 3) Penggunaan bahan lokal (kerang, kece, dan lain-lain) yang dapat bernilai ekonomis sebagai bahan pembelajaran di sekolah.
- 4) Anak diberikan tugas proyek untuk berjalan di pantai dengan bimbingan guru.
- 5) Guru memberikan tugas kelompok dan individual dalam tugas proyek.
- 6) Anak diajak untuk mengunjungi temannya yang mendapatkan musibah (sakit, kematian anggota keluarga, mendapat bencana).
- 7) Pengelolaan waktu belajar anak mengikuti rutinitas kehidupan pantai.
- 8) Kehidupan rutin anak di daerah pantai sebagai media penyadaran anak tentang hak dan kewajiban belajar.
- 9) Menggunakan LCD, laptop, telepon seluler sebagai media pembelajaran secara tepat dan benar.
- 10) Menggunakan internet sebagai sumber pembelajaran secara bijak.

c. Indikator Memperhatikan Perbedaan Individual

Tidak ada dua individu yang sama meski mereka kembar identik, sehingga dalam menciptakan Sekolah Ramah Anak penting memperhatikan perbedaan individual anak. Setiap anak berbeda dan memiliki karakteristiknya masing-masing. Sekolah Ramah Anak berarti:

- 1) Guru mengenali latar belakang pekerjaan orang tua (petani, nelayan, pedagang di pantai, dan sebagainya).

- 2) Sekolah mengidentifikasi kemampuan fisik, seni, dan intelektual untuk memberikan pendampingan sesuai kemampuan anak.
- 3) Dalam pembelajaran memperhatikan tingkat kemampuan anak.
- 4) Pembelajaran memperhatikan minat dan bakat anak.
- 5) Pembelajaran berbasis kelompok dan menekankan proses serta proyek.
- 6) Sekolah melakukan pendampingan pada anak yang bermasalah agar tidak memengaruhi kelompok.
- 7) Ada pendidikan etiket/sopan santun relasi laki-laki dan perempuan.
- 8) Sekolah memberikan pendidikan seksual yang sesuai untuk anak SD.
- 9) Sekolah memberikan pembelajaran tentang bahaya miras dan rokok pada anak.
- 10) Sekolah memiliki aturan untuk sopan santun dan penggunaan bahasa yang baik.

d. Indikator Keteladanan Guru

Keteladanan guru menjadi variabel penting dalam Sekolah Ramah Anak. Guru memiliki peran sentral dalam pendidikan anak di sekolah, bahkan guru di sekolah dasar juga berperan sebagai orang tua kedua bagi anak. Guru sebagai barisan terdepan dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak mengingat guru sebagai titik sentral dari setiap perbaikan yang dilakukan dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan sebegus apa pun akan tetap menjadi mimpi ketika guru sebagai barisan terdepan tidak melakukan apa yang menjadi kebijakan tersebut.

Dalam Sekolah Ramah Anak, indikator dari variabel keteladanan guru meliputi :

- 1) guru-guru berperan memberikan keteladanan dengan cara guru memberikan contoh dalam memanfaatkan, mengelola, dan mencintai pantai.
- 2) Guru bersama siswa menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 3) Guru mendorong anak untuk berpartisipasi secara ekonomis dalam keluarga sesuai usia perkembangan anak.
- 4) Guru melatih anak untuk membuat kerajinan yang dapat bernilai ekonomis di kawasan pantai.
- 5) Setiap pagi dan pulang sekolah, guru wajib berjabat tangan dan saling menyapa dengan anak dan sesama guru.
- 6) Guru-guru saling berbicara dengan Bahasa Jawa untuk memberikan contoh kepada anak tentang budaya lokal.
- 7) Guru mendampingi anak dalam pemilihan ketua kelas.
- 8) Guru dan siswa bersama-sama menyelenggarakan perayaan di pantai.
- 9) Guru membangun kedekatan dengan siswa melalui aktivitas permainan saat istirahat.
- 10) Guru memberikan penilaian pada anak setelah melakukan konfirmasi kepada anak.
- 11) Guru menyapa anak-anak dengan baik secara verbal maupun non verbal.

e. Indikator Peraturan Sekolah Ramah Anak

Peraturan sekolah menjadi variabel yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Peraturan-peraturan yang diseyogikan ada dan dilaksanakan di Sekolah Ramah Anak adalah:

- 1) Setiap kelas memiliki tanaman atau hewan piaraan di sekolah yang harus dirawat.
- 2) Sekolah membudayakan kebersihan lingkungan dengan sekolah sebagai kawasan bebas rokok, bebas sampah, dan bebas miras.
- 3) Anak diizinkan membantu orang tua berjualan atau bekerja setelah jam belajar di sekolah.
- 4) Anak boleh jajan di kantin yang dikontrol kualitas makanannya oleh sekolah.
- 5) Sanksi di sekolah disosialisasikan kepada anak sebelum masuk sekolah.
- 6) Sekolah menyediakan buku-buku pelajaran, cerita-cerita rakyat di perpustakaan sekolah.
- 7) Setiap kelas memiliki pengurus kelas yang dipilih oleh anak secara bersama.
- 8) Pemilihan pengurus kelas dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- 9) Telepon seluler boleh digunakan anak setelah selesai jam belajar di sekolah.

2. Lingkungan yang Ramah Anak

Prinsip lingkungan yang ramah anak merupakan situasi dan kondisi sekolah, baik di dalam maupun di luar gedung

sekolah yang dapat memenuhi kebutuhan perkembangan anak, memberikan rasa aman dan nyaman secara fisik dan mental. Lingkungan ramah anak meliputi 3 variabel, yaitu:

- ❁ Lingkungan yang sehat.
- ❁ Lingkungan yang aman.
- ❁ Kebijakan sekolah untuk lingkungan yang ramah anak.

Lingkungan sekolah yang sehat dan aman merupakan variabel penting dalam menciptakan Sekolah Ramah Anak, di samping juga pentingnya kebijakan sekolah untuk Sekolah Ramah Anak.

a. Indikator Lingkungan yang Sehat

Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental. Oleh karena itu, sekolah ramah anak di kawasan pesisir terdapat:

- 1) Piket menjaga kebersihan sekolah untuk anak kelas atas menyapu dan membersihkan kamar mandi.
- 2) Jumlah MCK di sekolah sesuai dengan jumlah kelas (satu kelas satu MCK).
- 3) Sekolah harus memiliki kantin sehat yang menyediakan makanan lokal untuk sarapan maupun kudapan.
- 4) Sekolah melakukan antisipasi dampak buruk lingkungan pantai terhadap psikologis anak.
- 5) Sekolah tersedia air bersih. Pagar sekolah harus bersih dari coret-corek yang tidak senonoh.
- 6) Sekolah menyediakan tempat ibadah bagi siswa dan guru.

- 7) Sekolah menyelenggarakan peringatan hari raya agama.
- 8) Guru dan siswa saling berjabat tangan mengucapkan salam pada pagi hari ketika bertemu dan pulang sekolah.

b. Indikator Lingkungan yang Aman

Lingkungan yang aman adalah lingkungan yang memberikan anak aman bebas dari bahaya secara fisik maupun psikis. Kawasan pantai dan rawan gempa merupakan kawasan yang sering menimbulkan rasa tidak aman pada anak-anak di sekolah. Oleh karena itu, indikator lingkungan yang aman meliputi:

- 1) Sekolah memiliki sarana peringatan bencana dengan alat tradisional.
- 2) Sekolah menegakkan larangan penjualan miras di sekitar sekolah.
- 3) Bangunan sekolah antisipatif terhadap bencana gempa.
- 4) Bangunan sekolah memiliki sertifikasi tahan gempa.
- 5) Tidak meletakkan peralatan dan benda-benda di atas lemari pada sekolah di daerah rawan bencana.
- 6) Meja dan kursi anak yang ringan, sehingga mudah dipindah sesuai kebutuhan penataan ruang.
- 7) Lemari-lemari di ruang kelas dan perpustakaan dipasang perekat ke dinding agar tidak ambruk jika terjadi gempa.
- 8) Anak dilarang bermain di kawasan wisata pada jam belajar.

- 9) Lingkungan sekolah memiliki jalur keluar untuk evakuasi bencana.
- 10) Sekolah memiliki alat komunikasi tradisional seperti kentongan, lonceng yang siap digunakan jika anak dan sekolah dalam kondisi bahaya.

c. Indikator Kebijakan Sekolah untuk Lingkungan yang Ramah Anak

Kebijakan sekolah menjadi arah bagi sekolah dan *stakeholder* dalam menciptakan sekolah ramah anak. Agar tindakan warga sekolah terarah, maka kebijakan Sekolah Ramah Anak penting untuk dieksplisitkan dan menjadi keputusan sekolah. Indikator kebijakan yang penting penciptaan Sekolah Ramah Anak sebagai berikut:

- 1) Sekolah memiliki kebijakan muatan lokal tentang kehidupan pantai.
- 2) Mengenalkan kepariwisataan pantai menjadi program sekolah.
- 3) Sekolah memiliki kegiatan untuk mengenalkan anak dengan aktivitas ekonomi daerah pantai.
- 4) Kebijakan sekolah diputuskan dengan melibatkan orang tua siswa dan masyarakat sekitar pantai.
- 5) Sekolah memprioritaskan buku-buku tentang pantai dan kehidupannya di perpustakaan sekolah.
- 6) Sekolah melakukan pengembangan kurikulum berbasis daerah pesisir (lingkungan).
- 7) Sekolah memiliki program pembinaan pada anak-anak pantai yang berbakat olah raga seni tradisional.
- 8) Sekolah menyediakan guru kunjung yang siap

membantu anak berkebutuhan khusus di sekolah (kerja sama dengan pihak lain).

- 9) Sekolah bekerja sama dengan aparat untuk pengawasan keterlibatan anak dalam palanggaran (kekerasan, merokok, dan minum minuman keras).

3. Pengasuhan (Parenting)

Pengasuhan (*parenting*) merupakan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua pada anak di rumah. Dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak perlu diselaraskan antara pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua dengan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah. Kesenjangan pengasuhan antara sekolah dengan orang tua masih banyak terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua mengenai pengasuhan anak karena bervariasinya latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi orang tua di kawasan pantai. Variabel pengasuhan menjadi variabel penting untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Indikator-indikator dari variabel pengasuhan adalah:

- a. Sekolah mengundang orang tua untuk berdialog terkait dengan revisi tentang visi, misi, tujuan sekolah yang sesuai dengan konteks kawasan pesisir.
- b. Sekolah memfasilitasi pertemuan dengan orang tua tentang pola pengasuhan yang dapat mengembangkan potensi sumber daya alam sekitar pantai.
- c. Menyadarkan orang agar anak mengutamakan sekolah daripada membantu mencari uang.
- d. Ada penyuluhan pada orang tua tentang pendidikan sebagai investasi masa depan anak.
- e. Sekolah memfasilitasi pertemuan dengan orang tua tentang pola asuh yang mengembangkan potensi sosial

yang dimiliki masyarakat pantai (kerja sama, gotong royong, kekeluargaan).

- f. Orang tua tidak melibatkan anak dalam pekerjaan yang rentan dengan seksualitas.
- g. Sekolah dan orang tua memiliki persepsi yang sama tentang pola asuh yang tepat dengan pranata masyarakat pantai.
- h. Sekolah dan orang tua memiliki pola asuh yang sama terkait dengan berbagai pranata sosial masyarakat pantai.
- i. Sekolah memfasilitasi pertemuan dengan orang tua tentang pola asuh pemanfaatan internet tepat dan bertanggung jawab.
- j. Sekolah bersama dengan orang tua memberikan pendidikan tentang pemanfaatan media televisi, internet, *handphone* yang bertanggung jawab.

4. Prinsip Partisipasi Demokratis

Sekolah Ramah Anak memerlukan kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak, yaitu orang tua, masyarakat sekitar sekolah maupun aparat pemerintah. Dalam prinsip partisipatif ditemukan variabel sebagai berikut:

- ✿ Partisipasi orang tua
- ✿ Partisipasi masyarakat dan aparat pemerintah
- ✿ Kebijakan Pemerintah Pemda Yayasan.

Masing-masing variabel dikembangkan ke dalam indikator-indikator sebagai berikut :

a. Indikator Partisipasi Orang Tua

Partisipasi orang tua merupakan keterlibatan mental, pikiran, maupun tindakan orang tua yang mendorong

untuk mengembangkan dan menciptakan Sekolah Ramah Anak. Bentuk-bentuk keterlibatan orang tua di kawasan pantai untuk menciptakan Sekolah Ramah Anak adalah:

- 1) Sekolah melibatkan orang tua dalam mendukung dana untuk kegiatan-kegiatan penghijauan di lingkungan sekolah kawasan pantai.
- 2) Sekolah bekerja dengan orang tua membuat kegiatan-kegiatan bersama untuk kelestarian lingkungan sekolah kawasan pantai.
- 3) Komite sekolah merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah yang sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua.
- 4) Komite sekolah mengawasi pelaksanaan kegiatan sekolah yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua siswa.
- 5) Komite sekolah menjadi mediator jika terjadi perbedaan pendapat antara pihak sekolah dengan masyarakat sekitar sekolah.
- 6) Komite sekolah menempatkan diri sesuai dengan posisi orang tua di sekolah.
- 7) Orang tua diajak berdialog jika terjadi pelanggaran terhadap pemakaian *handphone* dan internet oleh siswa.
- 8) Komite sekolah bertanggung jawab untuk mengatasi berbagai pelanggaran pemanfaatan *handphone* dan internet di kalangan siswa.
- 9) Peraturan kehadiran anak di sekolah disampaikan kepada orang tua.

- 10) Memberikan penyuluhan tentang makanan sehat pada orang tua.
- 11) Melibatkan orang tua dalam penyediaan makanan sehat di sekolah.

b. Indikator Partisipasi Masyarakat dan Aparat Pemerintah

Keterlibatan masyarakat dan aparat pemerintah menjadi variabel penting dalam menciptakan Sekolah Ramah Anak karena antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah semestinya menjadi satu kesatuan organisasi yang memiliki tujuan sama. Sekolah, masyarakat, dan pemerintah memiliki visi yang sama dalam menciptakan Sekolah Ramah Anak. Adapun indikator keterlibatan masyarakat dan aparat sebagai berikut:

- 1) Ada komunikasi efektif antara pemerintah daerah dengan sekolah terkait kebijakan kebencanaan dan mitigasi bencana yang ada di kawasan pesisir.
- 2) Koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan, polisi, pengadilan dengan sekolah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba dan miras di kalangan siswa.
- 3) Ada *monitoring* dan evaluasi terkait dengan implementasi kebijakan berbagai dinas (pendidikan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, peradilan) yang telah dilaksanakan di sekolah.
- 4) Sosialisasi tentang Perda kebencanaan dan mitigasi bencana kepada pihak sekolah dan masyarakat.
- 5) Penguatan pranata sosial masyarakat untuk pencegahan penyakit masyarakat (prostitusi, narkoba, miras) di kawasan pesisir.

- 6) Menjalin kerja sama dengan memanfaatkan aktivitas budaya (kelompok kesenian) yang terdapat dalam masyarakat untuk pembelajaran di sekolah.
- 7) Sekolah menggunakan keahlian masyarakat sebagai sumber belajar dan sekolah bekerja sama dengan masyarakat dalam penerimaan siswa baru.
- 8) Sekolah menggali dana bersama masyarakat, yayasan, dan komite sekolah.
- 9) Sekolah menyelenggarakan pengajian secara berkala untuk orang tua dan masyarakat sekitar sebagai media komunikasi.

c. Indikator Kebijakan Pemerintah, Pemda, Yayasan

Sekolah ramah anak perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk kebijakan maupun tindakan nyata. Sekolah sebagai institusi pelaksana pendidikan dapat bekerja dengan optimal dan perlu kebijakan yang menaungi di atasnya. Variabel kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun yayasan jika itu sekolah swasta memiliki peran penting dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Ada Peraturan Daerah tentang jam belajar masyarakat daerah pantai di sore hari.
- 2) DPRD memiliki kemauan politik yang kuat untuk memperhatikan sarana prasarana pendidikan (sekolah) yang kurang di kawasan pantai.
- 3) DPRD memiliki kebijakan yang memihak masyarakat miskin (orang tua yang memiliki anak yang bersekolah) di kawasan pantai.

- 4) Ada Peraturan Daerah yang terkait dengan penanggulangan penyakit masyarakat yang berdampak pada anak sekolah.
- 5) Ada kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat miskin (orang tua) yang memiliki anak sekolah oleh Pemerintah Daerah.
- 6) Ada penegakan hukum terkait dengan berbagai pelanggaran hukum (pemakaian narkoba dan miras) di kawasan pantai.
- 7) Sosialisasi berbagai peraturan hukum untuk sekolah dan orang tua murid terkait dengan narkoba dan miras.
- 8) Sosialisasi berbagai peraturan hukum untuk sekolah dan orang tua murid terkait dengan konservasi laut dan kawasan pantai.
- 9) Sosialisasi tentang Perda kebencanaan dan mitigasi bencana kepada pihak sekolah dan orang tua murid. Sekolah menjalin kemitraan dengan Dinas Pariwisata, Perikanan, Pertanian, Kelautan, dan lain-lain untuk memperdayakan warga sekolah dalam aspek kecakapan hidup (*life skill*).

5. **Prinsip Inklusifitas**

Sekolah Ramah Anak merupakan sekolah yang bersifat terbuka bagi siapa saja tanpa memandang ras, agama, suku, dan jenis kelamin. Hak anak untuk memperoleh pendidikan harus dipenuhi oleh sekolah. Prinsip inklusifitas meliputi variabel sebagai berikut:

- Terbuka terhadap Anak Berkebutuhan Khusus
- Terbuka dalam Penerimaan Siswa Baru

Keterbukaan sekolah terhadap berbagai perbedaan menjadi variabel penting dalam sekolah ramah anak mengingat kawasan pesisir wisata Gunungkidul tempat penelitian dilakukan memiliki sejumlah anak berkebutuhan alam setiap tahunnya.

a. Indikator Terbuka terhadap Anak Berkebutuhan Khusus

Dalam suatu masyarakat, tak terkecuali kawasan pantai pasti ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Keberadaan mereka menjadi bagian dari kehidupan yang nyata. Keberadaan mereka di sekolah menjadi suatu keniscayaan dalam suatu sekolah yang berprinsip inklusif. Oleh karena itu, variabel terbuka (inklusif) terhadap anak berkebutuhan khusus penting dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Adapun indikatornya sebagai berikut:

- 1) Sekolah menerima siswa dari lingkungan sekitar pantai.
- 2) Sekolah bersedia menerima anak berkebutuhan khusus.
- 3) Guru tidak memberikan *labelling* anak sebagai ABK tanpa melalui assessment.
- 4) Memperhatikan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer (keluarga *broken home*, ekonomi kurang mampu).
- 5) Semua guru diberikan pelatihan cara menangani pembelajaran ABK.
- 6) Sekolah memberikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan dalam meraih prestasi.
- 7) Sekolah tidak memberikan perhatian khusus pada anak dari orang yang memiliki jabatan dan kedudukan.

- 8) Guru tidak mencela anak yang berbeda budaya dan kebiasaan.
- 9) Guru memberikan bimbingan pada anak yang lambat belajar (*slow learner*).
- 10) Guru memperlakukan ABK secara setara dengan anak normal.

b. Indikator Terbuka dalam Penerimaan Siswa Baru

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang menerima siapa pun yang ingin masuk atau siapa pun berhak masuk untuk mendapatkan layanan pendidikan tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, agama, ras atau perbedaan lainnya. Indikator dari variabel ini adalah:

- 1) Sekolah mendatangi anak usia sekolah di sekitar sekolah yang mendaftar masuk sekolah.
- 2) Sekolah mendaftar anak berkebutuhan khusus meskipun orang tua tidak berniat menyekolahkan karena ABK ataupun tidak mampu.
- 3) Sekolah mencari dan menjemput siswa baru ke rumah-rumah.
- 4) Sekolah tidak memberikan batasan umur tertinggi untuk masuk sekolah.

Indikator-indikator dari variabel tersebut telah diuji tingkat reliabilitasnya dengan nilai alpha lebih dari 0,70. Untuk mengukur kesesuaian sampling dalam uji coba variabel dan indikator dengan melihat KMO/ Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Semua variabel dan indikator SRA yang ditunjukkan dengan angka KMO and Bartlett's Test di atas 0,500.

Sekolah Ramah Anak di kawasan pesisir memiliki variabel yang terkait dengan faktor internal sekolah yang meliputi proses pembelajaran, keteladan guru, lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman serta faktor eksternal yang meliputi pengasuhan orang tua, partisipasi orang tua, dan masyarakat. Selain itu, variabel Sekolah Ramah Anak terkait dengan kebijakan sekolah dan kebijakan pemerintah, Pemda, yayasan yang menjadi acuan terwujudnya Sekolah Ramah Anak serta memperhatikan anak-anak yang membutuhkan khusus yang berada di kawasan pesisir. Hal ini sejalan dengan pendapat Miske (2010: 3), bahwa hak-hak dasar yang tercantum dalam Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), yang ditandatangani pada tahun 1989 di Turki tersebut meliputi:

- ❁ *Child Friendly Schools are child-centered.*
- ❁ *They are inclusive.*
- ❁ *They are gender equitable and celebrate all cultural backgrounds and languages.*
- ❁ *They are effective – that is, in Child Friendly Schools children are learning and being educated.*
- ❁ *Child Friendly Schools are protective, safe, healthy environments.*
- ❁ *They are characterized by democratic participation.*

Variabel dan indikator di atas merupakan hal-hal substansial yang seharusnya ada dan dapat digunakan sebagai konsep Sekolah Ramah Anak yang kontekstual dengan sosio-budaya-ekonomi-politik dan perkembangan IPTEK sekolah di kawasan pesisir. Dari analisis faktor dengan program SPSS yang telah dilakukan menunjukkan bahwa indikator-indikator dari variabel yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki reliabilitas tinggi yang ditunjukkan dengan angka faktor lebih dari 0,32. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator hipotetik yang ditemukan dalam penelitian terbukti meyakinkan dapat digunakan

sebagai indikator dan variabel Sekolah Ramah Anak di kawasan pesisir. Sebuah konsep Sekolah Ramah Anak yang disesuaikan dengan kawasan pesisir yang memiliki karakteristik berbeda dengan kawasan pegunungan ataupun dataran rendah. Hasil analisis lisrel dengan melihat nilai lamda juga menunjukkan bahwa indikator-indikator Sekolah Ramah Anak yang valid berarti indikator ini merupakan indikator yang dapat mengubah mutu sekolah menjadi sekolah yang lebih ramah anak.

Perbedaan indikator yang digunakan oleh UNICEF dengan hasil penelitian ini terletak pada variabel kebijakan sekolah, kebijakan pemerintah, Pemda, dan yayasan, serta pada pengasuhan orang tua. Kebijakan ini sangat diperlukan sebagai arah dan rambu-rambu yang dapat digunakan untuk implementasi konsep Sekolah Ramah Anak di kawasan pesisir. Kebijakan ini merupakan regulasi dari pihak sekolah maupun pemerintah, Pemda, dan yayasan. Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah merupakan kebijakan publik yang diputuskan dan dirumuskan oleh pemerintah sebagai pengurus organisasi negara yang bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat pesisir utamanya sekolah. Harold Laswell dan Abraham Kaplan (Subarsono, 2011: 3), mengatakan bahwa kebijakan publik terkait dengan sekolah ramah anak hendaknya berisi tujuan, nilai, dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini berarti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah tidak boleh bertentangan dengan nilai dan praktik-praktik sosial yang ada pada masyarakat. Indikator-indikator hipotetik kebijakan sekolah dan kebijakan pemerintah, Pemda, yayasan tentang Sekolah Ramah Anak berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi-politik dan perkembangan IPTEK yang sesuai dengan kawasan pesisir.

Indikator pada variabel pengasuhan merupakan indikator yang ditemukan dalam penelitian ini. Konsep Sekolah Ramah Anak secara esensial memuat keterkaitan pola pengasuhan orang tua dan pola pendidikan di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi persepsi yang berbeda antara pola pendidikan di rumah dan di sekolah. Persepsi yang berbeda antara pola pendidikan ini akan berakibat anak menjadi bingung akan tata nilai dan perilaku mana yang mesti dianut.

Variabel terbuka dalam penerimaan siswa baru ini sesungguhnya mengacu pada paradigma pendidikan demokratis dalam bidang pendidikan. Pendidikan demokratis harus diimbangi dengan perhatian yang kuat terhadap hak-hak asasi manusia, terutama terkait dengan siswa yang berkebutuhan khusus yang ada di sekitar kawasan pesisir. Anak-anak yang berkebutuhan khusus harus mendapat pelayanan yang optimal dan tidak didiskriminasi (Rosyada, 2007: 16). Sekolah demokratis merupakan bentuk pengimplementasian pola-pola demokratis dalam pengelolaan sekolah termasuk penerimaan siswa baru. Sekolah tidak boleh ada diskriminasi atas dasar perbedaan ras, agama, atau warna kulit, jenis kelamin atau bagi anak yang berkebutuhan khusus. Sekolah yang demokratis dalam penerimaan siswa baru harus berani jemput bola ke sekolah-sekolah TK di sekitar SD untuk dapat dididik. Keadaan yang sebaliknya terjadi pada saat ini, yaitu masyarakat yang mendatangi sekolah yang dianggap berkualitas dengan "persaingan" di antara mereka. Cara-cara seperti ini tampaknya bertentangan dengan prinsip sekolah demokratis. Haas (Rosyada, 2007: 17-18), mengatakan pendidikan demokratis terkait dengan pendidikan untuk semua, yaitu semua siswa harus memperoleh perlakuan yang sama, memperoleh pelajaran sehingga memperoleh peluang untuk mencapai kompetensi keilmuan sesuai batas-batas kurikuler, serta memiliki basis *skill* dan keterampilan yang sesuai dengan minat mereka, sesuai pula dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Selain itu, indikator hipotetik ini terkait dengan pemberian *skill* dan keterampilan yang sesuai

dengan kemajuan teknologi terkini karena pasar menuntut setiap tenaga kerjanya memiliki keterampilan penggunaan alat-alat teknologi modern, kemampuan komunikasi global, serta kemampuan akses pada pengetahuan. Indikator yang terkait dengan pemberian tugas dalam proyek dan penugasan kelompok dalam proses pembelajaran merupakan indikator untuk mengembangkan kerja sama di antara para siswa. Hal ini untuk mengantisipasi tren pasar ke depan yang menuntut adanya kemitraan dan jalinan kerja sama antara perusahaan dan masyarakat serta masyarakat dengan perusahaan. Pengalaman bermakna dalam pembelajaran kerja sama akan bermanfaat bagi implementasinya di masa mendatang.

Indikator-indikator sekolah ramah anak di kawasan pesisir di atas yang telah teruji ini pada hakikatnya dapat mengembangkan kualitas pendidikan pada umumnya dan pendidikan dasar pada khususnya. Selain itu, indikator hipotetik ini merupakan pengembangan konsep pendidikan demokratis, pendidikan untuk semua, pendidikan hak-hak asasi manusia yang telah disesuaikan dengan konteks keindonesiaan berciri sebagai negara maritim yang secara geografi memiliki wilayah pesisir dan laut yang sangat panjang dari Sabang sampai Merauke.

Uji kesesuaian (fit) model variabel dan indikator Sekolah Ramah Anak di kawasan pesisir menggunakan analisis Lisrel, menunjukkan sebagian besar indikator memiliki kesesuaian (fit) dengan variabelnya. Hal ini ditunjukkan dengan angka mendekati 0,90 dan melebihi 0,90. Hal ini juga berarti bahwa indikator-indikator sesuai dengan 14 variabel yang ditemukan dalam penelitian. Temuan ini sejalan dengan teori-teori Sekolah Ramah Anak yang telah digagas oleh UNICEF dan disesuaikan dengan konteks kawasan pesisir. Dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh banyak pihak menunjukkan bahwa Model SRA fleksibel, dapat disesuaikan dengan konteks yang berbeda, heuristik dan secara luas tepat, SRA dapat diimplementasikan dengan cara

yang berbeda dengan berbagai tingkat dukungan tergantung pada kebutuhan lokal. Inisiatif SRA efektif dalam melibatkan para *stakeholder* di semua tingkat sistem pendidikan dalam menciptakan sekolah-sekolah dengan kondisi yang merefleksikan konteks kawasan pesisir yaitu: yang efektifitas, pengajaran, dan pembelajaran yang berfokus pada anak, dan mendorong pendidik untuk berpikir tentang cara melayani seluruh anak. Konseptualisasi SRA tampaknya melekat pada para pemangku kepentingan yang membantu memahami kebutuhan dalam mengatasi seluruh anak dengan cara mewujudkan prinsip-prinsip *inclusiveness, child-centredness, and democratic participation*.

Indikator yang paling fit dengan variabel di antara 14 variabel di atas adalah partisipasi orang tua. Sekolah yang berkualitas ditunjukkan dengan salah satu variabel terkait dengan partisipasi orang tua. Keterlibatan orang tua/komite sekolah meliputi:

1. Sekolah melibatkan orang tua dalam mendukung dana untuk kegiatan-kegiatan penghijauan di lingkungan sekolah kawasan pantai, sekolah bekerja sama dengan orang tua membuat kegiatan bersama untuk kelestarian lingkungan sekolah kawasan pantai.
2. Komite sekolah merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah yang sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua.
3. Komite sekolah mengawasi pelaksanaan kegiatan sekolah yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua siswa, komite sekolah menjadi mediator jika terjadi perbedaan pendapat antara pihak sekolah dengan masyarakat sekitar sekolah.
4. Komite sekolah menempatkan diri sesuai dengan posisi orang tua di sekolah, orang tua diajak berdialog jika terjadi pelanggaran terhadap pemakaian *handphone* dan internet oleh siswa.

5. Komite sekolah bertanggung jawab untuk mengatasi berbagai pelanggaran pemanfaatan *handphone* dan internet di kalangan siswa.
6. Peraturan kehadiran anak di sekolah disampaikan kepada orang tua.
7. Memberikan penyuluhan tentang makanan sehat pada orang tua.
8. Melibatkan orang tua dalam penyediaan makanan sehat di sekolah.

Semua indikator ini memiliki kesesuaian (fit) dengan variabel partisipasi orang tua pada Sekolah Ramah Anak di kawasan pesisir.



5

ANALISIS KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK

ANALISIS KEBIJAKAN UNTUK MENGEM- BANGKAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Michael Hill (Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 244) mengemukakan adanya dua jenis analisis kebijakan, yaitu analisis tentang suatu kebijakan (*analysis of policies*) dan analisis untuk suatu kebijakan (*analysis for policies*). Analisis tentang kebijakan biasanya berbentuk analisis dalam kerangka hukum dan kelembagaan suatu kebijakan. Metode yang dilakukan biasanya adalah analisis isi, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian tentang *output* kebijakan dilakukan dalam bentuk kajian tentang hasil dari suatu kebijakan, khususnya untuk menjelaskan mengapa pemerintah mengeluarkan biaya untuk kebijakan tertentu. Penelitian tentang proses kebijakan berkenaan dengan bagaimana kebijakan dibentuk dan dilaksanakan dalam suatu lingkungan kebijakan tertentu.

Analisis untuk kebijakan dipahami sebagai analisis yang dilakukan dalam rangka menyusun kebijakan, yaitu suatu proses perencanaan dan perumusan kebijakan dengan menggunakan hasil analisis atas kebijakan (penelitian kebijakan). Oleh karena itu, data penelitian penting digunakan sebagai masukan untuk merencanakan dan merumuskan kebijakan. Analisis kebijakan merupakan langkah awal dalam proses kebijakan pendidikan. Dengan adanya proses analisis, perumusan kebijakan pendidikan akan tepat dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Pemahaman tentang analisis kebijakan pendidikan tidak serta-merta berkenaan dengan analisis untuk merumuskan kebijakan, namun dapat juga analisis tentang kebijakan. Analisis untuk kebijakan dapat dipahami dalam empat bentuk, yaitu:

- ❁ Analisis dalam bentuk evaluasi tentang *impact*/dampak suatu kebijakan atau kemungkinan dampak kebijakan pada suatu kebijakan.
- ❁ Analisis untuk menyediakan informasi dalam rangka pembuatan keputusan.
- ❁ Analisis dalam bentuk advokasi proses kebijakan adalah analisis kebijakan yang ditujukan untuk memberikan nasihat atau advis kebijakan yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.
- ❁ Analisis kebijakan dalam bentuk nasihat kebijakan, yaitu berupa analisis kebijakan yang ditujukan untuk menyempurnakan suatu kebijakan yang ada.

Pemilahan analisis kebijakan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 5.1 Pemilahan Analisis Kebijakan

Analysis of Policy	Analysis for Policy
Penelitian tentang isi kebijakan	Analisis untuk merumuskan kebijakan
Penelitian tentang implementasi kebijakan	Analisis untuk memprediksi dampak kebijakan
Penelitian tentang kinerja kebijakan	Analisis untuk memperbaiki isi kebijakan
Penelitian tentang lingkungan kebijakan	Analisis untuk memperbaiki implementasi kebijakan
Penelitian tentang proses kebijakan	Analisis untuk memperbaiki proses kebijakan

Analisis untuk Kebijakan (*Analysis for Policy*)

Analysis for policy atau analisis untuk kebijakan dapat dipahami sebagai analisis yang dilakukan dalam rangka menyusun kebijakan. Analisis untuk kebijakan merupakan proses perencanaan dan perumusan kebijakan dengan menggunakan hasil analisis atas kebijakan (penelitian kebijakan). Oleh karena itu, data penelitian digunakan sebagai masukan untuk merencanakan dan merumuskan kebijakan. Pendapat yang sejalan dikemukakan pula oleh Weimer (2009: 93). Ia membedakan tentang penelitian kebijakan dan analisis kebijakan. Penelitian kebijakan secara jelas memuat analisis kebijakan, khususnya tentang arti penting dan hakikat permasalahan kebijakan, serta dampaknya terhadap berbagai kebijakan yang lebih khusus. Penelitian kebijakan juga berkontribusi terhadap tuntutan bagi analisis kebijakan dengan memunculkan kondisi yang tidak diinginkan atau dengan menunjukkan intervensi kebijakan tertentu untuk mengatasi kondisi yang tidak diinginkan tersebut.

Sedangkan Majchrzak (1984: 12), mendefinisikan penelitian kebijakan adalah *Policy research, therefore, is defined as the process of conducting research on, or analysis of, a fundamental social problem in order to provide policy makers with pragmatic, action oriented recommendation for alleviating the problem*. Penelitian kebijakan didefinisikan sebagai proses mengarahkan riset pada analisis problem sosial yang fundamental di samping untuk memberikan pengaruh pada pembuat kebijakan dengan praktik dan rekomendasi yang berorientasi untuk mengurangi problem. Menurut Majchrzak, penelitian kebijakan itu unik dalam fokus pada rekomendasi yang berorientasi aksi (*action oriented*) untuk problem sosial fundamental.

Terdapat berbagai tipe penelitian yang berdampak pada problem sosial yang dikemukakan oleh Majchrzak (1984: 12-13), salah satunya adalah penelitian kebijakan. Tipe-tipe penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian dasar (*basic research*) mengenai penelitian akademik tradisional yang dilakukan secara umum dalam departemen-departemen di universitas.
2. Penelitian teknis (*technical research*) termasuk proyek yang distrukturkan untuk penyelesaian secara spesifik, sedikit mendefinisikan masalah seperti akuntabilitas sistem untuk program layanan sosial. Pertanyaan mengenai bagaimana biaya layanan sosial dialokasikan tidak didiskusikan dalam penelitian teknis.
3. Penelitian kebijakan.
4. Analisis kebijakan (*policy analysis*) adalah studi dari proses pembuatan kebijakan (*policy making*). *Policy analysis* secara tipikal di-performant oleh ilmuwan politik, menarik dalam proses di mana kebijakan diadopsi sama dengan diadopsinya dampak dari kebijakan-kebijakan.

Policy analysis dapat membawa pada berbagai bentuk, Gordon (1997) dalam Bell and Stevensen (2006: 10) mengidentifikasi beberapa tipe dari riset kebijakan, yaitu *analysis for policy* dan *analysis of policy*. Menurut Bell and Stevensen (2006: 10-12), menuliskan berbagai tipe dari analisis kebijakan.

Analysis for policy		Analysis of policy.		
Policy advocacy	Information for policy	Policy monitoring and evaluation	Analysis of policy deternimation	Analysis of policy content

Gordon (1997) dalam Bell and Stevensen (2006: 10) dari Gordon (1997)

Policy advocacy berkenaan dengan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan (*promote and advance*) satu kebijakan yang spesifik atau satu set kebijakan yang berkaitan. *Information for policy* merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan kepada *policy maker* informasi dan *advice* yang akan menjadi alasan pada kebutuhan tindakan dan mungkin mengantarkan pada kebijakan baru atau modifikasi dari kebijakan yang sudah ada. *Policy monitoring and evaluation* merupakan bentuk umum penelitian kebijakan ini, terutama dalam iklim sekarang dari level tinggi secara akuntabilitas dan kebutuhan untuk justifikasi tindakan yang diambil. Penelitian evaluasi sering membut klaim objektif, tetapi penting untuk memahami bahwa evaluasi merupakan sebuah motivasi perilaku (*evaluation is a motivated behavior*) dan lingkungan politik yang tinggi, dalam hal ini penelitian evaluasi kebijakan akan merepresentasikan perbedaan metodologis untuk peneliti kebijakan pendidikan.

Analysis of policy deternimation menekankan pada proses kebijakan tidak pada dampak kebijakan, tetapi bagaimana kebijakan yang dikembangkan dengan cara yang tepat. *Analysis of policy content* merupakan riset yang dilakukan untuk kepentingan akademik. Dalam analisis konten menekankan pada pemahaman asal usul, tujuan, dan pembedahan terhadap kebijakan yang spesifik. Tipe umum yang

digunakan dalam riset ini adalah menggunakan format studi kasus dan muncul pertanyaan penting tentang kelayakan dari metode dalam riset kebijakan.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan pendidikan berguna untuk dasar pengambilan keputusan (kebijakan) para pengambil kebijakan, sehingga analisis kebijakan pendidikan menjadi penting untuk dilakukan oleh para kepala sekolah sebagai para pengambil kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan berorientasi pada ilmu pendidikan, bukan politik atau yang lain. Hanya yang masih sering terjadi dalam rangka merencanakan dan merumuskan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan belum melalui proses analisis kebijakan. Oleh karena itu, penting diberikan wawasan dan melatih para kepala sekolah agar membiasakan melakukan proses analisis dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan pendidikan. Dalam konteks ini proses analisis diperlukan untuk merencanakan, merumuskan, dan mengimplementasikan kebijakan Sekolah Ramah Anak di tingkat satuan pendidikan.

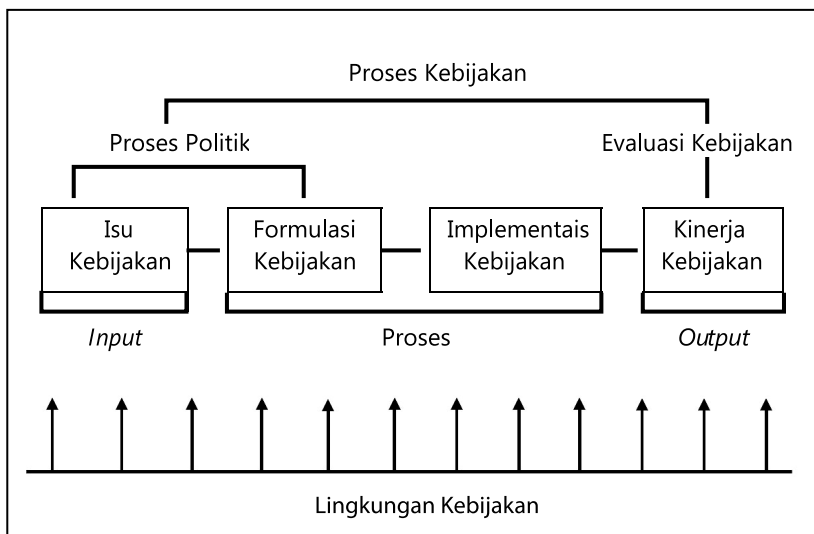
PROSES KEBIJAKAN

Tahapan proses kebijakan publik meliputi 3 tahapan, yaitu *policy formulation*, *policy implementation*, dan *policy evaluation*. Tahap formulasi kebijakan atau tahap merumuskan kebijakan dilakukan melalui analisis secara komprehensif agar diperoleh kebijakan yang benar-benar dapat diimplementasikan. Setelah kebijakan diimplementasikan, maka kebijakan perlu dievaluasi untuk melihat keberhasilan program dari kebijakan tersebut.

Dalam tahap formulasi kebijakan, isu kebijakan menjadi salah satu bagian utama. Isu kebijakan merupakan masalah yang akan dipecahkan atau diselesaikan melalui kebijakan. Formulasi kebijakan itu

merupakan aktivitas melakukan proses analisis kebijakan publik yang dilakukan secara komprehensif, sehingga diperoleh kebijakan yang dapat diimplementasikan dan dapat menyelesaikan atau memecahkan masalah. Dalam proses formulasi kebijakan terdapat beberapa proses inti, yaitu identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi masalah, dan desain kebijakan (Joko Widodo, 2006: 44). Hasil dari formulasi kebijakan berupa sebuah paper kebijakan (*paper policy*) yang dapat segera diimplementasikan (Joko Widodo, 2006: 84).

Menurut Riant Nugroho (2008: 180), proses kebijakan yang ideal digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.1 Proses kebijakan yang ideal

Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang melibatkan sumber daya manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Jadi, dapat dimaknai bahwa setelah isu kebijakan diformulasikan sesuai dengan masalahnya, maka hasil dari formulasi kebijakan adalah berupa paper kebijakan yang dapat segera

diimplementasikan dengan melibatkan SDM, dana, dan peralatan untuk mencapai tujuan. Proses terakhir dalam sebuah kebijakan adalah proses evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan sebuah proses untuk menilai dan melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan (Joko Widodo, 2006: 112). Jadi, evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian kebijakan dalam pelaksanaannya. Hasil dari evaluasi kebijakan dapat dimaknai berupa sebuah rekomendasi, apakah kebijakan tersebut akan tetap dilaksanakan, diperbaiki atau diganti dengan kebijakan yang lain.

Menurut Dunn (2003: 22), proses kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan sampai penilaian kebijakan pada berbagai tahap tersebut dapat dilakukan analisis kebijakan oleh orang yang ahli untuk membantu para pengambil keputusan, sehingga dihasilkan informasi yang relevan dan keputusan yang tepat untuk masing-masing tahap tersebut.

1. Penyusunan Agenda

Kebijakan pendidikan lahir dari suatu keresahan akan situasi yang tidak ideal, sehingga muncul berbagai masalah yang memerlukan penyelesaian. Pada tahap penyusunan agenda, para pengambil keputusan kebijakan memikirkan berbagai situasi yang tidak ideal tersebut dengan latar belakang kemunculannya dan kemungkinan-kemungkinan untuk solusinya. Dari pemikiran tersebut, tersusunlah agenda untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan merancang sebuah kebijakan, misalnya kebijakan sekolah untuk memenuhi hak-hak anak sebagai

agenda kebijakan pendidikan nasional diambil, sebab banyak anak Indonesia yang masih belum memperoleh haknya, baik hak asasi pribadi maupun hak sosial dan pendidikan di sekolah.

2. Formulasi Kebijakan

Berbagai agenda kebijakan pendidikan yang telah dipikirkan kemudian dituangkan dalam berbagai alternatif kebijakan dengan pertimbangan-pertimbangan rasional etik untuk mengatasi masalah. Misalnya, alternatif kebijakan yang dipilih adalah kebijakan Sekolah Ramah Anak di Indonesia yang di dalamnya terdapat panduan-panduan untuk mengembangkan program dan kegiatan perlindungan dan pendidikan anak di sekolah yang berujung pada Sekolah Ramah Anak.

3. Adopsi Kebijakan

Formulasi kebijakan ditindaklanjuti dengan adanya adopsi kebijakan. Berbagai kemungkinan yang ada dalam formulasi kebijakan dikaji untuk dipilih yang sangat besar peluang dan manfaatnya untuk diimplementasikan. Adopsi kebijakan tidak sekadar mengambil begitu saja rumusan yang ada, melainkan memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang relevan, konsensus bersama, dengan keputusan legislatif ataupun keputusan peradilan. Dalam kebijakan Sekolah Ramah Anak, adopsi kebijakan diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai acuan bagi sekolah untuk mengembangkan kebijakan dan program.

4. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang menggerakkan sumber daya finansial

maupun manusia. Berbagai persiapan diperlukan agar suatu kebijakan benar-benar dapat dilaksanakan di lapangan, sehingga implementasi berjalan dengan baik.

Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan itu sendiri. Kebijakan hanya akan menjadi sebuah dokumen atau arsip atau sekadar sebagai mimpi manakala tidak dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk mengoperasikan sebuah program. Menurut Charles O. Jones dalam Arif Rohman (2012: 106), terdapat tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program tersebut, yaitu: (1) Pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit serta metode untuk menjalankan program supaya dapat berjalan sesuai dengan keinginan; (2) Interpretasi, aktivitas menafsirkan agar suatu program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat serta dapat diterima dengan baik serta dilaksanakan; (3) Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan yang disesuaikan dengan tujuan program.

Joko Widodo (2010: 90-94), menyebutkan tahap-tahap implementasi kebijakan, yaitu tahap interpretasi, tahap organisasi, dan tahap aplikasi. Tahap interpretasi adalah tahap penguraian pokok dari suatu kebijakan atau program yang bersifat abstrak agar lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga dapat dimengerti oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Tahap organisasi adalah tindakan peraturan dan penetapan pembagian tugas pelaksana kebijakan, termasuk di dalamnya terdapat kegiatan penetapan anggaran, kebutuhan sarana dan prasana, penetapan tata kerja, dan manajemen implementasi kebijakan. Tahap aplikasi adalah tahap pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Tahapan ini merupakan tahapan untuk menerapkan kebijakan mengatasi masalah dan meningkatkan mutu pada sasaran kebijakan atau program.

Dalam mengimplementasikan kebijakan Sekolah Ramah Anak di Indonesia, yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 diperlukan tahapan interpretasi, organisasi, dan aplikasi.

Selanjutnya Joko Widodo (2006: 97-110) menuliskan beberapa unsur yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi kebijakan merupakan sebuah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dengan kata lain, mentransformasikan kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk dipahami. Transformasi kebijakan dipahami dengan jelas baik isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan.

Sumber daya merupakan sumber-sumber yang diperlukan dalam implementasi kebijakan. Sumber-sumber tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan lain-lain). Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan harus mencukupi dan memiliki keahlian serta kemampuan untuk melaksanakan tugas, ketepatan dan kelayakan staf yang dibutuhkan, keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditangani. Sumber daya dana berupa anggaran dana untuk pembiayaan operasional, perlengkapan serta insentif para pelaku kebijakan. Keterbatasan dana dapat berpengaruh terhadap dimensi implementasi yang lainnya. Sumber daya peralatan, yaitu sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang lain. Sumber daya peralatan memberi peran dalam memudahkan pemberian layanan. Terbatasnya fasilitas yang tersedia dan tidak menunjang efisiensi akan kurang mendorong motivasi para aktor pelaksana kebijakan.

Disposisi sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan. Para pelaksana kebijakan tidak hanya tahu mengenai hal apa yang harus dilakukan, akan tetapi juga harus memiliki kemauan dalam melaksanakan kebijakan tersebut (Joko Widodo, 2006: 105). Terdapat tiga elemen respons yang dapat memengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Elemen tersebut antara lain pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman. Arah respons mereka apakah menerima, netral, atau menolak (Joko Widodo, 2006: 106). Yang termasuk di dalam pelaksana kebijakan adalah orang-orang yang menjadi sasaran dari kebijakan. Misalnya dalam implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak, maka anak-anak juga sebagai aktor atau pelaksana yang menjadi sasaran kebijakan. Sementara guru dan kepala sekolah sebagai aktor implementator kebijakan dan program.

Struktur birokrasi merupakan struktur organisasi pelaksanaan kebijakan dan program. Dalam struktur selain terdapat orang-orang juga terdapat pembagian tugas dan kewenangan, serta terdapat hubungan antarunit organisasi dan hubungannya dengan organisasi luar. Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar operasional prosedur yang akan memudahkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya (Joko Widodo, 2006: 107). Keberhasilan implementasi kebijakan penting adanya kerja sama dari orang-orang sebagai pelaksana dan sasaran kebijakan. Organisasi yang terfragmentasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Tidak jelasnya mekanisme; sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan; pembagian tugas pokok; kewenangan, fungsi, dan tanggung jawab dari pelaku kebijakan juga akan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

5. Penilaian Kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah eksekutif, legislatif, dan peradilan (yudikatif) memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Jika digambarkan dalam diagram akan tampak tahap-tahap dalam pembuatan kebijakan sebagaimana tampak pada tabel berikut (Dunn, 2003: 24, dengan sedikit perubahan).

Tabel 5.2 Tahap-Tahap dalam Pembuatan Kebijakan

FASE	KARAKTERISTIK	ILUSTRASI
Penyusunan Agenda	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang diagendaikan yang mungkin perlu segera ditangani dan mungkin dipandang masih bisa ditunda.	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang penting sekali untuk mewujudkan hak-hak anak sebagai bagian dari perlindungan anak Indonesia.
Formulasi Kebijakan	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan memandang perlu adanya perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempertimbangkan dikeluarkannya peraturan menteri tentang Sekolah Ramah Anak sebagai bagian dari upaya perlindungan anak Indonesia.

Adopsi Kebijakan	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di lembaga ataupun keputusan peradilan.	Dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 dimaksudkan sebagai acuan bagi sekolah untuk pengembangan kebijakan dan program Sekolah Ramah Anak.
Implementasi Kebijakan	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang ada dengan menggerakkan berbagai sumber daya, baik finansial maupun manusia.	Pemda Gunungkidul (cq. Dinas Pendidikan) menca- nangkan implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak dengan menggerak- kan sekolah-sekolah agar membuat kebijakan dan program untuk mewu- jutkan Sekolah Ramah Anak bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dan yang peduli pada pendidikan.

Penilaian Kebijakan	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.	Badan Pemeriksa Keuangan memantau program-program Sekolah Ramah Anak terkait penggunaan dana pemerintah maupun dari masyarakat. Peneliti yang dipekerjakan oleh pemerintah meneliti keberhasilan kebijakan dan program-programnya yang telah dilaksanakan.
---------------------	---	---

Kebijakan Sekolah Ramah Anak merupakan formulasi kebijakan publik yang disusun oleh UNICEF yang diratifikasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Permen KPPA Nomor 8 Tahun 2014 untuk diimplementasikan di Indonesia. Permen KPPA ini merupakan formulasi kebijakan nasional Indonesia yang berlaku pelaksanaan (implementasinya) di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali di wilayah pesisir.



6

INTERPRETASI KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

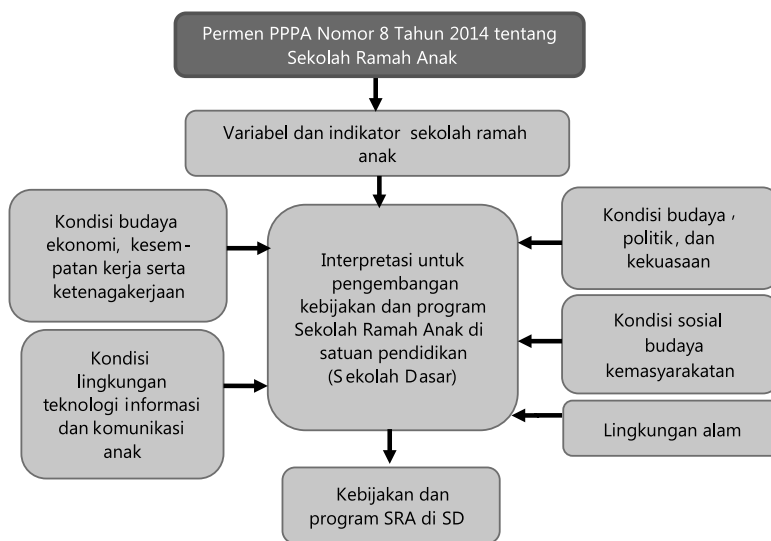
Sebagaimana telah ditulis di bab sebelumnya bahwa dalam tahap implementasi kebijakan meliputi tiga tahapan, yaitu tahap interpretasi, tahap organisasi, dan tahap aplikasi. Tahap interpretasi adalah tahap penguraian pokok dari suatu kebijakan atau program yang bersifat abstrak agar lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga dapat dimengerti oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan kebijakan sekolah Ramah Anak di sekolah, para pemangku kepentingan sekolah penting melakukan interpretasi terhadap kebijakan Sekolah Ramah Anak. Kebijakan yang ada dalam level nasional, provinsi, dan kabupaten diinterpretasi oleh para pelaku pendidikan di sekolah dengan menguraikan ke dalam pokok-pokok kebijakan dan program Sekolah Ramah Anak, sehingga kebijakan dan program menjadi operasional dan kontekstual dengan lingkungan sekolah. Dengan demikian, para pelaku pendidikan di sekolah, yaitu guru, orang tua, dan masyarakat memahami dan mengerti kebijakan serta program Sekolah Ramah Anak di setiap sekolah.

Dalam tahap interpretasi ini kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat perlu duduk bersama untuk mengembangkan kebijakan dan program Sekolah Ramah Anak. Pengembangan kebijakan yang dimaksudkan dalam tahap ini adalah mengembangkan kebijakan dan program Sekolah Ramah Anak di tingkat satuan pendidikan (SD) sebagai implementator kebijakan. Setiap sekolah memiliki konteks sosial, budaya, dan pendidikan yang tidak sama persis dengan sekolah lain, sehingga sekolah perlu untuk mengembangkan kebijakan di sekolah masing-masing, maka program relevan dan cocok dengan kebutuhan sekolah.

Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Indonesia dikeluarkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dimaksudkan sebagai acuan bagi sekolah untuk mengembangkan kebijakan dan program. Selain itu, hasil penelitian tentang variabel dan indikator Sekolah Ramah Anak di kawasan pesisir DIY (Mami Hajaroh: 2015) menunjukkan bahwa kawasan pesisir memiliki karakteristik dalam aspek kondisi lingkungan alam, kondisi sosial budaya kemasyarakatan, kondisi budaya politik dan kekuasaan, kondisi budaya ekonomi, kesempatan kerja serta ketenagakerjaan, serta kondisi lingkungan teknologi informasi dan komunikasi yang memerlukan analisis kebijakan tersendiri dalam merumuskan kebijakan Sekolah Ramah Anak. Alur pengembangan kebijakan dan program sekolah dalam kerangka implementasi SRA dapat dilihat pada gambar 6.1.

Kebijakan pendidikan dalam hal ini kebijakan pendidikan ramah anak tidak lagi berbicara tentang kebijakan dalam konteks nasional, tetapi sudah dalam kebijakan lokal, baik lokal di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan paling kecil tingkat sekolah (satuan pendidikan). Kebijakan di tingkat sekolah sangat erat terkait dengan otonomi daerah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau MBM (Manajemen Berbasis Masyarakat). Jika membahas tentang Sekolah Ramah Anak dalam hal

ini SRA di kawasan pesisir, maka sesungguhnya membahas kebijakan berbasis sekolah atau kebijakan berbasis masyarakat karena sekolah menjadi bagian dari masyarakat. Interaksi antara sekolah dan masyarakat merupakan interaksi yang saling memengaruhi.



Gambar 6.1 Alur perumusan kebijakan SRA

Sekolah dan masyarakat merupakan dua institusi penting dalam pendidikan. Masyarakat bisa memengaruhi apa yang terjadi dalam institusi pendidikan atau institusi pendidikan sebetulnya bisa mentransfer ke masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan Sekolah Ramah Anak di kawasan pesisir pantai wisata diawali dengan mengembangkan dan merumuskan kebijakan pendidikan di tingkat sekolah, berarti sekolah (kepala sekolah dan guru), dinas pendidikan dan masyarakat bersama-sama merumuskan masalah dan menemukan solusi masalah dalam bentuk kebijakan sekolah. Yang terjadi selama ini ketika melakukan analisis masalah pendidikan dan mengembangkan serta merumuskan kebijakan pendidikan di sekolah sebagai solusi masalah pemerintah lebih sering melakukan studi banding ke negara-negara lain yang sesungguhnya negara-negara itu memiliki kondisi sosial budaya yang

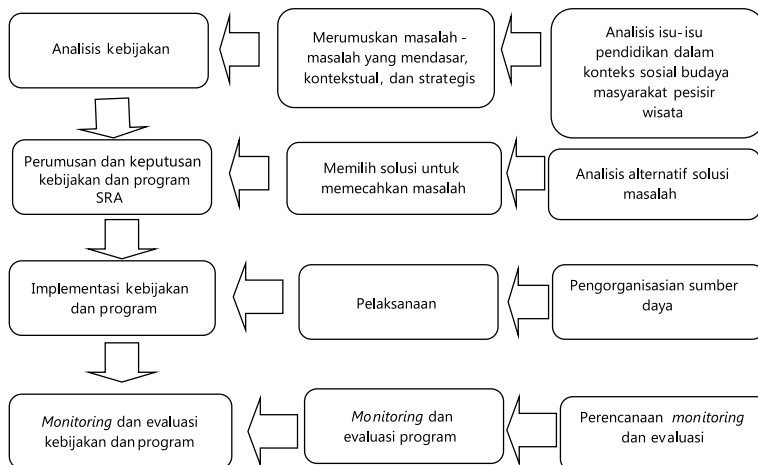
tidak sama dengan kondisi-kondisi lokal daerah-daerah di Indonesia. Konstruksi masalah negara Amerika dan cara berpikir Amerika tidak sama dengan konstruksi dan cara berpikir masyarakat Indonesia.

Aktor kunci dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebenarnya adalah masyarakat karena itu sangat penting peran masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan termasuk dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak. Bila sekolah menerapkan MBS, maka berapa persenkah peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah? Berapa persen kegiatan-kegiatan dan program sekolah dimotori oleh masyarakat? Bila peran berimbang antara sekolah dan masyarakat, maka 50% masyarakat berperan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sudahkah ini terjadi di sekolah-sekolah? Peran serta masyarakat dalam pendidikan itu banyak bentuk. Bentuk yang paling sederhana adalah *volunteerism*. Ketika sekolah mau menerapkan MBS, kita dapat berpikir secara sederhana dengan melihat seberapa banyak orang tua atau anggota masyarakat yang menjadi relawan di sekolah. Hal ini merupakan ukuran yang paling sederhana dan paling mudah digunakan. Mengapa sekolah memerlukan peran serta masyarakat jadi relawan? Sering kali kita berpikir bahwa orang tua tidak punya keahlian, tidak punya *knowledge*, tidak punya pengetahuan yang bisa dibagi dengan sekolah padahal justru di *institution of family* itu punya *resources* (sumber daya) yang begitu besar. Sumber daya ini akan semakin besar bila dilibatkan dalam pendidikan, sehingga semakin besar *support* atau bantuan yang diberikan untuk sekolah tidak hanya dalam bentuk tenaga, tetapi bisa juga dalam penyelenggaraan pendidikan. Seperti yang terjadi di Amerika, *funding* (dana) penyelenggaraan pendidikan juga dari orang tua karena mereka menyaksikan sendiri apa yang terjadi di sekolah, kemudian menyaksikan sendiri *resources* yang ada di sekolah dan mereka bisa menyaksikan sendiri demi kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah itu. Jadi, mereka berpikir kalau ingin anaknya

maju di sekolah itu, daripada menyalahkan guru, mereka akan menjadi bagian dari solusi memecahkan masalah, bukan yang hanya bagian dari masalah itu.

Peran-peran masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah, antara lain sebagai advokat yang memberikan masukan atau menjadi dewan pertimbangan atau dewan pendidikan; sebagai pendukung, misalnya guru kewalahan menagani 30 siswa di kelas, lalu guru merekrut atau memberikan *training* asisten dari wali murid siswa di kelas yang peduli dengan pendidikan anaknya. Guru berdiskusi tentang kurikulum yang diajarkan dan cara mengajar di kelas. Setelah guru berbagi dengan orang tua, saya bertanya bagaimana mengajarkan secara efektif; sebagai pengontrol atau *monitoring* atau supervisi. Apakah sekolah siap menerima peran masyarakat itu? Hal ini berhubungan dengan *accountability* dan *transparency*, sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat.

Manajemen berbasis sekolah mengharuskan sekolah senantiasa melakukan analisis dalam mengembangkan dan merumuskan kebijakan serta program sekolah berbasis konteks sosio-kultural sekolah. Terdapat 4 hal yang harus kita pahami bagian dari kebijakan, yaitu analisis kebijakan, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Empat langkah ini merupakan prosedur dari proses kebijakan yang dilakukan oleh sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Proses kebijakan Sekolah Ramah Anak di tingkat satuan pendidikan di kawasan pesisir wisata dapat dilihat seperti bagan berikut:



Gambar 6.2 Proses Perumusan Kebijakan Sekolah Ramah Anak

TAHAP 1: ANALISIS KEBIJAKAN

Analisis kebijakan bermakna *analysis of policy determination* menekankan pada proses kebijakan, bukan analisis pada dampak kebijakan. Analisis kebijakan dalam hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan dikembangkan dengan cara yang tepat. Dalam analisis kebijakan untuk mengembangkan kebijakan diawali dengan analisis isu-isu pendidikan dalam konteks sosial budaya masyarakat dan merumuskan temuan masalah-masalah tepat yang memerlukan solusi dengan kebijakan dan program pendidikan. Dua langkah ini, yaitu analisis isu-isu kebijakan dan merumuskan masalah-masalah kebijakan yang tepat merupakan langkah terpenting dalam serangkaian perumusan kebijakan, karena dalam proses kebijakan lebih sering terjadi kesalahan dalam merumuskan masalah daripada salah dalam merumuskan solusi masalah. Kesalahan dalam merumuskan masalah meskipun mendapatkan solusi yang tepat tetap tidak dapat menyelesaikan masalah yang sebenarnya dalam masyarakat.

1. Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dalam Konteks Sosial Budaya Masyarakat Pesisir Wisata

Analisis masalah-masalah pendidikan merupakan aktivitas untuk menelaah akar masalah dari masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat pesisir wisata di Gunungkidul. Dalam menelaah, penting memperhatikan karakteristik dari masyarakat pesisir dalam aspek: Lingkungan alam; Kondisi budaya ekonomi dan kesempatan kerja serta ketenagakerjaan; Kondisi budaya sosial kemasyarakatan; Kondisi budaya politik dan kekuasaan; Kondisi lingkungan komunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi.

Daerah selatan DIY merupakan kawasan rawan gempa, terlebih daerah pesisir jika terjadi gempa dengan kekuatan besar menjadi kawasan rawan tsunami. Kawasan pesisir Gunungkidul dalam 5 tahun terakhir mengalami perubahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan wisata berdampak pada perubahan sosial ekonomi masyarakat. Perubahan sosial ekonomi ini bisa positif maupun negatif. Perubahan yang terjadi karena alih fungsi lahan penting untuk diantisipasi oleh dunia pendidikan dengan Sekolah Ramah Anak.

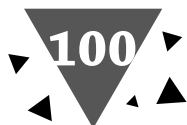
Permasalahan dampak negatif dari pariwisata yang kerap dirasakan oleh pihak sekolah terkait perkembangan anak adalah adanya tindakan asusila yang dilakukan oleh para wisatawan di tempat-tempat sepi di sekitar pantai yang kemudian dilihat, bahkan direkam oleh anak-anak SD di sekitar pantai, masalah anak-anak SD yang lebih senang menjadi pedagang asongan atau membantu ibunya berdagang di pantai pada jam sekolah, anak-anak SD yang lebih senang menjadi petugas parkir daripada mengikuti pelajaran tambahan (les).

Di samping masalah-masalah di atas, ada pula dampak positif secara ekonomis. Perubahan kultur masyarakat dari petani dan nelayan ke arah pengelolaan wisata laut telah membawa

perubahan yang signifikan dalam hal peningkatan penghasilan dan status sosial ekonomi warga. Namun, perubahan positif juga terjalin dengan adanya dampak negatif bagi pendidikan. Sebagaimana disampaikan oleh para guru, banyak orang tua yang secara ekonomi berkecukupan, tetapi tidak mempunyai keinginan dan apresiasi yang tinggi untuk pendidikan anak-anaknya. Biaya sekolah kalau bisa ditekan serendah mungkin, bahkan dengan adanya kebijakan wajib belajar pendidikan dasar (tanpa biaya orang tua) mereka berharap pula seluruh biaya sekolah ditanggung pemerintah.

Kedatangan wisatawan domestik maupun asing dengan budayanya memberikan dampak pada perubahan nilai-nilai, cara berpikir, pola-pola perilaku dan gaya hidup yang positif maupun negatif. Pengaruh negatif pada budaya lokal dan berdampak buruk pada anak perlu diantisipasi dengan Sekolah Ramah Anak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dialami pula oleh anak-anak di kawasan pesisir. Hal ini memberikan peluang anak-anak untuk mengakses informasi. Hanya saja informasi yang diakses oleh anak-anak sering kali informasi negatif yang merugikan, bahkan merusak mental dan moral anak. Oleh karena itu, Sekolah Ramah Anak mengembangkan pendidikan pada anak agar anak dapat mengakses informasi dengan etika teknologi, sehingga dapat memilih dan mengambil manfaat dari perkembangan informasi teknologi tersebut. Informasi yang diakses menjadi sumber belajar anak.

Kabupaten Gunungkidul menyatakan sebagai kabupaten layak anak. Salah satu cara dalam mewujudkan kabupaten layak anak adalah menyelenggarakan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Walaupun demikian, berbagai problem telah dihadapi oleh guru-guru terkait pendidikan inklusi di sekolah inklusi tersebut. Kebijakan ini ditetapkan pada tahun 2014 dengan memperhatikan kondisi Gunungkidul yang memiliki anak difabel terbanyak



dibandingkan daerah lain di DIY. Hampir dalam setiap 100 anak terdapat 2-5 anak difabel tergantung kondisi daerahnya masing-masing.

Anak-anak ABK meskipun dalam satu sekolah dengan anak-anak normal, namun sesungguhnya mereka tidak mungkin mengikuti kurikulum reguler. Mereka tetap memerlukan kurikulum dan pembelajaran yang khusus pula. Pada anak ABK tidak berkeharusan untuk mengikuti ujian akhir nasional. Pada anak-anak ABK yang memungkinkan bisa melanjutkan ke jenjang SMP yang akan diikutsertakan dalam UAN. Namun, orang tua lebih sering meminta kepada sekolah supaya anaknya dapat mengikuti UN dan lulus seperti layaknya anak-anak normal lainnya. Pada tahun 2014, 30 anak difabel mengikut Ujian Nasional dengan kondisi yang sebenarnya tidak mampu untuk mengikutinya.

Hal lain yang masih menjadi masalah adalah keselarasan kebijakan di sekolah dan rumah. Kebijakan dan program yang ditetapkan di sekolah tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Adanya telepon seluler pintar dikawatirkan berdampak kurang baik bagi anak dan dengan mudah memengaruhi perilaku anak-anak. Sekolah melarang anak untuk menggunakan telepon seluler pintar, akan tetapi di rumah anak dengan bebas dapat menggunakannya. Apabila orang tuanya tidak bisa memakai telepon seluler, anak-anak menilai orang tuanya itu *jadul* atau *katrok*, sehingga orang tua dianggap bukan pengemban nilai-nilai utama yang perlu diteladani dan dipatuhi.

2. Merumuskan Masalah-Masalah yang Mendasar, Kontekstual dan Strategis untuk diselesaikan

Dalam merumuskan masalah-masalah dalam kerangka pengembangan dan perumusan kebijakan, khusus untuk kebijakan pendidikan ramah anak di Kabupaten Gunungkidul

terutama di daerah pesisir pantai, ada 4 aspek mendasar yang penting untuk diperhatikan. *Pertama*, melihat yang paling dasar, yaitu lingkungannya seperti apa, kondisi geografisnya maupun iklim. Lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan program apa yang tepat untuk menjadi solusi masalah. *Kedua*, tentang murid (anak). Karakter murid-murid tidak lepas dari karakter masyarakat karena anak itu adalah produk dari masyarakat. Aspek *ketiga* adalah seperti apa masyarakatnya. Kondisi masyarakat pesisir memiliki tipikal tertentu atau tidak karena lingkungan membentuk karakter. Ketika kita tahu karakter muridnya seperti apa, maka aspek *keempat* yang mendasar adalah kurikulum. Bagaimana kurikulum yang sesuai, cocok, tepat untuk mendidik masyarakat kawasan pesisir wisata?

Oleh sebab itu, dalam merumuskan masalah-masalah kebijakan maupun dalam menentukan solusi atas masalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memiliki peran penting. Dengan MBS, kebijakan dan program sekolah yang disusun ada analisisnya, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Analisis biasanya itu dilakukan oleh para ahli karena memang perlu yang sedikit rumit, perumusan ini 50:50 masyarakat punya andil yang sangat besar, kebijakan tidak bisa jadi instan satu malam. Pelaksanaan, peran masyarakat sangat lebih penting daripada perumusan. Kebijakan kalau sudah dibuat bahasanya itu biasanya bahasa yang mewah, ideal, "*ndakik-ndakik*" yang terjadi penerjemahan atau interpretasi. *Policy interpretation* itu sangat beragam dan krusial bagian pelaksanaannya. Interpretasi akan berbeda jika masing-masing individu punya pemahaman atau *understanding* yang berbeda terhadap kebijakan itu. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang kurikulum tidak bisa ditelan mentah-mentah melakukan implementasi tanpa ada interpretasi dari kurikulum itu. Membantu para orang tua untuk memahami apa yang perlu dilakukan ketika kita ingin membuat kebijakan, sama

halnya ketika kita bicara tentang guru. Dalam konteks pesisir, guru harus mengerti kondisi lingkungan dan kondisi murid. Guru yang profesional itu yang seperti apa?

Membuat kebijakan pendidikan yang menyeluruh dan terintegrasi dapat mengakomodasikan seluruh elemen untuk mempromosikan atau mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, *friendly* untuk belajar, dan ramah bagi penghuninya. Ketika kita di dalam kelas, yang terjadi semestinya hanya belajar bukan mengajar. Guru belajar bagaimana berbagi pengetahuan (*share knowledge*) dengan siswa, dalam waktu yang sama guru belajar memahami siswa, guru belajar apa yang dimiliki oleh siswa, guru belajar bagaimana mengajar lebih baik. Dalam filosofi pendidikan *critical pedagogy* dinyatakan bahwa pembelajaran itu adalah proses menciptakan ilmu yang dilakukan oleh guru, murid, dan masyarakat secara bersama-sama.

TAHAP 2. PERUMUSAN KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Dalam tahap merumuskan kebijakan, langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun berbagai solusi alternatif yang mungkin dapat menyelesaikan masalah. Pelaku pendidikan mendiskusikan solusi-solusi yang mungkin dapat dilakukan. Kebijakan di tingkat satuan pendidikan merupakan arah konkret yang dilakukan oleh sekolah untuk menciptakan Sekolah Ramah Anak. Oleh karena itu, dalam menyusun solusi-solusi alternatif dan merumuskan kebijakan serta program, sekolah sesungguhnya melakukan 2 hal:

- ❁ Sekolah sebagai implementator program yang telah disusun oleh pembuat kebijakan di atasnya.
- ❁ Sekolah menginterpretasi kebijakan dari atas, kemudian merumuskan program dan kegiatan sesuai konteks sosial budaya sekolah.

Kebijakan Sekolah Ramah Anak merupakan kebijakan nasional yang disusun untuk kepentingan nasional Indonesia yang memiliki budaya yang tidak sama. Kawasan pesisir merupakan kawasan khas yang memiliki karakteristik yang tidak sama dengan sekolah di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Pesisir di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di wilayah Kabupaten Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul masing-masing juga memiliki karakteristik yang tidak sama persis. Dari kebijakan nasional (Permen KPPPA 2014) dan penelitian tentang variabel dan indikator Sekolah Ramah Anak di kawasan pesisir DIY (Mami Hajaroh, dkk, 2015), penting untuk digunakan sebagai arah utama yang diinterpretasi oleh sekolah untuk merumuskan program dan kegiatan sekolah untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak di kawasan wisata pesisir di Gunungkidul.

1. Analisis Alternatif Kebijakan dan Program Sekolah Ramah Anak

Dalam merumuskan solusi alternatif kebijakan dan program pada masalah yang telah dianalisis sebelumnya, kepala sekolah, guru, wali murid, dan anggota masyarakat berdiskusi. Sebagai contoh diskusi penyusunan solusi alternatif kebijakan dan program Sekolah Ramah Anak sebagai berikut:

Tabel 6.1 Analisis Solusi Alternatif Program dan Kegiatan Sekolah Ramah Anak

Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3
Guru pengampu di dalam pendidikan itu harus profesional.	Setiap sekolah membuat "paguyuban pengasuhan anak."	Menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari gangguan, ancaman, intimidasi, kekerasan, dan keadilan pada anak.

Pendidikan religius.	Sekolah wajib memasukkan tema kewirausahaan untuk wisata kawasan pantai/ pesisir dalam mata pelajaran SBK.	Menciptakan pembelajaran berbasis kearifan lokal masyarakat pesisir, misalnya <i>outbond</i> , ekstrakurikuler.
Program <i>parenting</i> diadakan untuk lebih mengoptimalkan lagi pemahaman dan kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak.	Sekolah wajib mengembangkan tema pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> • Wisata pesisir. • Mitigasi bencana. • Pemanfaatan IT beretika. 	Memanfaatkan IPTEK sebagai daya dukung pembelajaran (misalnya anak diajarkan mempromosikan wisata pantai atau produk).
Mengemas kurikulum yang ada tanpa menghilangkan kearifan lokal, apa pun kurikulumnya.	Sekolah mengadakan lomba atau olimpiade karawitan untuk wisata pantai.	Tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang sesuai dengan situasi kondisi daerah pesisir.
Anak dibekali ilmu kewirausahaan yang mumpuni karena melihat potensi wisata yang berkembang dalam 10 atau 15 tahun ke depan tidak akan menjadi masalah.	Larangan siswa berada di kawasan pantai pada jam belajar.	Pemahaman dampak negatif industri pariwisata pesisir (miras, seks bebas, narkoba, dan lain-lain).

Menambahkan ekstrakurikuler yang sesuai. Banyak sekali ekstrakurikuler yang tidak sesuai dengan apa yang ada di lingkungan sekarang, misalnya bahasa Inggris, maka apabila anak berjualan di pantai tidak membahayakan.	Kerjasama dengan Tim SAR untuk <i>monitoring</i> anak sekolah yang berada di pantai ketika jam belajar.	Peningkatan kompetensi pedagogik guru mengenai Sekolah Ramah Anak (cara mendidik yang seharusnya, tidak melanggar HAM, dan sebagainya).
---	---	---

Analisis dari setiap alternatif solusi sebagai berikut:

a. Guru Profesional

Guru profesional yang dimaksud oleh kelompok diskusi adalah menempatkan bapak/ibu guru sesuai dengan latar belakang kehidupannya. Ada guru yang dari kota Yogyakarta ditempatkan di kawasan pesisir, sementara mereka tidak mengenal situasi sosial dan budaya masyarakat pesisir. Guru profesional yang dimaksudkan adalah mereka yang bertugas tidak terlalu jauh dari lokasi tempat guru mengajar, sehingga mengetahui seluk beluk daerah, jadi pengajarannya tidak mengambang. Oleh karena itu, penting menyoroti tentang penempatan guru di daerah pesisir.

Guru itu putra daerah, sehingga tahu dan menghayati benar tentang kultur budaya daerahnya ini tidak disepahami oleh kelompok lain. Idealnya memang guru yang ditempatkan di suatu daerah sudah mengenal betul kondisi daerah tempat ia bertugas, akan tetapi negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan sekian macam karakteristik yang berbeda-beda, maka guru di suatu

daerah bisa berasal dari daerah lain. Penempatan guru tidak semudah sebagaimana idealnya tadi, bahwa yang mengajar di sebuah daerah tertentu itu harus mereka yang tinggal di sekitar sekolah itu kan jelas akan "*juddeg*" kepala dinas. Kebijakannya nanti adalah siapa pun warga negara Indonesia bisa mengajar di seluruh Nusantara, bahkan di kepulauan-kepulauan terpencil itu. Yang penting bukan hal itu, tetapi guru-guru itu bisa menghayati terhadap konteks budaya sosial tempat dia mengajar. Ketika guru dari mana pun asalnya bisa beradaptasi dan memiliki penghayatan. Jadi, memang tampaknya kalau guru harus berdomisili di sekitar sekolah ini akan "*mumet, gawe omah yo larang*" mungkin yang penting adalah menghayati situasi sosial dan budaya tempat guru mengajar.

Bila guru berasal dari daerah lain dan belum mengenal kondisi sosial dan budaya masyarakat tempat ia bertugas dapat disusun dalam kebijakan, lebih pada bagaimana memberikan keterampilan sosial dan keterampilan budaya lokal kepada guru yang mengajar di kawasan pesisir. Siapa pun guru yang masuk di kawasan itu diperkenalkan atau diberikan pelatihan langsung tentang budaya di masyarakat kawasan wisata itu. Mungkin guru tidak domisili di tempat tugas, akan tetapi kalau di-*training* selama seminggu diajak tinggal, mungkin ini bisa jadi kebijakan. Kebijakan bukan dari Dinas Pendidikan, tetapi dari masyarakat itu sendiri. Guru wajib tinggal selama sebulan atau dua bulan di situ dan oleh masyarakat itu diperkenalkan tentang budaya daerah setempat, jika nanti sudah paham dipersilakan untuk tinggal di Yogyakarta atau kawasan pesisir. Yang penting guru sudah mengenali kawasan tentang guru bertugas. Bisa saja kebijakan dari masyarakat itu mewajibkan setiap guru baru yang datang ke sekolah itu dan dia dari luar daerah wajib

dalam satu bulan atau satu minggu "*ngenger*." Masyarakat wajib mengenalkan guru ini dengan kawasan tersebut, sehingga dia tahu budaya setempat, mungkin bisa menjadi kebijakan masyarakat untuk guru yang baru saja datang.

Ada 4 kriteria besar dalam profesionalisme guru, salah satunya adalah di mana pun sekolah itu berada, siapa pun guru yang ditugaskan untuk mengajar di sekolah itu, yang harus dimiliki guru adalah harus memiliki pengetahuan tentang sosial, politik, budaya dari sekolah tersebut. Bukan berarti orang yang telah tinggal memahami budayanya karena bukan sesuatu yang terlihat dan tidak kasat mata, sesuatu yang harus digali termasuk oleh masyarakat setempat. Misalnya, kondisi tentang Indonesia atau tentang pendidikan nasional justru orang asing lebih menguasai daripada akademis kita sendiri, karena mereka betul-betul melakukan penelitian yang melihat secara detail dan spesifik tentang masalah pendidikan nasional, sedangkan kita merasa yang sudah hidup dalam konteks itu ditelan mentah-mentah saja.

b. Kewirausahaan

Di kelompok kedua sebenarnya bagus, tetapi semua yang ditulis itu terlalu spesifik. *Pertama*, setiap sekolah membuat paguyuban pengasuhan anak, hal ini merupakan suatu program yang sangat spesifik. *Kedua*, sekolah wajib memasukkan tema kewirausahaan, programnya adalah kewirausahaan. Hampir semua yang ditulis adalah program. Saat ini anggaph kebijakan ramah anak sudah dibuat, maka kelompok kedua bisa dijadikan contoh untuk membuat program berbasis Sekolah Ramah Anak. Membuat kebijakan jangan mengikuti tren masa kini, tetapi untuk masa depan. Kebijakan untuk jangka pendek, meneng-

ah, dan jangka panjang. Jangka pendek yang dimaksud tidak hanya di tahun ini. Jangka pendek lebih ke lima tahun, jangka menengah 10 tahun, dan jangka panjang 25 tahun. Kita harus mampu melihat kondisi kawasan pesisir agar kebijakan yang dibuat bisa cocok dengan kondisi tersebut, bukan hanya saat ini namun 10 tahun ke depan. Kita akan membuat kebijakan yang akan menyiapkan anak di kawasan pesisir bukan sebagai objek pertumbuhan kawasan pesisir, tetapi aktor/pelaku utama pertumbuhan kawasan pesisir 10 tahun ke depan. Ketika kita bicara program, maka kita berbicara mengenai *developing skill*, pengembangan keterampilan individu. Apabila kawasan ini ingin menjadi kawasan pesisir yang berkembang, maka kita perlu kemampuan misalnya manajemen kawasan pariwisata. Jika ada manajemen pariwisata, maka akan ada banyak sistem pendukung. Sistem pendukung dalam wisata misalnya biro jasa, fasilitas umum, dan kuliner. Hal itu adalah kondisi ketika kita bicara tentang program, anak-anak bisa menjadi pelaku utama dalam hal itu, bukan sekadar misalnya kuliner yang punya adalah orang Jakarta, anak bapak/ibu hanya sebagai pelayan, itu harus dipikirkan.

Apa yang ditulis kelompok dua cocok menjadi contoh perumusan program. Di situ kita lihat juga membahas tentang kewirausahaan. Bagaimana membuat program yang mampu menumbuhkan keterampilan kewirausahaan pada anak-anak nanti 10 tahun ke depan. Dari hal-hal kecil, misalnya kita mau mereka jadi anak yang soleh, maka apa yang akan kita lakukan dari sekarang itu adalah program. Kerja sama dengan tim SAR untuk *monitoring* anak sekolah yang berada di kawasan pantai pada jam belajar dan peningkatan kompetensi pedagogis guru mengenai Sekolah Ramah Anak serta cara mendidik anak yang baik, tidak melanggar HAM, dan sebagainya. Program apa

yang harus dibuat supaya guru mengerti pemahaman tentang pendidikan ramah anak bukan lagi sekolah karena sudah berhubungan dengan guru, misalnya kita bicara tentang metode pembelajaran yang ramah anak.

Untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, maka sekolah menyusun program dan kegiatan konkrit agar anak dan guru merasa nyaman di sekolah. Misalnya membiasakan perilaku respek kepada diri sendiri dan orang lain, guru mesti respek kepada siswa, baik dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Siswa saling respek satu sama lain dan guru dengan guru juga saling respek. Oleh karena itu, sekolah memiliki program tidak mengizinkan terjadinya perilaku *bullying* di sekolah. Kawasan pesisir Gunungkidul memiliki potensi wisata yang tengah berkembang. Agar sekolah nyaman sebagai tempat berkembang anak, maka sekolah perlu menyiapkan anak supaya dapat tumbuh dan tetap eksis di tengah kehidupan kepariwisataan pantai. Salah satu program yang dapat dilakukan sekolah membantu siswa mengembangkan kewirausahaan berbasis sumber daya kawasan pesisir. Keterampilan mengolah hasil-hasil laut dalam bentuk makanan, kerajinan, maupun kesenian dapat dilakukan sekolah melalui pembelajaran SBK. Kebijakan ini lebih spesifik, yang akan dilakukan oleh sekolah itu mungkin sekolah lain dalam rangka menciptakan Sekolah Ramah Anak. Kalau mungkin dekat dengan pantai, mungkin sekolah ini akan mengembangkan *snorkling* atau mungkin *surfing*, dengan membuat ekstrakurikuler nya.

Pada tingkat operasional di sekolah, kebijakan merupakan pedoman, *blue print* (cetak biru) yang akan digunakan sebagai acuan kegiatan. Semua kegiatan sekolah mengacu pada kebijakan sekolah. Kebijakan bukan konsep, kebijakan tidak lagi merumuskan, tetapi merupakan rumusan itu sendiri. Bila sekolah membuat kebijakan seperti: *Bersama stakeholder sekolah merumuskan konsep sekolah ramah anak yang dikehendaki* ini



bermakna sekolah sedang merumuskan kebijakan karena kalimat ini bukan *statement* kebijakan. Sekolah sedang merumuskan kebijakan. Rumusan kebijakan dengan bahasanya seperti: *Sekolah yang nyaman dan mampu mengembangkan potensi wisata kawasan pesisir*. Jika sekolah memiliki kebijakan sekolah mendorong para siswa untuk belajar bersama orang tua, maka program dapat berupa satu jam dalam satu hari belajar bersama orang tua. Hal ini menunjukkan bahasa kebijakan dan bahasa program. Kalau kebijakan itu sifatnya lebih idealis, membayangkan idealnya kalau partisipasi orang tua itu adalah orang tua terlibat dalam pembelajaran anak, itu bahasa kebijakan, sedangkan bahasa program adalah setiap siswa wajib meluangkan waktu satu jam didampingi oleh orang tua. Bahasa kebijakan biasanya adalah kata kerja aktif, kata menciptakan, memanfaatkan, bukan tersedianya tetapi menyediakan, bukan pemahaman tetapi memahamkan atau memberikan pemahaman. Bahasa kebijakan biasanya menghindari kata yang mengulang-ulang.

Membahas kebijakan berarti pertama berbicara tentang kewenangan dan *power*, setiap elemen dalam sebuah kelembagaan dan setiap institusi itu pasti punya kewenangan yang berbeda. Kedua, berbicara tentang kesejahteraan bersama. Kebijakan berkaitan dengan masalah politik dan politik secara esensialnya berkaitan dengan kesejahteraan, maka sebuah kebijakan harus menyejahterakan bersama. Dalam pendidikan ada 4 elemen yang harus memperoleh kesejahteraan bersama dalam Sekolah Ramah Anak, yaitu: Ketersediaan sarana prasarana belajar yang mendukung konsep SRA; Ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten dan memahami konsep SRA; Biaya pendukung terwujudnya SRA dari berbagai pihak (pemerintah, wali murid, donatur, dan lain-lain); Kesamaan cara pandang antara pihak sekolah, komite, dan instansi terkait pengelolaan Sekolah Ramah Anak.

2. Memilih Solusi Pemecahan Masalah

Pada diskusi tahap pertama tersusun beberapa alternatif solusi untuk memecahkan masalah pendidikan di kawasan pesisir wisata. Selanjutnya dilakukan diskusi kedua untuk memilih alternatif solusi. Untuk ini peserta diminta mencermati kembali hasil diskusi kelompok tahap pertama. Diskusi kedua membuat kelompok baru, bercampur dari berbagai sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, dan masyarakat (*stakeholder*). Hasil diskusi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6.2 Penyusunan Alternatif Tahap 2

Kelompok 1	Kelompok 2
Mengintegrasikan pembelajaran berbasis kearifan lokal pada kurikulum.	Menciptakan kondisi sekolah yang aman dan nyaman.
Meningkatkan kompetensi guru tentang pembelajaran di wilayah pesisir.	Menciptakan pembelajaran di sekolah berbasis budaya dengan tembang dan dolanan tradisional daerah pesisir untuk menanamkan budi pekerti pada anak.
Mewujudkan siswa yang kreatif dan peduli terhadap lingkungan.	Melibatkan guru dan siswa dalam penyelenggaraan perayaan di pantai.
Menciptakan lingkungan yang kondusif, nyaman, dan aman.	Menjalin kerja sama dengan orang tua dan wali yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan potensi anak.
Mendorong partisipasi aktif wali murid terhadap pembelajaran tumbuh kembang anak.	

Melihat pada kebijakan yang telah ditulis masing-masing kelompok, ada banyak hal yang hilang, yang pertama konsep ramah anak sudah tidak terlihat, padahal kita akan membuat kebijakan Sekolah Ramah Anak di kawasan pesisir. Yang pertama,

mengintegrasikan pembelajaran kearifan lokal pada kurikulum, terlepas itu ramah anak atau tidak, Sisdiknas dalam kebijakan nasional telah bicara mengenai *local wisdom*. Jadi, ini sangat umum, levelnya masih nasional. Selanjutnya, meningkatkan kompetensi guru tentang pembelajaran di wilayah pesisir. Hal ini tidak mengacu pada ramah anak, tetapi hanya mengacu pada *locality*-nya.

Mewujudkan siswa yang kreatif dan peduli terhadap lingkungannya ini juga masih sangat umum dan general. Menciptakan kondisi sekolah yang aman dan nyaman. Apabila saya memiliki sekolah di kota yang sudah punya institusi yang baik, apakah saya berarti tidak menginginkan hal tersebut (aman, nyaman) di sekolah saya? Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan wali murid terhadap proses pendidikan anak, ini masih kebijakan nasional. Menciptakan pembelajaran di sekolah berbasis budaya dengan tembang dan dolanan tradisional anak pesisir untuk menanamkan pendidikan budi pekerti, ini sudah sangat teknis, sehingga lebih cocok sebagai program. Melibatkan guru dan siswa dalam penyelenggaraan perayaan di pantai juga merupakan program. Menjalin kerja sama masyarakat untuk meningkatkan potensi anak juga masih sangat umum.

Dalam merumuskan kebijakan pendidikan harus mengetahui tujuan pendidikan yang jelas dan terarah. Merumuskan kebijakan untuk membuat Sekolah Ramah Anak bukan berarti membuat sekolah, tetapi mengondisikan sekolah menjadi ramah anak. Kebijakan pendidikan yang ramah anak ada acuannya, apakah acuan dari bupati atau gubernur yang berbicara perkembangan anak sesuai potensi anak, potensi anak berbicara tentang lingkungan, perlindungan anak, dan masa depan anak ke depannya. SK kepala sekolah adalah aspek legal formal yang menjadi acuan dalam implementasi di sekolah.

Undang-undang yang diturunkan menjadi Peraturan Perundangan sifatnya masih umum. Konteks Sekolah Ramah Anak spesifik di Gunungkidul penting untuk mengembangkan konsep operasional dari Sekolah Ramah Anak dalam bentuk program dan kegiatan. Kebijakan yang masih konseptual dioperasionalkan dibuat oleh orang-orang yang berwenang, yaitu pihak yang mengetahui dan memahami kawasan pesisir, mempunyai ilmu perkembangan anak dan pendidikan. Dengan mengundang tokoh-tokoh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ketika membahas kawasan pesisir, mengundang pihak yang tahu betul kawasan pesisir dan mengundang orang tua yang memahami perkembangan anak mereka dalam melakukan operasionalisasi kebijakan ke dalam program dan kegiatan sekolah. Kebijakan bisa dievaluasi, artinya kebijakan yang bagus adalah yang bisa dievaluasi. Bila kalau tidak bisa dievaluasi, maka hal ini lebih kepada otoriter atau diktator. Kebijakan yang tidak bisa dioperasionalkan sesuai konteks, maka kebijakan ini akan lebih bersifat diktator (tidak bisa ditawar). Kebijakan yang bagus adalah sistematis. Kebijakan harus bisa membahas masing-masing elemen. Mencakup aspek-aspek yang dibahas, yang akan dimasukkan ke dalam konteks. Para pembuat yang berwenang adalah yang bisa memutuskan.

Bila akan menciptakan lingkungan kondusif dan nyaman, apakah lalu menginginkan sekolah di kota? Hal ini baik. Tetapi membuat kebijakan jangan mengikuti tren masa kini, tetapi untuk masa depan. Kebijakan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Anak-anak bukan objek kawasan pesisir, tetapi aktor atau pelaku di kawasan pesisir dalam 10 tahun ke depan. Pengembangan keterampilan individu di kawasan pesisir, seperti manajemen kawasan pariwisata. Sistem pendukung dalam wisata seperti biro jasa, fasilitas umum, dan kuliner. Anak-anak bisa menjadi pelaku utama dalam hal itu di masa depan. Bagaimana

membuat program kewirausahaan kepada anak-anak? Ide-ide besar untuk dijabarkan ke dalam program sekolah.

Ada keterkaitan konsep pendidikan tamansiswa, yaitu melihat potensi anak. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa guru sebagai pamong yang membimbing anak. Akan tetapi dalam membimbing anak di sekolah juga mengundang dari masyarakat untuk membantu pendidikan anak-anak mereka. Pendidikan tidak akan berhasil apabila sekolah dan masyarakat mempunyai cara pandang yang berbeda. Yang terjadi adalah idealisme yang bertentangan, dua-duanya tidak berhasil.

Konsep pendidikan tamansiswa dalam melihat potensi anak bahwa Ki Hajar ingin mengembangkan potensi anak bukan hanya berdasarkan aspek kognitifnya saja, tetapi jiwa dan raga anak tersebut secara keseluruhan, bukan sebagai individu yang terpisah dari masyarakat sekolah atau keluarga, tetapi bagian dari itu. Terkait hal tersebut sehingga Ki Hajar membuat asrama dalam konsep pendidikan mereka. Nama tamansiswa itu betul-betul sebuah konsep sekolah yang bukan di dalam kelas, tetapi melakukan pendidikan itu di taman untuk mendekatkan anak-anak tersebut dengan alam. Jadi, yang dibicarakan sebenarnya adalah pembelajaran yang kontekstual, *what is the konteks of learning from students when they are learning and sharing with the more knowledge-able person, seseorang yang knowledge-able* ini bisa guru atau dalam istilah Ki Hajar disebut pamong yang membimbing dan dalam konteks ini tidak harus seorang guru, tetapi mereka juga mengundang dari masyarakat untuk membantu pendidikan anak-anak tersebut. Menggunakan sistem *boarding school* atau asrama karena tidak ingin membedakan cara pandang di masyarakat, keluarga, dan sekolah. Pendidikan tidak akan berhasil apabila sekolah dan masyarakat mempunyai cara pandang yang berbeda atau bertolak belakang. Saat

seorang anak dididik di sekolah untuk menjadi individu A, lalu ketika pulang ke rumah dididik oleh keluarga atau masyarakat untuk menjadi individu B, maka yang terjadi adalah *conflicting idealism* (idealisme yang bertentangan), anak menjadi bingung dan keduanya tidak akan pernah berhasil. Keinginan orang tua membentuk anak tidak akan berhasil, begitu pula pendidikan di sekolah juga tidak akan berhasil.

Peserta berkelompok sesuai sekolah melanjutkan diskusi yang kedua untuk menemukan kebijakan dan program sebagai solusi masalah. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok, yang terpenting dalam sesi ini adalah cara menjabarkan ide-ide besar (kebijakan) menjadi program-program. Satu kebijakan dapat dijabarkan menjadi beberapa program. Hasil diskusi pada sesi 3 dapat dilihat sebagai berikut.

Kelompok 1:

1. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari gangguan ancaman, intimidasi, kekerasan, ketidakadilan pada anak dioperasionalkan dalam program:
 - a. Menyambut kedatangan anak di sekolah dengan berjabat tangan.
 - b. Berdoa sebelum mulai pelajaran.
 - c. Memberikan pendampingan anak pada saat istirahat.
 - d. Sosialisasi hak-hak anak di sekolah di setiap awal semester.
 - e. Diskusi dampak positif dan negatif industri pariwisata.
2. Kebijakan menciptakan pembelajaran berbasis kearifan lokal masyarakat di kawasan Pantai Gunungkidul dengan program:

- a. Melaksanakan muatan lokal karawitan, selain karawitan dapat juga dimasukkan jathilan, reog, dan lain-lain.
 - b. Melaksanakan pendidikan kewirausahaan, anak mulai dilatih agar mereka tertarik menjadi wirausaha muda, bisa tentang pengolahan hasil laut seperti pembuatan siomay, yang pasti berbasis pada hasil laut atau cenderamata khas setempat, seperti kerajinan tangan, pigura, aksesori, dan lain-lain.
 - c. Melaksanakan pendidikan berbasis global Bahasa Inggris. Hal ini sangat diperlukan karena mau tidak mau kita akan berhubungan dengan wisatawan dari mancanegara, apabila diperlukan satu hari bisa diwajibkan menggunakan Bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari.
3. Kebijakan memanfaatkan IPTEK sebagai daya dukung pembelajaran dengan program:
- a. Menggunakan *handphone* atau komputer sebagai media sumber belajar, jadi *handphone* tidak hanya untuk sekedar main *game* atau *chatting*. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai *gadget for education*.
 - b. Mengadakan ekstrakurikuler fotografi. Fotografi ini ke depan akan sangat menjanjikan, tidak perlu dengan kamera mahal, tetapi menggunakan *handphone* anak-anak sudah bisa mengambil gambar.
 - c. Pengolahan promosi wisata lewat internet, ini masih berkaitan dengan program yang di atas, terutama untuk mempromosikan produk-produk wisata, baik dari orang tua mereka atau warung-warung makan yang ada di kawasan pesisir pantai.

4. Kebijakan meningkatkan kompetensi guru dengan program:
Diklat IT, Bahasa Inggris, lalu kewirausahaan yang juga tentang pengolahan hasil laut bagi guru.
5. Kebijakan meningkatkan partisipasi wali murid dan masyarakat dengan program:
 - a. Sekolah mengadakan *workshop parenting*, wali murid diharapkan dapat datang ke sekolah, lalu sekolah mencari pembicara dari para pakar *parenting* tentang pola asuh anak yang benar dan juga kesadaran pentingnya budaya belajar di rumah.
 - b. Membentuk paguyuban wali murid di setiap kelas.
 - c. Membentuk relawan di kelas, terutama wali murid yang mampu dan relevan di bidangnya.
 - d. Membuat buku pantauan tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah untuk menjembatani komunikasi antara orang tua dan sekolah, agar orang tua tahu tingkah laku anak di sekolah, sekolah juga transparan tentang proses pendidikan di sekolah pada orang tua

Analisis: Bagaimana efektivitas program pendampingan dan pengawasan pada anak saat jam istirahat? Perlu dirumuskan teknis pelaksanaannya, Pendampingan dilakukan oleh guru piket. Setiap hari ada 2 atau 3 guru yang bertanggung jawab atas satu hari. Apakah akan ada program yang memberikan makanan tambahan? Jika ada, dilakukan berapa kali? Satu semester berapa kali? Mulai dari jabat tangan, absensi siswa, dan lain-lainnya. Kebijakan nomor 1 dan 5 ada relevansi antar-item, cocok (*matching*) sekali. Saat pendampingan kita kan inginnya

close guiden, jadi ada interaksi dengan *volunteer*-nya. Program sosialisasi hak-hak anak tidak *balance* karena tidak ada kewajiban. Hak mesti diiringi dengan kewajiban. Jadi, kewajibannya juga harus disosialisasikan. Hal ini bisa menjadi materi *parenting*.

Program *workshop parenting* perlu konten, bisa dari kebijakan nomor 1 tentang sekolah yang aman atau nomor 3 tentang memanfaatkan IPTEK. Bagaimana orang tua memanfaatkan media sosial seperti *WhatsApp* (WA) untuk membuat grup sebagai media yang menjembatani komunikasi antara guru dan orang tua juga menjalin komunikasi antarorang tua. Program *parenting* selama 6 bulan pertama apa aja yang akan dilakukan? Untuk program kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan untuk guru itu akan dilakukan kapan? Untuk disampaikan ke siswa kapan? lalu diimplementasikan kapan? Dari program yang sudah dibuat, disusun lebih operasional.

Kebijakan dan program yang disusun ini memang komprehensif, namun masih mungkin dapat dilengkapi, misalnya ketika ada ide penggunaan IT untuk komunikasi orang tua dengan sekolah, hal ini juga dapat digunakan dalam *parenting*. *Parenting* itu kontennya bisa penggunaan IT, hak dan kewajiban anak, dan lain-lain. Kegiatan *workshop parenting* misalnya selama 6 bulan apa saja yang akan dilakukan, dapat dilengkapi sehingga lebih jelas. Untuk kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan untuk guru itu akan dilakukan kapan? Untuk disampaikan ke siswa kapan? lalu diimplementasikan kapan. Dari program yang sudah dibuat, disusun kegiatan-kegiatan yang lebih detail dalam waktu 3, 6 bulan atau 1 tahun dapat disusun dan dipikirkan apa saja program-program dan kegiatannya.

Kelompok 2:

1. Kebijakan menciptakan sekolah yang aman dan nyaman dengan program:
 - a. Menerapkan program 3S (senyum, sapa, salam).
 - b. Pendampingan siswa dalam menggunakan alat dan bahan yang berbahaya, baik di luar ataupun di dalam sekolah. Hal ini sangat penting karena kebiasaan masyarakat nelayan di sini masih menggunakan bahan berbahaya, misalnya bahan peledak.
 - c. Pelatihan siswa dalam menghadapi bencana tsunami.
2. Kebijakan menjalin kerja sama dengan masyarakat untuk pengembangan potensi siswa.
 - a. Memberikan pelatihan dalam pengolahan hasil laut, berinovasi agar berbeda dari yang sudah ada untuk hasil laut, sehingga memiliki nilai jual tinggi.
 - b. Memberikan pelatihan dan pengolahan limbah laut, mengolah hasil laut pasti menghasilkan limbah yang nantinya terus akan bertambah. Dengan pelatihan ini diharapkan anak-anak tahu cara memanfaatkan limbah.
 - c. Memberikan pelatihan manajemen, mempromosikan, dan memasarkan potensi laut dengan tidak mengorbankan lingkungan itu sendiri.

Analisis: Kebijakan dan program yang disusun oleh kelompok 1 dan 2 bersifat saling melengkapi, kelompok 2 memperhatikan limbah hasil industri wisata. Kalau limbah tidak dikelola dengan baik akan menghancurkan potensi wisata itu sendiri.

3. Perumusan Kebijakan dan Program Sekolah Ramah Anak

Dari diskusi pada tahap memilih solusi, masalah berupa kebijakan dan program dirumuskan kebijakan dan program sekolah ramah anak di 3 Sekolah Dasar di kawasan pesisir. Rumusan kebijakan dan program dapat dilihat di Tabel 6.3.

Tabel 6.3 Rumusan Kebijakan dan Program Sekolah Ramah Anak

No	Kebijakan	Program dan Kegiatan
1.	Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari gangguan, ancaman, intimidasi, kekerasan, ketidakadilan pada anak	<ol style="list-style-type: none">Menyambut kedatangan anak dengan berjabat tangan.Berdoa pada saat sebelum dan sesudah belajar.Efektivitas pendampingan anak pada waktu istirahat.Penyuluhan hak-hak dan kewajiban anak di sekolah.Sosialisasi hak-hak dan kewajiban anak di sekolah setiap awal semester.Diskusi menemukan dampak positif dan negatif industri pariwisata.
2.	Menciptakan pembelajaran berbasis kearifan lokal masyarakat di kawasan pantai Gunungkidul.	<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan muatan lokal karawitan.Melaksanakan pendidikan kewirausahaan (pengolahan hasil laut, pembuatan cenderamata khas setempat).Melaksanakan pendidikan berbasis global Bahasa Inggris.

3.	Memanfaatkan IPTEK sebagai daya dukung pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan <i>handphone</i>/komputer sebagai media sumber belajar. b. Mengadakan ekstrakurikuler fotografi. b. Pengolahan promosi wisata lewat internet.
4.	Meningkatkan kompetensi guru tentang pembelajaran di kawasan pantai Gunungkidul.	Diklat IT, Bahasa Inggris, fotografi, dan kewirausahaan untuk guru.
5.	Meningkatkan partisipasi aktif wali/masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Workshop parenting</i>. b. Membentuk paguyuban wali murid di setiap kelas. c. Membentuk relawan efektivitas pendampingan siswa ketika istirahat. d. Membuat buku penghubung pantauan tumbuh kembang anak di rumah.
6.	Menciptakan kondisi sekolah yang nyaman dan aman.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan budaya 3S (salam, senyum, sapa) b. Pendampingan siswa dalam penggunaan alat/bahan menghadapi bencana tsunami
7.	Menjalin kerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan potensi siswa.	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelatihan dalam pengolahan hasil laut. b. Memberikan pelatihan pengolahan limbah olahan hasil laut. c. Memberikan pelatihan manajemen pemasaran hasil olahan laut dengan menggunakan IT bagi guru dan siswa.



7

ORGANISASI IMPLEMENTASI SEKOLAH RAMAH ANAK MELALUI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Sekolah sebagai satuan pendidikan memiliki tugas untuk mengimplementasikan kebijakan Sekolah Ramah Anak. Dalam implementasi sebuah kebijakan diperlukan langkah interpretasi, pengorganisasian, dan mengevaluasi sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Pengimplementasian kebijakan dan program perlu diorganisasikan oleh sekolah. Tujuan pengorganisasian ini untuk memudahkan kebijakan dan program SRA terlaksana secara efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi merupakan salah satu indikator mutu pendidikan yang sering menjadi permasalahan yang berdampak pada rendahnya mutu pendidikan.

Implementasi kebijakan dan program di tingkat sekolah sangat erat terkait dengan otonomi daerah dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau MBM (Manajemen Berbasis Masyarakat). Jika membahas tentang Sekolah Ramah Anak dalam hal ini SRA di kawasan pesisir, maka sesungguhnya membahas kebijakan berbasis sekolah atau kebijakan

berbasis masyarakat karena sekolah sekolah menjadi bagian dari masyarakat. Interaksi antara sekolah dengan masyarakat merupakan interaksi yang saling memengaruhi. MBS merupakan bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan yang dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu oleh Komite Sekolah mengelola kegiatan pendidikan (Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Ada sejumlah argumen untuk mempertahankan MBS (UNESCO, 2014: 3), yaitu:

1. Lebih demokratis: Memungkinkan guru dan orang tua mengambil keputusan tentang isu yang sangat penting karena pendidikan tentu lebih demokratis daripada menyerahkan keputusan ini di tangan sekelompok pejabat tingkat pusat terpilih.
2. Lebih relevan: Kekuatan pengambilan keputusan lebih dekat ke tempat masalah yang dialami akan menghasilkan kebijakan yang lebih relevan karena staf lokal (sekolah) pada umumnya mengetahui situasi mereka dengan lebih baik.
3. Kurang birokratis: Keputusan akan diambil lebih cepat karena mereka tidak perlu melalui proses birokrasi yang panjang (dari sekolah melalui beberapa kantor perantara sampai ke tingkat pusat), namun dapat dilakukan pada tingkat yang dekat dengan sekolah.
4. Akuntabilitas yang lebih kuat: Mengikuti keputusan yang dibuat oleh sekolah dan guru menyiratkan bahwa mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas hasilnya oleh orang tua dan komunitas sekitar secara langsung. Akuntabilitas seperti itu diharapkan bisa bertindak sebagai alat untuk efektivitas yang lebih besar.
5. Mobilitas sumber daya yang lebih besar: Guru dan terutama orang tua akan lebih bersemangat untuk berkontribusi pada

pendanaan sekolah mereka karena mereka memiliki peran dalam organisasi dan manajemennya.

Ada juga beberapa bukti penelitian umum yang diberikan oleh UNICEF (2004: 4) yang mendukung MBS, yaitu kualitas pendidikan terutama bergantung pada cara sekolah dikelola, lebih daripada ketersediaan sumber daya. Hal ini juga telah ditunjukkan bahwa kapasitas sekolah untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran sangat dimediasi oleh kualitas kepemimpinan yang diberikan oleh kepala sekolah. Kedua faktor tersebut dapat digunakan untuk menguatkan bahwa kontrol manajemen lebih berpengaruh dalam meningkatkan mutu sekolah. Oleh karena itu, agar mutu pendidikan mengalami peningkatan secara merata perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan pengembangan dengan reorientasi penyelenggaraan pendidikan melalui manajemen sekolah (*School Based Management*).

LATAR BELAKANG MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Sejak reformasi di Indonesia telah diwacanakan perlunya otonomi untuk mengurus berbagai aspek dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara oleh daerah masing-masing. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU No. 22 Tahun 1999 dan direvisi dalam UU No 32 Tahun 2004), Pemda telah mempunyai acuan yang jelas untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara otonom. Salah satu bidang yang mendapatkan otonomi daerah adalah pendidikan mulai dari pendidikan prasekolah sampai dengan pendidikan menengah. Seiring dengan adanya otonomi daerah dalam penyelenggaraan bidang pendidikan, muncul pula konsep Manajemen Berbasis Sekolah, sebuah konsep yang diadopsi dari Amerika Serikat melalui Bank Dunia.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dirintis oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), beserta pemerintah daerah dengan bantuan dari The United Nations Children's Fund (UNICEF) dan United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sejak tahun 1999 di 7 (tujuh) kabupaten pada 4 (empat) provinsi. Setelah dinyatakan berhasil pada beberapa sekolah piloting, program MBS memperoleh bantuan pendanaan dari donor, baik dari dalam maupun luar negeri, antara lain NZAID, AusAID, USAID, Plan International, Citibank, Ave the Children, JICA, dan Kartika Soekarno Foundation (Kemdikbud, 2013: 1).

Program MBS pada awalnya dilatarbelakangi oleh suatu kenyataan yang kurang menggembirakan. Walaupun pemerintah dan agen-agen internasional telah memiliki komitmen yang jelas untuk meningkatkan sektor pendidikan, akses yang lebih adil dan efisien untuk pendidikan masih menjadi ilusi bagi banyak orang di seluruh dunia. Anak perempuan pada masyarakat asli, kelompok-kelompok miskin dan termarginalkan sering kali hanya mempunyai akses terbatas untuk pendidikan.

Akses untuk pendidikan sering diberikan atas inisiatif lembaga-lembaga internasional seperti Education for All yang sumber dayanya disalurkan kepada negara-negara miskin dan berkembang untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs) dalam bidang pendidikan. Akan tetapi walaupun anak-anak telah mempunyai akses untuk fasilitas pendidikan, kualitas pendidikan yang diperoleh sering sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai tes hasil belajar yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), dan Programme for International Student Assessment (PISA) yang umumnya anak-anak

dari negara miskin dan berkembang gagal mencapai nilai minimal yang ditargetkan. Hal tersebut membuktikan bahwa hanya dengan meningkatkan alokasi sumber daya tidak akan meningkatkan hasil atau mutu pendidikan, kecuali adanya reformasi kelembagaan (Hanushek and Woessmann, 2007 via worldbank.org).

Untuk kasus Indonesia, selama ini diyakini bahwa kegagalan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan terkait dengan tiga hal, yaitu: 1) Guru kurang berkualitas yang berdampak pada kegagalan; 2) Peserta didik, khususnya anak-anak yang berasal dari keluarga minoritas tidak mampu sehingga berdampak pada semangat belajar yang kurang; 3) Tidak cukup dana untuk membiayai proses keberlangsungan pendidikan (Kemdikbud, 2013: 6). MBS adalah salah satu kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan sumber daya dan sumber dana dari berbagai elemen masyarakat untuk mengatasi keterbatasan yang disebabkan oleh tiga hal tersebut.

KONSEP DASAR MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Caldwell (world bank.org) mengatakan Manajemen Berbasis Sekolah adalah desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada tingkat satuan pendidikan (sekolah). Dalam MBS, kewenangan mengambil keputusan dan tanggung jawabnya dialihkan kepada kepala sekolah, guru, orang tua, dan kadang-kadang juga kepada siswa dan anggota masyarakat sekolah yang lain. Hanya saja, para pengambil keputusan ini harus menyesuaikan keputusannya dengan seperangkat peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

MBS merupakan program yang bermacam-macam bentuknya, baik dalam arti kekuasaan untuk membuat keputusan maupun dalam arti derajat pengambilan keputusan diturunkan pada level

sekolah. Beberapa program mengalihkan kewenangan hanya kepada kepala sekolah atau guru, sedangkan beberapa program lainnya dilaksanakan oleh orang tua yang mendapatkan mandat dan partisipasi masyarakat yang menjadi anggota komite sekolah. Kewenangan yang diberikan meliputi alokasi anggaran, gaji guru dan pegawai sekolah, pengembangan kurikulum, penyediaan buku ajar dan materi pembelajaran lainnya, peningkatan infrastruktur, pemantauan dan penilaian kinerja guru, serta hasil belajar siswa.

Nanang Fattah (2012: 124), menjelaskan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan dan meningkatkan partisipasi sekolah dalam upaya perbaikan kinerjanya yang mencakup guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat. Pada pelaksanaannya disadari bahwa pendekatan MBS memerlukan proses dan waktu. Sejalan dengan pendapat tersebut, Asep Suryana (2014: 2) mengatakan MBS adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk meredesain pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan sekolah yang meliputi guru, siswa, kepala sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. MBS dikatakan juga sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepala sekolah serta mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, kabupaten, dan kota. Jadi, sekolah diberi otonomi untuk bersama-sama masyarakat memanfaatkan dan mengelola sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu proses dan *output* pembelajaran.

Walaupun program MBS secara riil diadopsi dari negara-negara maju terutama Amerika Serikat dengan konsep *School Based Management*, tetapi konsep dasar MBS telah ada dalam pemikiran para

tokoh pendidikan Indonesia. Yang terkenal adalah konsep tri pusat pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Nasional: Ki Hadjar Dewantara. Konsep tri pusat pendidikan merupakan tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting bagi peserta didik, yaitu alam atau lingkungan keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Alam keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama dan terpenting. Hidup keluarga selalu memengaruhi bertumbuhnya budi pekerti dari tiap-tiap manusia. Alam perguruan (sekolah) adalah pusat pendidikan yang istimewa berkewajiban mengusahakan kecerdasan pikiran (perkembangan intelektual) beserta pemberian ilmu pengetahuan. Alam pemuda, yaitu pergerakan pemuda-pemuda harus diakui dan dipergunakan untuk menyokong pendidikan keluarga untuk mendidik budi pekerti dan laku sosial. Perguruan sebagai balai wiyata, pergerakan pemuda sebagai daerah merdekanya kaum pemuda untuk melakukan penguasaan diri dan penting untuk pembentukan watak.

Keluarga dan sekolah sebagai bagian dari tri pusat pendidikan hendaknya dapat bersinergi untuk terwujudnya pendidikan yang berkualitas bagi para siswa. Peran keluarga perlu didukung oleh peran tokoh masyarakat dan pemerintah setempat agar praktik pendidikan semakin berkualitas. Lingkungan mikro, meso, dan makro berkaitan erat satu sama lain dan keterkaitan itu akan lebih bermakna dan bermanfaat jika diarahkan pada peningkatan pendidikan anak-anak muda generasi harapan bangsa.

Dalam tata kelola MBS yang melibatkan tri pusat pendidikan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berdasarkan kebutuhan sekolah, bukan hanya apa yang diinginkan kepala sekolah atau guru, serta menampung aspirasi murid, orang tua murid, dan masyarakat.

2. Perencanaan sekolah menggunakan data yang valid dan mutakhir. Oleh karena itu, manajemen data di Dinas Pendidikan dan sekolah menjadi persyaratan utama.
3. Memuat capaian Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), sehingga pembiayaan sekolah lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan pencapaian mutu pendidikan yang lebih tinggi.
4. Didasarkan pada regulasi daerah (Peraturan bupati/walikota). Hal ini diperlukan untuk menjamin program MBS dapat berlangsung terus secara berkesinambungan.
5. *Monitoring* dan pelaksanaan MBS di sekolah diperlukan agar pelaksanaan program MBS dapat tepat sasaran dan dapat terus disempurnakan.
6. Penanganan setiap pengaduan masyarakat mengenai pelayanan sekolah.
7. Keberlanjutan program setiap tahunnya untuk memenuhi kesenjangan pembiayaan sekolah yang berpotensi meningkat sesuai kebutuhan pencapaian standar.

ORGANISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Sekolah Ramah Anak merupakan kebijakan pemerintah pusat, yang seyogianya diimplementasikan di berbagai tingkat satuan pendidikan. Dalam kenyataannya, kebijakan Sekolah Ramah Anak belum dipahami secara komprehensif oleh kepala sekolah dan guru di tingkat satuan pendidikan, apalagi oleh komite sekolah. Sampai dengan penelitian ini dilakukan belum ada petunjuk teknis yang jelas, sehingga kepala sekolah dan guru di kawasan pesisir merasa kesulitan untuk mengimplementasikannya. Idealnya, dengan konsep MBS sebenarnya



pihak sekolah dan komite dapat dengan mudah untuk menjabarkan kebijakan Sekolah Ramah Anak di tingkat satuan pendidikan tanpa harus menunggu petunjuk teknis ataupun petunjuk pelaksanaan dari pusat.

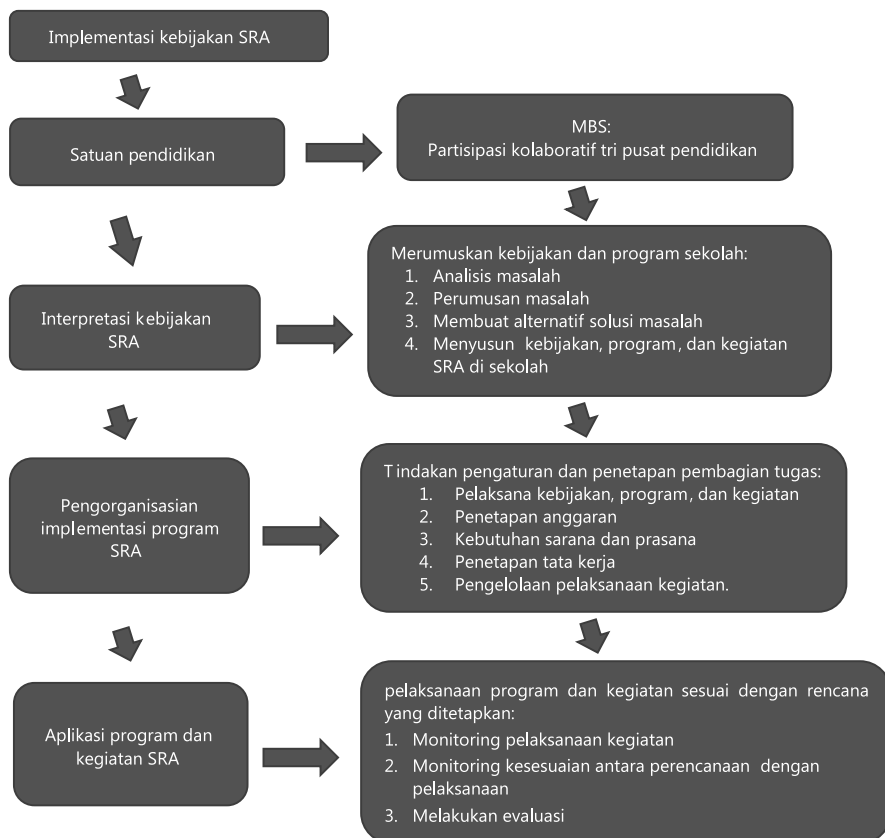
Penelitian yang dilakukan di Tanjungsari Gunungkidul terkait implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak menunjukkan bahwa sekolah-sekolah perlu dibantu untuk menjabarkan kebijakan Sekolah Ramah Anak menjadi berbagai program yang sesuai dengan konteks lingkungan sosio-budaya dan permasalahan yang dihadapi. Pengalaman selama pendampingan menunjukkan bahwa sekolah telah memiliki perangkat-perangkat MBS dan berbagai sumber daya yang berasal dari partisipasi masyarakat. Hanya saja peran orang tua dan partisipasi komite sekolah serta masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Keberhasilan beberapa sekolah di Tanjungsari dalam membangun sinergi dengan orang tua terkait program-program untuk Sekolah Ramah Anak menjadi contoh dari *best practice* yang dapat ditiru sekolah-sekolah lainnya. Di SD Kemadang misalnya, program pelatihan wirausaha untuk membuat cenderamata wisata pantai telah melibatkan orang tua siswa yang berprofesi sebagai pengrajin cenderamata. Demikian pula di SD Rejosari, program sosialisasi hak-hak anak telah berhasil dilaksanakan dengan melibatkan komite sekolah dan aparat kepolisian untuk memahamkan orang tua akan berbagai macam bentuk kejahatan yang terjadi di sekeliling tempat tinggal mereka dan pentingnya orang tua memenuhi hak-hak anak secara proporsional.

Berkaca dari pengalaman penelitian, perlu dioptimalkan peran orang tua dan komite sekolah untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak yang diidealkan. Komitmen orang tua dan masyarakat yang masih rendah perlu diupayakan terus-menerus dengan melibatkan secara rutin dan kontinu dalam berbagai program untuk menciptakan sekolah ramah anak. Pelibatan yang rutin dan kontinu akan menghasilkan

komitmen orang tua dan komite sekolah dalam program-program sekolah. Dengan demikian, orang tua peserta didik akan diuntungkan sebab anak-anaknya mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah yang membahagiakan dan menyenangkan untuk bekal masa depannya kelak. Demikian pula komite sekolah perlu digalakkan terus agar benar-benar berperan dalam pengambilan keputusan yang dibuat sekolah, tidak sekadar menjadi badan stempel keputusan sekolah yang bersifat formalitas belaka.

Contoh pengorganisasian Sekolah Ramah Anak dengan manajemen berbasis sekolah seperti berikut.



Gambar 7.1 Manajemen SRA di satuan pendidikan

Gambar di atas menunjukkan bahwa kebijakan SRA yang bersifat nasional perlu diinterpretasikan oleh satuan pendidikan dalam bentuk perumusan kebijakan dan program SRA, dalam penginterpretasian perlu melibatkan tri pusat pendidikan secara partisipatif dan kolaboratif dengan menggunakan MBS. Prinsip-prinsip MBS dipakai dalam pengorganisasian implementasi kebijakan dan program SRA.

Menurut Suparlan (2015: 63-92), perumusan kebijakan dan program Sekolah Ramah Anak sebagai sebuah interpretasi kebijakan oleh satuan pendidikan dapat dilaksanakan secara terintegrasi dalam penerapan MBS yang meliputi:

1. Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).
2. Penyusunan rencana kerja tahunan.
3. Manajemen kesiswaaan.
4. Manajemen kurikulum.
5. Manajemen pembelajaran dan penilaian hasil belajar.
6. Manajemen pendidik dan tenaga pendidikan.
7. Manajemen sarana dan prasarana.
8. Manajemen keuangan dan pembiayaan.
9. Manajemen budaya dan lingkungan sekolah.
10. Manajemen peran serta masyarakat.
11. Evaluasi diri sekolah.



8

MONITORING DAN EVALUASI SEKOLAH RAMAH ANAK

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum tercapai dari sebuah kebijakan dan program. Informasi hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan suatu program tersebut. Dengan kata lain, melalui evaluasi akan diketahui efektivitas, efisiensi, kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya sekaligus untuk meningkatkannya. Arti penting dari pelaksanaan kegiatan evaluasi untuk melihat kembali apakah suatu kebijakan dan program pendidikan itu telah dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Dari hasil kegiatan evaluasi akan dapat diketahui hal-hal yang telah dicapai dan apakah suatu program dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan? Berdasarkan hasil evaluasi kemudian diambil keputusan apakah kebijakan dan program tersebut akan: (1) diteruskan, (2) direvisi, (3) dihentikan, atau (4) dirumuskan kembali sehingga dapat ditemukan tujuan, sasaran dan alternatif baru yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya.

Dengan demikian, untuk melakukan pembaharuan kebijakan dan program pendidikan, kegiatan evaluasi terhadap program kebijakan dan program yang sedang maupun telah berjalan sebelumnya perlu dilakukan dengan baik. Untuk dapat menyusun program yang lebih baik, maka hasil evaluasi program sebelumnya merupakan acuan yang tidak dapat ditinggalkan.

Worthen dan Sanders (1973: 19) menyatakan bahwa: *Evaluation is the determination of the worth of thing. It includes obtaining information for use in judging the worth of a program, product, procedure, or objective, or the potential utility of alternative approaches designed to attain specified objectives.* Berdasarkan pendapat di atas, evaluasi diartikan sebagai penentuan nilai (*worth*) terhadap suatu hal, meliputi pengumpulan informasi yang digunakan untuk menentukan nilai keberhasilan suatu program, produk, prosedur, tujuan atau manfaat potensi pada desain alternatif pendekatan untuk mempertahankan pendekatan yang khusus. Pendapat tersebut mengimplikasikan adanya kriteria tertentu yang digunakan untuk menentukan nilai atau harga (*worth*) sesuatu. Memberikan nilai (*value*) dan harga (*worth*) merupakan profesi evaluator.

EVALUASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK

Dalam panduan kebijakan pengembangan Sekolah Ramah Anak, dinyatakan untuk dilakukan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan. *Monitoring* terhadap Sekolah Ramah Anak dilakukan satu bulan sekali, sedangkan evaluasi pengembangan Sekolah Ramah Anak dilakukan tiga bulan sekali. Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan untuk kebijakan Sekolah Ramah Anak selanjutnya. Untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi menggunakan instrumen yang tepat sesuai dengan indikator-indikator yang

telah dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan sesuai dengan variabel dan indikator keberhasilan program SRA yang ditetapkan oleh sekolah. Evaluasi menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu kebijakan maupun program yang telah dilaksanakan.

Monitoring atau pemantauan adalah aktivitas pengumpulan dan analisis informasi tentang program yang dilakukan saat program sedang berlangsung. Sedangkan evaluasi adalah penilaian retrospektif berkala atas suatu organisasi, proyek atau program yang mungkin dilakukan secara internal atau oleh evaluator eksternal (independen). Melakukan *monitoring* dan evaluasi dapat membantu kita dalam menilai perbedaan apa yang telah kita lakukan dan dapat memberikan informasi vital. *Monitoring* dapat membantu kita dalam:

- ❁ Menilai dan menunjukkan keefektifan dalam mencapai tujuan atau dampak terhadap kehidupan masyarakat.
- ❁ Memperbaiki pembelajaran internal dan pengambilan keputusan tentang perancangan proyek, bagaimana kelompok beroperasi, dan implementasi tentang faktor keberhasilan, penghalang, yang mendekati pekerjaan/tidak bekerja.
- ❁ Memberdayakan dan memotivasi relawan dan pendukung.
- ❁ Memastikan akuntabilitas *stakeholder* utama (misalnya komunitas, anggota/pendukung, gerakan yang lebih luas, penyandang dana, pendukung).
- ❁ Memengaruhi kebijakan pemerintah.
- ❁ Berbagi pembelajaran dengan komunitas lain dan gerakan yang lebih luas.
- ❁ Berkontribusi pada basis bukti tentang efektivitas dan batasan tindakan masyarakat.

1. Monitoring (Pemantauan)

Monitoring merupakan aktivitas menganalisis data pelaksanaan suatu program yang tengah berlangsung (*on going process*). Analisis dimaksudkan untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan program sesuai dengan standar atau kriteria pelaksanaan. Apabila proses pelaksanaan ditemukan tidak sesuai dengan standar, maka dapat dilakukan perbaikan dalam proses. Perbaikan tidak selalu dilakukan dengan menunggu selesainya sebuah program. Dengan perbaikan dalam proses, maka hasil akhir akan menjadi lebih baik. *Monitoring* dan evaluasi ini merupakan dua aktivitas dalam satu rangkaian yang akan saling melengkapi.

2. Evaluasi

Istilah evaluasi berasal dari Bahasa Inggris *evaluation* yang artinya penilaian. Evaluasi memiliki banyak arti yang berbeda karena setiap ahli mendefinisikan perspektifnya masing-masing. Masyarakat awam biasanya memberikan makna yang sama antara evaluasi dengan pengukuran (*measurement*) dan penilaian (*assessment*). Padahal ketiga istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Stufflebeam dan Shinkfield (1985) dalam Widoyoko (2009) menyatakan bahwa:

Evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing descriptive and judgmental information about the worth and merit of some object's goals, design, implementation, and impact in order to guide decision making, serve needs for accountability, and promote understanding of the involved phenomena.

Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (*the worth and merit*) dari suatu tujuan yang akan dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk memandu

membuat keputusan, membantu mempertanggungjawabkan dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Menurut rumusan tersebut, inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Rossi dan Howard (1985: 19), memberikan definisi tentang evaluasi atau *evaluation research* sebagai berikut:

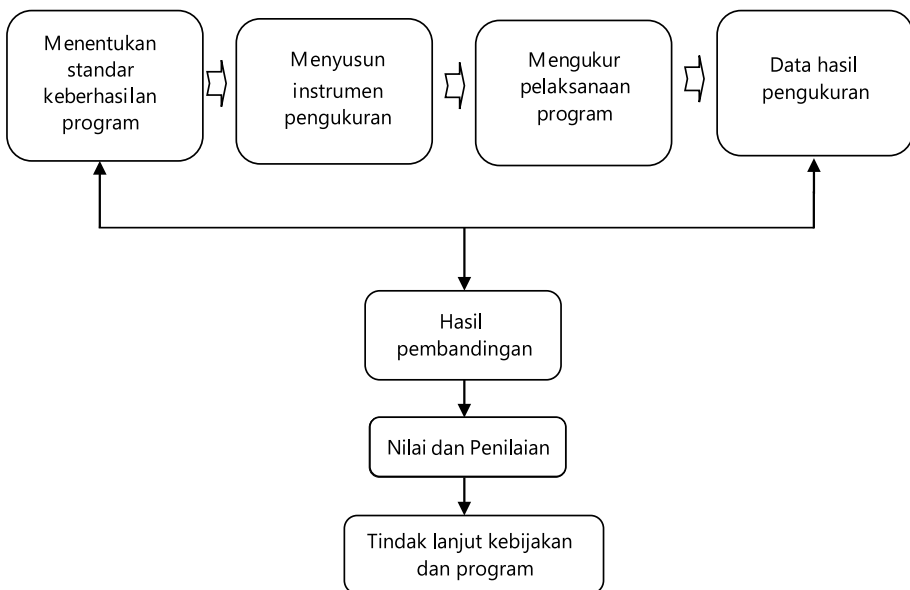
Evaluation research is the systematic application of social research procedures in assessing the conceptualization and design, implementation, and utility of social intervention programs.

Berdasarkan pengertian tersebut, evaluasi merupakan aplikasi yang sistematis dari prosedur penelitian sosial dalam menilai konsep dan desain, implementasi dan kegunaan dari intervensi program sosial. Dengan kata lain, penelitian evaluasi menyangkut penggunaan metodologi penelitian sosial untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, *monitoring*, keefektifan, dan efisiensi dari pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan program lainnya.

Menurut Daniel L. Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield (1995) secara singkat merumuskan evaluasi sebagai berikut: "*Evaluation is the systematic assessment of the worth or merit of some object.*" Dengan demikian, evaluasi merupakan kegiatan membandingkan tujuan dengan hasil dan merupakan studi yang mengombinasikan penampilan dengan suatu nilai tertentu. Melakukan perbandingan antara tujuan (standar keberhasilan) dengan hasil dari suatu program merupakan satu langkah yang harus dilakukan dalam proses evaluasi. Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan dan program semestinya disusun pula standar keberhasilan dari setiap program sebagai acuan dalam melakukan evaluasi. Tanpa aktivitas membandingkan, yang

terjadi hanyalah mendeskripsikan hasil yang telah dicapai suatu aktivitas pelaksanaan program, belum melakukan evaluasi.

Pembandingan antara hasil program dengan standar keberhasilan diberikan *judgement* (penilaian) untuk mengetahui ketercapaian program berdasarkan standar keberhasilan. Aktivitas melakukan *judgement* dengan memberikan nilai dan penilaian merupakan *core* (inti) dari evaluasi. Hasil penilaian ini akan menjadi informasi bagi pengambil keputusan untuk menindaklanjuti kebijakan atau program. Evaluasi tersebut dapat digambarkan dalam tahapan sebagai berikut:



Gambar 8.1 Tahap-tahap evaluasi

Berdasarkan gambar di atas, tahap-tahap evaluasi diawali dengan menentukan standar keberhasilan kebijakan dan program, diikuti dengan menyusun instrumen untuk mengukur keterlaksanaan program. Instrumen ini akan digunakan untuk mengukur pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Dari pengukuran keterlaksanaan program akan diperoleh data hasil

pengukuran. Aktivitas selanjutnya adalah membandingkan data pengukuran dengan standar keberhasilan program. Data keterlaksanaan program sebagai hasil pengukuran dibandingkan dengan standar keberhasilan atau ketercapaian program yang telah disusun atau telah disepakati dalam penyusunan program. Berdasarkan perbandingan antara keterlaksanaan program dengan standar keberhasilan diberikan *judgement* (berupa nilai dan penilaian diri) keberhasilan program atau kebijakan. Apakah program sesuai dengan standar atau melebihi standar keberhasilan atau kurang dari standar, sehingga program dikatakan berhasil atau tidak berhasil? Berdasarkan penilaian yang diberikan dapat dilakukan tindak lanjut dari kebijakan atau program. Apakah kebijakan akan dilanjutkan, dihentikan, ataukah diperbaiki?

Ada banyak model yang bisa digunakan dalam melakukan evaluasi program khususnya program pendidikan. Salah satu model evaluasi program tersebut adalah CIPP (*Context, Input, Process, and Product*). Model CIPP adalah model evaluasi yang paling banyak digunakan oleh evaluator. Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan-kawan pada tahun 1967 di Ohio State University (Suharsimi, 2007: 29). Konsep CIPP ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki (widoyoko, 2009: 181). Dalam bidang pendidikan, Stufflebeam menggolongkan sistem pendidikan atas 4 dimensi, yaitu *context*, *input*, *process*, dan *product* (konteks, masukan, proses, dan produk). Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Model ini sekarang disempurnakan dengan satu komponen, yaitu *outcome* sehingga menjadi CIPPO. Model CIPP hanya berhenti pada mengukur *output* (*product*), sedangkan CIPPO sampai pada implementasi dari *product*.

a. Evaluasi Konteks (*Context*)

Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, serta tujuan program. Evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Evaluasi konteks menurut Arikunto (2009: 46), dilakukan untuk menjawab pertanyaan: (a) Kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh program? (b) Tujuan pengembangan manakah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan? dan (c) Tujuan manakah yang paling mudah dicapai?

Evaluasi konteks menilai kebutuhan dan masalah-masalah dalam lingkungan yang didefinisikan. Dalam hal ini menilai kebutuhan dan masalah-masalah yang ada dalam lingkungan sekolah serta kebutuhannya akan sekolah yang ramah anak. Apakah sekolah-sekolah di kawasan pesisir membutuhkan program Sekolah Ramah Anak? Apakah masalah-masalah pendidikan yang ada di sekolah di kawasan wisata pantai? Apa visi sekolah yang harus dibangun untuk menciptakan Sekolah Ramah Anak? Apakah misi yang akan dilakukan agar sekolah menjadi sekolah yang ramah anak? Sarana dan prasarana apa sajakah yang semestinya ada di sekolah agar anak merasa aman dan nyaman berada di sekolah?

b. Evaluasi Masukan (*Input*)

Evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

Komponen masukan meliputi: (a) Sumber daya manusia, (b) Sarana dan peralatan pendukung, (c) Dana/anggaran, dan (d) Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. Selain itu juga mengevaluasi strategi dan rencana kerja serta pendekatan pembiayaannya.

Evaluasi *input* menilai bagaimana strategi perumusan kebijakan dan program Sekolah Ramah Anak? Bagaimana pengorganisasian (organisasi implementasi kebijakan dan program) yang di dalamnya melibatkan sumber daya, sarana dan juga komunikasi antarimplementator? Bagaimana strategi implementasi kebijakan dan program Sekolah Ramah Anak?

c. Evaluasi Proses (*Process*)

Menurut Widoyoko (2009: 182), evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi ancaman prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki?

Dalam evaluasi proses evaluator melakukan *monitoring*, menilai dokumen-dokumen dan juga menilai aktivitas pelaksanaan dalam bentuk kegiatan Sekolah Ramah Anak. Menilai apakah pelaksanaan pembelajaran, *parenting*, *enterprenership*, pendidikan nilai, pelaksanaan hak anak, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, serta mewujudkan kesetaraan dan berkeadilan di sekolah

telah memenuhi standar proses yang telah ditetapkan pada saat merumuskan program?

d. Evaluasi Produk (*Product*)

Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Data yang dihasilkan akan sangat menentukan program akan diteruskan, dimodifikasi atau dihentikan. Menurut Farida (2000: 14), evaluasi produk untuk menjawab apa yang telah dicapai oleh program? dan apa yang dilakukan setelah program berjalan? Pada evaluasi produk ini menilai apakah pelaksanaan program sekolah anak mencapai standar keberhasilan yang telah ditetapkan? Tahap ini menilai apakah terjadi perubahan perilaku orang tua terhadap anak? Apa perubahan yang terjadi? Bagaimana peningkatan keterlibatan masyarakat, orang tua, dan komite dalam pendidikan di sekolah? Apakah terdapat perubahan perilaku guru pada anak yang lebih baik? Apakah tercipta perubahan habitus di lingkungan sekolah yang lebih ramah anak?

Model CIPP ini dapat digunakan sebagai model dalam mengembangkan instrumen evaluasi partisipasi anak di Sekolah Ramah Anak dengan model ini akan memberikan informasi secara komprehensif tentang partisipasi anak, yang meliputi konteks, input, proses, dan produk. Dibandingkan dengan model-model evaluasi lain, model CIPP memiliki beberapa kelebihan, antara lain lebih komprehensif karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata, tetapi menyangkut konteks, masukan, proses, maupun hasil selain memiliki kelebihan model CIPP juga memiliki keterbatasan, antara lain penerapan model ini dalam bidang program pembelajaran di kelas

mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi jika tanpa adanya modifikasi. Hal ini dapat terjadi karena untuk mengukur konteks, masukan maupun hasil dalam arti yang luas akan melibatkan banyak pihak yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih (Widoyoko, 2009: 184).

METODE EVALUASI

Tujuan utama dari evaluasi adalah memberikan informasi berbasis bukti tentang efektivitas kebijakan dan program Sekolah Ramah Anak yang dilaksanakan oleh Sekolah Dasar. Strategi sekolah dalam mengimplementasikan Sekolah Ramah Anak dimulai dari pengembangan kebijakan dan program, menyusun pengorganisasian program, melaksanakan program dan kegiatan di sekolah. Fokus evaluasi untuk mengidentifikasi elemen kunci yang sangat penting bagi keberhasilan program Sekolah Ramah Anak yang dapat dijadikan model bagi sekolah-sekolah lain yang ingin mengarusutamakan Sekolah Ramah Anak di dalam pendidikan.

Evaluasi Sekolah Ramah Anak dapat menggunakan pendekatan kuantitatif maupun pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan pada saat kita mengevaluasi program yang memiliki standar keberhasilan yang bersifat kualitatif. Standar keberhasilan sebuah program tidak selalu bersifat kuantitatif. Menggunakan keduanya dengan mencampur antara kualitatif dengan kuantitatif dapat saling melengkapi.

Standar keberhasilan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman sangat tergantung kepada apa yang dirasakan oleh warga sekolah, baik anak-anak, guru maupun warga lainnya. Kenyamanan yang dirasakan oleh anak ketika berada di sekolah merupakan standar keberhasilan yang bersifat kualitatif dan tidak cukup disusun dalam indikator-indikator yang bersifat kuantitatif, walaupun secara

metodologis dapat dilakukan. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi langsung maupun melalui foto dan video, *interview*, serta *focus group discussion*. Pengalaman individu-individu dalam suatu program akan sangat bermakna bagi indikator keberhasilan program.

Tim evaluator selain mengumpulkan data yang bersifat kualitatif juga mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif melalui *check list*, angket, ataupun kuesioner. Data kuantitatif akan lebih terukur dalam kuantitasnya. Oleh karena itu, dalam melakukan evaluasi program sekolah ramah ini membutuhkan perangkat ganda yang mesti dikembangkan. yaitu perangkat survei kepada anak-anak kelas 1-6, guru, kepala sekolah, perangkat observasi kelas, perangkat observasi yang lebih luas, baik di kelas, luar kelas, maupun luar sekolah, Termasuk perangkat *interview* dan *focus grup discussion* pada anak-anak, guru, kepala sekolah, orang tua wali murid, maupun anggota masyarakat lainnya di sekitar sekolah juga *stakeholder* sekolah lainnya.

Secara metodologis, evaluasi kualitatif termasuk evaluasi desk terhadap dokumen Sekolah Ramah Anak, terdiri dari visi, misi, tujuan, kebijakan, dan program Sekolah Ramah Anak di sekolah. Selanjutnya kunjungan sekolah untuk melakukan survei, *interview*, dan *focus grup discussion* untuk analisis pelaksanaan Sekolah Ramah Anak. Data dikumpulkan dari anak-anak, guru, kepala sekolah, orang tua wali, anggota masyarakat, dan *stakeholder* lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- AEST. 2012. *Kekerasan di Sekolah Meningkat, Mendesak Kebijakan Sekolah Ramah Anak*. Dipublikasi oleh <http://www.radioaustralia.net.au/> pada 20 Desember 2012, 0:32.
- Aji, K. B. 2017. *Wujudkan Sekolah Ramah Anak*. Ditulis E-Parlemen DPRD DIY. 13 Mei 2017. Dipublikasi oleh <https://www.google.co.id>
- Arikunto, S. & Cepi S.A.J., 2007. *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoretis Praktis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Convention on the Rights of the Child Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49*. Published by www.unicef.org.
- De Grauwe, A. 2004. *School-Based Management (SBM): does it improve quality? United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco)*. Published by www.unesdoc.unesco.org.
- Driyarkara. 2006. *Karya Lengkap Driyarkara*. Penyunting: A. Sudiarja, S.J., dkk. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Farida, Y.T. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Faris. 2012. *SDN Sanetan Pilot Project Sekolah Ramah Anak*. Dipublikasi oleh <http://cbfmrembang.blogspot.com>.
- Fullan, Michael and Watson, Nancy. 1999. *School-Based Management: Reconceptualizing to Improve Learning Outcomes*. Published by <http://michaelfullan.ca/wp-content/uploads/2016/06/13396040480.pdf>
- Godfrey, Erin B., Osher David, Williams Leslie, Wolf Sharon, Juliette Berg, Torrente Catalina, Spier Elizabeth, and Ab, er J. Lawrence. 2012. *Cross-national Measurement of School Learning Environments: Creating Indicators for Evaluating UNICEF's Child Friendly Schools Initiative*. *Child Youth Serv Rev*. 2012 March 1; 34(3): 546–557. doi:10.1016/j.chilyouth.2011.10.015. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3341137/pdf/nihms331651.pdf>.
- Heryawan, A. (2017). *Cegah Kasus Kekerasan Seksual dengan Terapkan Sekolah Ramah Anak*. Dipublikasikan oleh <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/03/>
- Irvine, Jim and Harvey Christopher. 2010. *Final Draft Set of Child Friendly Schools Standards and Indicators for Teacher Education: A Synthesis and Self-Evaluation Tool*. Commonwealth of learning to support the UNICEF/COL Child Friendly Schools Project.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2014. *Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

- Koesoema, D, 2015. *Tujuh Langkah Membangun Sekolah Ramah Anak..*. Dipublikasi oleh <http://news.liputan6.com>.
- Mami Hajaroh; Rukiyati; L. Andriani P; Bambang Saptono. 2015, 2016, 2017. Pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kawasan Pesisir DIY. *Hasil Penelitian*. LPPM UNY
- Miske, Shirley J., 2010. *Child-Friendly Schools - Safe Schools*. Paper. Paper on Second International Symposium on Children at Risk and in Need of Protection di Turkey 24 April 2010. Sponsored by Grand Assembly of Parliament Security General Directorate Ministry of National Education and UNICEF. Published by miskewitt.com/FINAL_CFS-Safe_Schools.
- Nanang, Fattah. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.
- Purwosantoso. 2013. *"Pengembangan Orientasi dan Kurikulum Prodi Kebijakan Pendidikan FIP UNY."* Makalah. Workshop Pengembangan Visi, Misi, Orientasi dan Kurikulum Prodi KP. Yogyakarta: Jurusan FSP FIP UNY.
- Radar Lampung. 2012. *Luncurkan Sekolah Ramah Anak*. Dipublikasi oleh www.radarlampung.co.id pada Jumat, 21 September 2012. 16:09 WIB.

- Rasyidin, Waini. 2014. *Pedagogik Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Rohman, Arif. 2012. *Kebijakan Pendidikan : Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta : Asswaja. Pressindo.
- Rossi, P. & Howard E.F. 1985. *Evaluation Systematic Approach*. California: SAGE Publication.
- Rukiyati & Andriani Purwastuti, L. 2014. *Mengenal Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Rwanda Ministry of Education. 2009. *Child Friendly School Infrastructure Standards and Guidelines: Primary and Tronc Common schools*. www.iiep.unesco.org
- Suparlan. 2015. *Manajemen Berbasis Sekolah: dari Teori Sampai Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tilaar, H.A.R & Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Trulyjogja. 2007. *Plan Indonesia Dirikan Sekolah Dasar Ramah Anak*. Dipublikasi oleh <http://www.trulyjogja.com> 01/05/2007 20:24 WIB.
- UNESCO. 2007. *What is School-based Management. The World Bank, Washington. Published by www.worldbank.org*

UNICEF. 2006. *Development of Child-Friendly Schools (CFS) Indicators*. Prepared by the National Education Quality Initiative Human Sciences Research Council.

_____. 2006. *Child Friendly School Manual*. New York: United Nations Children's Fund. Published by www.unicef.org.

_____. 2009. *Child Friendly School Evaluation: Country Report from Nigeria*. New York: United Nations Children's Fund. Published by www.unicef.org.

_____. 2009. *Child Friendly School Evaluation: Country Report from Thailand*. New York: United Nations Children's Fund. Published by www.unicef.org.

_____. 2009. *Child Friendly School. Global Evaluation Report*. United Nations Children's Fund Three United Nations Plaza New York, New York 10017. Published by www.unicef.org.

USAID. 2014. *Tata Kelola Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik: Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA*. Dipublikasi oleh <http://www.kinerja.or.id/pdf/209972f3-14d3-45b7-84a4-675aaf620f28.pdf>

Weimer, L. David. 2009. "Making Education Research More Policy-Analytic" dalam Gary Sykes, et al. *Handbook of Education Policy Research*. New York: Routledge.

Widoyoko, E. P. 2009. *Evaluasi Program Pembelajaran, Panduan Praktis bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Worthen, Baline R. and Sanders, James R. 1973. *Educational Evaluation: Theory and Practice*. Worthington, Ohio: Charles A. Jones Publishing.



TENTANG PENULIS

Mami Hajaroh, dosen program studi Kebijakan Pendidikan, Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Fakultas Ilmu pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Menyelesaikan Studi S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan di Program Pasca Sarjana UNY pada tahun 2012. Memiliki pengalaman penelitian multi years tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kawasan Pesisir DIY; Pengembangan Model Pendidikan Karakter melalui lagu Tradisional Jawa. Juga meneliti tentang Pengembangan Instrumen Evaluasi kebijakan Sekolah Ramah Anak, dll.

Rukiyati, dosen program studi Kebijakan Pendidikan Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Fakultas Ilmu pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Menyelesaikan Studi S3 Ilmu Pendidikan di Program Pasca Sarjana UNY pada tahun 2012. Selain itu, memiliki penelitian pada bidang kebijakan sekolah ramah anak dan nilai-nilai moral. Menulis buku tentang filsafat pendidikan, epistemologi dan logika pendidikan, dan pendidikan Pancasila.

L. Andriani Purwastuti, dosen program studi Kebijakan Pendidikan, Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Fakultas Ilmu pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Menyelesaikan Studi S3 Ilmu Pendidikan di Program Pasca Sarjana UNY pada tahun 2017. Selain itu memiliki penelitian pada bidang kebijakan sekolah ramah anak dan nilai-nilai moral. Menulis buku tentang filsafat pendidikan, epistemologi dan logika pendidikan, dan pendidikan Pancasila.

Bambang Saptono, dosen program studi Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Menyelesaikan Studi S2 Manajemen Pendidikan di Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang dan sedang menempuh S3 Ilmu Pendidikan di UNY. Menggeluti bidang pendidikan dasar dan manajemen.